



RENCANA STRATEGIS

**Kantor Kementerian Agama
Kota Jakarta Selatan
Tahun 2020**

HEAD OFFICE

Jl. Buncit Raya No. 2
Pejaten Barat Pasar Minggu
Jakarta Selatan
DKI Jakarta
021 7994007 / 021 7940214
web : <https://jaksel.kemenag.go.id>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan tahun 2020-2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Bahwa dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis merupakan bagian dari komponen penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Agama. Maka untuk menjalankan kewajiban dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian Agama telah mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 1052 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Kementerian Agama, sebagai landasan kami dalam menyusun Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan Tahun 2020-2024 adalah dokumen Perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan, dan strategi yang linier dengan Rencana Strategis Kementerian Agama, serta Rencana Strategis Unit Eselon I dan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan Tahun 2015-2019.

Renstra Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan tahun 2020-2024 menjadi rujukan utama seluruh satuan kerja pada Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan dalam periode lima tahun kedepan dan diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Agama di dalam melaksanakan pembangunan bidang Agama dan Pendidikan tahun 2020-2024.

Jakarta, 30 September 2020

Kepala Kantor Kementerian Agama

Kota Jakarta Selatan



M. Umarudin



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 727 TAHUN 2020

TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan Tahun 2020-2024 sebagai arah kebijakan dan program Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan selama 5 (lima) Tahun ke depan yang sesuai misi dan visi Presiden Republik Indonesia, maka perlu dilakukan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tingkat Satker Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan Tahun 2020 - 2024;
- b. bahwa dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan, harus merujuk pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 - 2024 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 1052 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja pada Kementerian Agama Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan tentang Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
5. Peraturan Presiden ...

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 - 2024;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020 - 2024;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 1052 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja pada Kementerian Agama Tahun 2020 - 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan Tahun 2020 – 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu disusun sebagai pedoman bagi satuan kerja untuk:
1. Penyusunan Rencana Strategis;
 2. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan; dan
 3. Penyusunan Rencana/Program Pembangunan lintas sektoral.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2020

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA JAKARTA SELATAN



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum	1
1.1.1 Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama	5
1.1.2 Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Kerukunan Antar Umat Beragama	7
1.1.3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Keagamaan	12
1.1.4 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama	25
1.1.5 Meningkatnya akses layanan pendidikan	32
1.1.6 Meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan	43
1.2 Potensi dan Permasalahan	54
1.2.1 Peningkatan kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan	55
1.2.2 Peningkatan harmoni sosial dan kerukunan umat beragama	56
1.2.3 Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan	57
1.2.4 Peningkatan akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam	58
1.2.5 Peningkatan akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi RA/BA dan Madrasah	59

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Tujuan	61
2.2 Sasaran Kegiatan	62

BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1 Target Kinerja	135
---------------------------------	------------

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama	8
Gambar 1.2 Kegiatan Dialog Intern Umat Khonghucu	11
Gambar 1.3 Alur Pendaftaran Pernikahan	12
Gambar 1.4 Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia Tahun 2015 - 2019	25
Gambar 1.5 Kompetisi Sains Madrasah Dan Aksioma Tahun 2015	52
Gambar 1.6 Kompetisi Sains Madrasah Tahun 2019	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Capaian Kinerja Kantor Kementerian Agama kota Jakarta Selatan Tahun 2015 – 2019.....	3
Tabel 1.2	Presentase Keaktifan Umat Beragama pada Rumah Ibadah Tahun 2019.....	6
Tabel 1.3	Presentase Peran Rumah Ibadah Dalam Kegiatan Sosial Keagamaan Tahun 2019.....	6
Tabel 1.4	Data Kasus Konflik Keagamaan Kantor Kementerian Agama kota Jakarta Selatan Tahun 2015 – 2019	9
Tabel 1.5	Kegiatan Yang Mendukung Penguatan Kerukunan Umat Beragama	10
Tabel 1.6	Peristiwa Nikah Tahun 2015 – 2019.....	12
Tabel 1.7	Jumlah Kantor Urusan Agama Yang Memenuhi Standar	15
Tabel 1.8	Daftar KUA Peraih KUA Teladan Nasional Tahun 2015 – 2019	15
Tabel 1.9	Jumlah Penghulu yang Memenuhi Kompetensi Tahun 2015 – 2019	16
Tabel 1.10	Perbandingan Jumlah Umat Beragama Dengan Penyuluh Agama PNS dan Non PNS.....	17
Tabel 1.11	Jumlah Rumah Ibadah Yang Memenuhi Standar Tahun 2015 – 2019	18
Tabel 1.12	Data Pembimbing Manasik Haji yang Bersertifikat	19
Tabel 1.13	Jumlah Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah Tahun 2015 – 2019	20
Tabel 1.14	Jumlah Data Jamaah Haji Waiting List	21
Tabel 1.15	Jumlah Jamaah Haji Tahun 2015 – 2019	21
Tabel 1.16	Jumlah Jamaah Haji Tahun 2015 – 2019	23
Tabel 1.17	Realisasi Anggaran PKOH Tahun 2017 – 2019.....	23
Tabel 1.18	Perkembangan Predikat Laporan Keuangan Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan Tahun 2015 – 2019.....	26
Tabel 1.19	Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018.....	27
Tabel 1.20	Capaian Delapan Area Perubahan Progress Pelaksanaan RB Tahun 2018.....	30
Tabel 1.21	Capaian Delapan Area Perubahan Progress Pelaksanaan RB Tahun 2019.....	31
Tabel 1.22	Rekapitulasi Perkembangan Penilaian ZI.....	32
Tabel 1.23	Data Guru Agama Kristen Tahun 2015 - 2019	33
Tabel 1.24	Data Guru Agama Katolik Tahun 2015 – 2019.....	33
Tabel 1.25	Data Guru Agama Hindu Tahun 2015 – 2019	34
Tabel 1.26	Data Guru Agama Buddha Tahun 2015 – 2019	35
Tabel 1.27	Angka Partisipasi Kasar RA, MI, MTs N dan MAN Tahun 2016 – 2019.....	35
Tabel 1.28	Angka Partisipasi Murni RA, MI, MTs N dan MAN Tahun 2016 – 2019	36
Tabel 1.29	Jumlah Dana BOS Tahun 2015 – 2019.....	37
Tabel 1.30	Program Indonesia Pintar 2015 – 2019.....	38
Tabel 1.31	Jumlah Siswa Tahun 2015 – 2019	38
Tabel 1.32	Rekapitulasi Data Madrasah Diniyah Kota Jakarta Selatan Tahun 2019.....	39
Tabel 1.33	Rekapitulasi Lembaga TPQ Kota Jakarta Selatan Tahun 2015 – 2019	40
Tabel 1.34	Jumlah Santri Ula, Wustha dan Ulya Tahun 2019	40
Tabel 1.35	Angka Partisipasi Kasar Ula, Wustha dan Ulya Tahun 2016 – 2019	41
Tabel 1.36	Angka Partisipasi Murni Ula, Wustha dan Ulya Tahun 2016 – 2019.....	42
Tabel 1.37	Jumlah Pondok Pesantren dan Jumlah Santri Kota Jakarta Selatan Tahun 2019.....	42

Tabel 1.38	Jumlah Tenaga Pengajar Pondok Pesantren Kota Jakarta Selatan Tahun 2019.....	43
Tabel 1.39	Jumlah Guru PAI Berdasarkan Sertifikasi.....	44
Tabel 1.40	Guru PNS Sudah Sertifikasi Tahun 2015 – 2019.....	46
Tabel 1.41	Guru PNS Belum Sertifikasi Tahun 2015 – 2019.....	46
Tabel 1.42	Guru Non PNS Sudah Sertifikasi Tahun 2015 - 2019.....	47
Tabel 1.43	Guru Non PNS Belum Sertifikasi Tahun 2015 - 2019.....	47
Tabel 1.44	Siswa Peserta Ujian Nasional Tahun 2015 – 2019.....	48
Tabel 1.45	Siswa Lulus Ujian Nasional Tahun 2015 – 2019.....	49
Tabel 1.46	Nilai Rata-Rata Ujian Nasional Tahun 2015 – 2019.....	49
Tabel 1.47	Lembaga Pendidikan Terakreditasi Tahun 2015 - 2019.....	54
Tabel 2.1	Cara Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan Tahun 2020-2024.....	75
Tabel 3.1	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja pada Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan Unit Eselon II Kantor Wilayah Kemenag DKI.....	137
Tabel 3.2	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja pada Kantor Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Unit Eselon I Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam.....	141
Tabel 3.3	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja pada Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan Unit Eselon I Ditjen Pendidikan Islam.....	144
Tabel 3.4	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja pada Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan Unit Eselon I Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen.....	151
Tabel 3.5	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja pada Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan Unit Eselon I Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik.....	157
Tabel 3.6	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja pada Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan Unit Eselon I Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu.....	160
Tabel 3.7	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja pada Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan Unit Eselon I Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha.....	163
Tabel 3.8	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja pada Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan Unit Eselon I Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah...	165
Tabel 3.9	Rencana Pendanaan 9 (Sembilan) Program Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan Tahun 2020.....	170
Tabel 3.10	Rencana Pendanaan 4 (Empat) Program Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan Tahun 2021-2024.....	172

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) MTsN	50
Grafik 1.2	Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) MAN IPA Tahun Ajaran 2018/2019	51
Grafik 1.3	Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) MAN IPS Tahun Ajaran 2018/2019	51
Grafik 1.4	Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) MAN BAHASA Tahun Ajaran 2018/2019	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Kondisi umum pada Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan merupakan pencapaian – pencapaian di bidang Pembangunan Agama dan Bidang Pendidikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019). Program – program yang dijalankan bertujuan untuk mendukung visi Kementerian Agama **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDONESIA YANG TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diemban oleh Kementerian Agama adalah:

1. Meningkatkan Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama;
2. Memantapkan Kerukunan Intra dan Antar Umat Beragama;
3. Menyediakan Pelayanan Kehidupan Beragama yang Merata dan Berkualitas;
4. Meningkatkan Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan;
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang Berkualitas dan Akuntabel;
6. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Umum Berciri khas Agama, Pendidikan Agama pada Satuan Pendidikan Umum dan Pendidikan Keagamaan; dan
7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Terpercaya.

Dalam rangka mendukung visi Kementerian Agama RI Tahun 2015 -2019 maka visi Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan Tahun 2015-2019 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA JAKARTA YANG TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diemban oleh Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan Jakarta adalah:

1. Meningkatkan Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama;

2. Memantapkan Kerukunan Intra dan Antar Umat Beragama;
3. Menyediakan Pelayanan Kehidupan Beragama yang Merata dan Berkualitas;
4. Meningkatkan Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan;
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang Berkualitas dan Akuntabel;
6. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Umum Berciri khas Agama, Pendidikan Agama pada Satuan Pendidikan Umum dan Pendidikan Keagamaan; dan
7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Terpercaya.

Kementerian Agama sebagai bagian dari unsur pelaksana Pemerintah di bidang pembangunan agama dan pendidikan mengemban tugas dan tanggungjawab agar proses perencanaan pembangunan bidang agama dan pembangunan bidang pendidikan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif dengan sepenuhnya mengarah kepada pencapaian tujuan berdasar visi dan misi Kementerian Agama. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian Agama menetapkan tujuan 6 (enam) bidang agama dan 2 (dua) di bidang pendidikan, yaitu:

A. Bidang Agama

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. Pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis;
3. Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata;
4. Peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
6. Peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama;

B. Bidang Pendidikan :

1. Peningkatan akses pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan; dan
2. Peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Rencana Strategis dipandang sangat layak untuk diposisikan sebagai gambaran

umum tentang proses perencanaan pembangunan agama dan pembangunan pendidikan di daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kondisi umum sekaligus potensi dan permasalahan yang merupakan penggambaran atas hasil evaluasi pencapaian tujuan Pembangunan Bidang Agama dan Pendidikan dalam Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan periode sebelumnya yakni pada Tahun 2015-2019. Berikut capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan Tahun 2015 - 2019.

Tabel 1.1
Capaian Kinerja Kantor Kementerian Agama
Kota Jakarta Selatan
Tahun 2015 – 2019

NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	KETERANGAN	
1	Meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama				
	a	Meningkatnya jumlah umat beragama yang aktif pada rumah ibadah	66%	87,14%	Memenuhi
	b	Meningkatnya jumlah rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan sosial keagamaan	67%	83,96%	Memenuhi
2	Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama				
	a	Jumlah penyelesaian konflik antar umat beragama	1	3	Memenuhi
	b	Indeks Kerukunan Umat Beragama Tingkat Provinsi	75,80%	71,30%	Belum Tercapai
3	Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan				
	a	Jumlah Sarana Rumah Ibadah yang memenuhi standar	280	7572	Memenuhi
	b	Jumlah Penyuluh Agama yang memenuhi kompetensi	5230	736	Belum Tercapai
	c	Jumlah KUA yang memenuhi standar	44	44	Memenuhi
	d	Jumlah Penghulu yang memenuhi kompetensi	5230	189	Belum Tercapai
	e	Indeks Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri Tingkat Provinsi	86%	85,91%	Mendekati
4	Meningkatnya akses layanan Pendidikan				
	a	APK RA	5,85	4,81	Belum Tercapai

b	APK MI	14,00	13,81	Mendekati
c	APK MTs	16,00	9,31	Belum Tercapai
d	APK MA	6,70	3,86	Belum Tercapai
e	APK Ula	0,02	0,17	Memenuhi
f	APK Wustha	0,05	0,72	Memenuhi
g	APK Ulya	0,21	0,75	Memenuhi
h	APM RA	6,92	4,39	Belum Tercapai
i	APM MI	12,00	14,00	Memenuhi
j	APM MTs	13,25	7,47	Belum Tercapai
k	APM MA	7,50	2,96	Belum Tercapai
l	APM Ula	0,02	0,16	Memenuhi
m	APM Wustha	0,05	0,72	Memenuhi
n	APM Ulya	0,38	0,75	Memenuhi
5	Meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan			
a	Rerata nilai ujian sekolah MTs	50,82	53,15	Memenuhi
b	Rerata nilai ujian sekolah MA	56,15	57,02	Memenuhi
c	Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) MTsN	79,38	53,15	Belum Tercapai
d	Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) MAN IPA	74,29	53,96	Belum Tercapai
e	Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) MAN IPS	73,36	52,96	Belum Tercapai
f	Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) MAN BAHASA	78,01	53,93	Belum Tercapai

Pencapaian kinerja sasaran strategis Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan

1. Tercapainya peningkatan kualitas kehidupan umat beragama dipengaruhi oleh jumlah umat beragama yang aktif pada rumah ibadah dan jumlah rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan sosial keagamaan;
2. Tercapainya peningkatan harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama dipengaruhi oleh jumlah penyelesaian konflik antar umat beragama dan Indeks Kerukunan Umat Beragama Tingkat Provinsi;
3. Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan keagamaan dipengaruhi oleh jumlah sarana rumah ibadah yang memenuhi standar, jumlah penyuluh agama yang memiliki kompetensi, jumlah KUA yang memenuhi standar, jumlah penghulu yang memenuhi kompetensi, serta Indeks Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri Tingkat Provinsi;

4. Tercapainya peningkatan akses layanan pendidikan dipengaruhi oleh APK RA/Pratama Widya Pasraman, APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman, APK MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman, APK MA/Ulya/Utama Widya Pasraman, APM MI/Ula/SDTK/ Adhi Widya Pasraman, APM MTs/Wustha/SMPTK dan APM MA/Ulya/Utama Widya Pasraman; dan
5. Tercapainya peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan dipengaruhi oleh rerata nilai ujian sekolah MTs, rerata nilai ujian sekolah MA, dan Indeks integritas siswa.

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa selama jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut, sasaran strategis peningkatan kualitas kehidupan beragama mampu mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan tingginya tingkat partisipasi dari umat beragama dalam beribadah di rumah ibadah dan dalam melaksanakan kegiatan sosial keagamaan. Selain itu perlu adanya perhatian khusus untuk dapat meningkatkan capaian pada indikator-indikator lain yang belum mencapai target, seperti pada upaya peningkatan pelayanan keagamaan, perlu adanya inovasi dan perbaikan pada prosedur pelayanan, terutama di pelayanan KUA dan pelayanan pelaksanaan ibadah haji. Adapun pada sasaran strategis peningkatan akses layanan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan, dimana perlu adanya peningkatan kualitas pendidikan yang ditunjang dengan fasilitas sarana prasarana sekolah dan peningkatan kompetensi siswa.

Adapun penjelasan beberapa indikator yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran strategis Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan adalah sebagai berikut:

1.1.1 Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama

Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada pemeluk agama diukur melalui indikator :1) Meningkatnya jumlah umat beragama yang aktif pada rumah ibadah; dan 2) Meningkatnya jumlah rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan social keagamaan. Dua indikator berikut komponennya tersebut menjadi penting untuk melihat dinamika ruang publik sehubungan dengan kepedulian sosial, relasi antar manusia, melestarikan lingkungan, etika dan budi pekerti sampai dengan akhir tahun 2019.

Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada pemeluk agama diukur melalui meningkatnya jumlah umat beragama yang aktif pada rumah ibadah dan meningkatnya jumlah rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan

sosial keagamaan. Rumah ibadah merupakan sarana keagamaan yang substansial bagi pemeluk agama di suatu tempat. Selain sebagai simbol “keberadaan” pemeluk agama, rumah ibadah juga sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah. Artinya fungsi rumah ibadah disamping sebagai tempat peribadahan diharapkan dapat memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jemaahnya, agar kehidupan spiritual keberagaman bagi pemeluk agama tersebut menjadi lebih baik. Variasi presentase keaktifan umat pada rumah ibadah dan peran social keagamaan rumah ibadah pada masing-masing kelompok pemeluk agama sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2

Keaktifan Umat Beragama pada Rumah Ibadah Tahun 2015 - 2019

	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Konghucu	Aliran Kepercayaan	Total
Jumlah Penduduk	2.146.966	120.465	59.933	3.862	11.902	96	54	2.343.278
Jumlah Yang Aktif pada Rumah Ibadah	1.846.390	108.418	53.939	3.475	10.712	86	48	2.023.068
Presentase Keaktifan Umat	86%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	86%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2019 dan Olah Data Kantor Kementerian Agama untuk Keaktifan pada rumah Ibadah

Tabel 1.3

Peran Rumah Ibadah Dalam Kegiatan Sosial Keagamaan Tahun 2015 - 2019

	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Khonghucu	Total
Jumlah Tempat Ibadah	1160	125	5	4	5	2	1301
Jumlah Rumah Ibadah yang Melakukan Kegiatan Sosial	928	125	5	4	5	2	1069
Presentase Peran Rumah Ibadah	80%	100%	100%	100%	100%	100%	82%

Sumber: Olah data, Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan 2015 – 2019

Dari data tabel 1.2 dapat dilihat secara total di tahun 2019 nilai capaian yaitu 86% umat beragama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah terlibat aktif dalam kegiatan keagamaan termasuk kegiatan yang dilaksanakan di rumah ibadah

masing – masing agama maupun event- event nasional di bidang keagamaan sudah melampaui target pada Renstra Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan tahun 2015 - 2019 yakni 66%. Selain itu jumlah rumah ibadah yang berperan aktif dalam kegiatan sosial secara total di tahun 2015 - 2019 memiliki nilai capaian sebesar 83,96% dimana terdapat keterpaduan yang baik antara umat beragama dengan rumah ibadahnya serta mendukung setiap kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di rumah ibadah dengan khushuk dan penuh dengan membangun nilai spritual serta toleransi yang baikmaka dengan melihat catatan target kinerja Renstra Tahun 2015 – 2019 untuk capaian yang didapat sudah melampaui target yang ditetapkan yaitu 67%.

1.1.2 Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Kerukunan Antar Umat Beragama

Kerukunan Hidup Umat Beragama adalah suatu kondisi dimana umat beragama dalam kemajemukan dan keberagaman keyakinan, dapat hidup berdampingan secara damai, rukun dan harmonis, penuh toleransi, saling menghargai, saling tolong menolong, membuka ruang dialog, mencari titik temu dalam memecahkan masalah-masalah kerukunan antar umat beragama. Bagi kota metropolitan Jakarta, komunitas umat beragama mempunyai arti yang sangat penting dan strategis dalam membangun kota Jakarta. Umat beragama dan pemuka agama serta pemerintah, merupakan bagian yang tidak terpisahkan bagi kehidupan masyarakat kota Jakarta. Kerukunan umat beragama terus diperkuat oleh Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan melalui layanan-layanan strategis dalam bentuk penguatan dialog, peningkatan peran FKUB, dan pembentukan desa sadar kerukunan. Peningkatan peran FKUB dalam tingkat wilayah sepenuhnya diatur oleh Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan pada tahun 2015 – 2019 sesuai Peraturan Menteri Agama no 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama dan secara teknis dijalankan oleh Bagian Tata Usaha melalui Pelaksana Organisasi Tata Laksana dan Kerukunan Umat Beragama.

Untuk memotret realitas kerukunan umat beragama dalam hubungannya dengan pembangunan kehidupan sosial keagamaan, digunakan indikator pengukuran berupa: (1) indeks Kerukunan Umat Beragama (indeks KUB) Provinsi; dan (2) jumlah penyelesaian konflik antar umat beragama. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) adalah survey yang dilakukan Litbang yang mengukur tingkat kerukunan umat beragama di seluruh provinsi di Indonesia termasuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mencakup tiga dimensi, yaitu : 1.Toleransi; 2. Kesetaraan; 3. Kerjasama. Sebagai sebuah instrumen, Indeks KUB menggambarkan suatu kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama, serta bekerjasama

ambil bagian dalam penyelesaian bersama dengan ormas dan tokoh – tokoh agama. Adapun jumlah konflik yang terselesaikan selama kurun waktu 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.4
Data Kasus Konflik Keagamaan
Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan Tahun 2015 – 2019

No	Nama Lembaga	Identifikasi Kasus	Tahun	Solusi
1	Pendirian Rumah Ibadah GBKP Pasar Minggu	IMB Tahun 2004 masih izin Rukan sehingga warga menolak pembangunan tersebut	2016	Pemprov Daerah Khusus Ibukota melalui walikota Jakarta Selatan memfasilitasi tempat ibadah di kantor camat Pasar Minggu Lantai 4

Sumber : Data Ortala dan KUB, 2015 - 2019

Dari target Renstra Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan tentang penyelesaian konflik antar umat beragama yakni 1 kasus, maka Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan telah mencapai target renstra 2015 – 2019 yakni menyelesaikan 1 kasus konflik antar umat beragama sesuai dengan tabel 1.4.

1.1.2.1 Peningkatan Kapasitas Aktor-Aktor Kerukunan Antar Umat Beragama

Selama ini Pemerintah telah mempraktekkan sejumlah strategi, pendekatan dan kegiatan yang secara aktif melibatkan berbagai komponen aktor – aktor kerukunan. Kapasitas aktor - aktor kerukunan ditingkatkan melalui berbagai kegiatan kerukunan, seperti pendalaman pemahaman terhadap regulasi moderasi dan kerukunan umat beragama, kemampuan manajemen pencegahan dan penanganan konflik, promosi kerukunan umat beragama maupun penyiaran media yang berorientasi pada jurnalisme damai. Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan juga melibatkan tokoh perempuan dan unsur pemuda dalam keanggotaan FKUB dan lembaga keagamaan dalam rangka menciptakan iklim rukun di Kotamadya Jakarta Selatan. Pelibatan dan peran aktif seluruh aktor kunci kerukunan inilah yang memberikan optimisme pemerintah untuk benar-benar dapat mewujudkan kondisi kerukunan substantif. Penguatan kapasitas aktor-aktor kerukunan sejatinya merupakan modal dalam membingkai kerukunan antar umat beragama guna

mewujudkan masyarakat yang aman, damai, sejahtera dan bersatu. Kegiatan peningkatan kapasitas aktor-aktor kerukunan tersebut berupa workshop dan dialog, yang telah diselenggarakan sebanyak 9 kegiatan di sepanjang tahun 2015 - 2019 oleh Pelaksana Kerukunan Umat Beragama antara lain :

Tabel 1.5
Kegiatan Yang Mendukung Penguatan Kerukunan Umat Beragama

TAHUN KEGIATAN	KEGIATAN KEAGAMAAN	VOLUME KEGIATAN	LOKASI
2015	1. Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama Tingkat Kota	1	Jakarta Selatan
2016	1. Pembinaan Lembaga Keagamaan dan Institusi Media Base Online	1	Jakarta Selatan
	2. Rapat Koordinasi Lembaga Keagamaan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	1	Jakarta Selatan
2017	1. Dialog Lintas Agama Dengan Berbagai Kalangan Masyarakat dan Profesi Tingkat Kota	1	Jakarta Selatan
	2. Dialog Lintas Agama Dengan Berbagai Kalangan Masyarakat dan Profesi Tingkat Kecamatan	1	Jakarta Selatan
2018	1. Dialog Lintas Agama Dengan Berbagai Kalangan Masyarakat dan Profesi Tingkat Kota	1	Jakarta Selatan
	2. Dialog Lintas Agama Dengan Berbagai Kalangan Masyarakat dan Profesi Tingkat Kecamatan	1	Jakarta Selatan
2019	1. Dialog Lintas Agama Dengan Berbagai Kalangan Masyarakat dan Profesi Tingkat Kota	1	Jakarta Selatan
	2. Dialog Lintas Agama Dengan Berbagai Kalangan Masyarakat dan Profesi Tingkat Kecamatan	1	Jakarta Selatan
	Jumlah Kegiatan	9	

Sumber : Data Orjala dan KUB, 2015 – 2019

Berikut salah satu foto terkait kegiatan tersebut:

Gambar 1.2
Kegiatan Dialog Kerukunan Umat Beragama



Sumber : Data Pelaksana KUB, 2015

1.1.2.2 Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas FKUB dan Lembaga Keagamaan

FKUB merupakan sebuah forum/wadah yang dibentuk untuk menampung seluruh aspirasi kepentingan umat beragama dan kerukunan umat beragama. Tugas FKUB adalah melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan rumah ibadah (khusus FKUB Kabupaten/Kota). Dalam rangka mempertahankan kondisi harmonis yang telah ada, koordinasi lintas lembaga keagamaan, aparat pemerintah, instansi media dan para tokoh juga telah dilakukan secara periodik. Jumlah kegiatan koordinasi lintas lembaga keagamaan yang diselenggarakan pada level provinsi dan kabupaten/kota semakin meningkat. Koordinasi juga dibangun melalui pemberian bantuan operasional sekber FKUB tingkat kota/kabupaten Jakarta Selatan yang beralamat di Kantor Walikota Jakarta Selatan, Jalan Prapanca Raya No. 9, Blok A Lantai 6, Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Pemberdayaan juga dilakukan melalui koordinasi lembaga keagamaan dan instansi media yang dilakukan secara periodik. Yang dimaksud lembaga/majelis keagamaan di sini adalah MUI, PGI, KWI, PHDI, WALUBI, dan MATAKIN. Selain itu, sebagai upaya mengedukasi masyarakat telah dilakukan kerjasama kemitraan dengan institusi media baik media cetak, elektronik, dan *online*.

Pemerintah dalam hal ini Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan memberikan bantuan melalui program Kelurahan /Desa Sadar Kerukunan dengan melibatkan unsur RT/RW dalam satu Kelurahan di bawah koordinasi FKUB Kota/Kabupaten. Selain itu Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan juga melakukan kampanye kerukunan melalui media sosial.

1.1.3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Keagamaan

1.1.3.1 Pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan barisan terdepan dalam pelayanan administrasi keagamaan umat Islam. Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan selalu berupaya meningkatkan kualitas KUA baik sarana prasarana dan pelayanannya sehingga calon pengantin terfasilitasi dalam melakukan proses pernikahan di KUA. Berikut ini alur prosedur pendaftaran pernikahan di KUA:

Gambar 1.3
Alur Pendaftaran Pernikahan



Sumber: Dirjen Bimas Islam, 2019

Tabel 1.6

Peristiwa Nikah Tahun 2015 - 2019

TAHUN	JUMLAH PERISTIWA NIKAH
2015	14.290
2016	14.007
2017	14.454
2018	15.046
2019	14.882

Sumber: Seksi Bimas Islam, 2015-2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah peristiwa nikah di Kota Jakarta Selatan mengalami peningkatan dari tahun 2015 – 2019, terlebih lagi pada tahun 2018. Hal ini dikarenakan kemudahan pelayanan dalam pendaftaran nikah yang tercermin dalam pembayaran nikah sebesar Rp.600.000,- yang langsung ditransfer ke rekening Bendahara Umum Negara (BUN) dari tahun 2014, sehingga tidak ada lagi pungutan-pungutan liar atau tarif yang berbeda antar KUA dalam kepengurusan tersebut.

Di samping pelayanan administrasi keagamaan, di KUA juga terdapat berbagai bentuk dan jenis layanan lain seperti Sertifikasi Halal, Sertifikasi Arah Kiblat, Sertifikasi Masjid, Sertifikasi Mushalla, layanan Hisab Rukyat, Bimbingan Manasik Haji, Konsultasi Keluarga Sakinah, dan lain-lain. Selain itu kini KUA juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas aplikasi berbasis IT, seperti Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), Sistem Informasi Masjid (SIMAS), Sistem Informasi Manajemen Penerangan Agama Islam (SIMPENAS) dan Sistem Informasi Kepenghuluan (SIK).

Pengelolaan administrasi keagamaan bersentuhan langsung dengan pelaksanaan keseluruhan aspek hukum Islam yang ada di masyarakat. Di antara pelaksanaan aspek-aspek hukum Islam yang sangat mendasar adalah kebutuhan terhadap pelayanan pencatatan nikah dan rujuk. Pada sisi ini, keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan memiliki arti dan peran sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Islam di bidang pelayanan pencatatan nikah dan rujuk.

Program-program pemberdayaan KUA dan sumberdaya manusia di dalamnya terus dilakukan. Misalnya, melakukan pendataan nikah rujuk nasional, basis data penghulu dan P3N, menyelenggarakan lomba baca kitab, menyelenggarakan lomba karya tulis ilmiah, peningkatan kompetensi dan budaya kerja penghulu, melakukan penilaian kinerja penghulu, dan optimalisasi program pencatatan nikah luar negeri.

Untuk menunjang dan mendorong peningkatan kualitas kinerja sebagai penopang tata kelola pemerintahan yang baik, KUA juga dibekali dengan pemenuhan berbagai standar pelayanan seperti *Standard Operating Procedure (SOP)*, *Maklumat Layanan* dan *Peta proses bisnis*.

Apa yang menarik dari pengelolaan dan pelayanan KUA saat ini adalah mulai diadakan pelayanan berbasis teknologi informasi di bawah naungan Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI), sehingga seluruh masyarakat dapat mengakses kebutuhan pelayanan secara langsung, cepat, transparan, dan akuntabel. Selain terkait dengan pelayanan KUA, urusan agama Islam dan pembinaan syari'ah juga memberikan jabaran yang lebih jelas mengenai pedoman pelaksanaan dan pembinaan beberapa aspek hukum Islam yang sangat konkret seperti pelayanan dan pembinaan keluarga sakinah, jaminan produk halal, pembinaan dan pemberdayaan kemasjidan, pelayanan dan pembinaan syariah serta hisab rukyat. Disamping itu dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama umat Islam terdapat pelayanan dan pembinaan keluarga sakinah melalui berbagai program dan kegiatan sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara terpadu antara masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang taat beragama, rukun, cerdas dan sejahtera lahir batin.

KUA Kecamatan merupakan ujung tombak layanan publik Kementerian Agama kepada masyarakat. Dalam hal ini, keberadaan KUA yang memenuhi standar pelayanan mutlak diperlukan. Selain diperlukan sarana-prasarana yang memadai untuk mendukung layanan (PTSP), tidak kalah penting adalah diperlukan sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang memiliki tanggungjawab, komitmen, integritas, inovasi dan keteladanan dalam mewujudkan peningkatan layanan kepada masyarakat. Indikator KUA yang memenuhi standar adalah Nihil Aduan Masyarakat (Dumas), Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal sudah diterapkan, adanya Maklumat Layanan, adanya pakta integritas, Tidak ditemukan adanya pungutan biaya atas layanan nikah dan layanan administrasi lainnya, administrasi biaya nikah di luar kantor KUA menggunakan Sistem Informasi PNBPN on-line. Di provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdapat 44 KUA dan semuanya sudah memenuhi standar selama kurun waktu 5 tahun (2015 – 2019), berikut data KUA yang memenuhi standar:

Tabel 1.7**Jumlah Kantor Urusan Agama yang Memenuhi Standar**

	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah KUA	10	10	10	10	10

Sumber: Seksi Bimas Islam, 2015-2019

KUA yang memenuhi standar setiap tahun tetap dan stabil dengan sejumlah 10 KUA Kecamatan di Kota Jakarta Selatan, maka diukur dengan target Renstra Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan tahun 2015-2019 yakni 10 KUA Kecamatan dapat kami simpulkan target telah tercapai dalam setiap tahun.

Selain itu prestasi yang sudah diraih oleh KUA di provinsi Daerah Khusus Kota Jakarta Selatan dalam kurun waktu 2015-2019 melalui hasil penilaian KUA Teladan Tingkat Nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 1.8**Daftar KUA Peraih KUA Teladan Tingkat Provinsi DKI Jakarta 2015 - 2019**

Tahun	Kepala KUA	KUA	Nasional
2019	Drs. Pahrurozi	KUA Kec. Pancoran	Juara II
2018	Drs. Didi Ruhaidi	KUA Kec. Jagakarsa	Juara III
2017	H. Khafsin Umar, S.Ag	KUA Kec. Cilandak	Juara I
2016	H. Khafsin Umar, S.Ag	KUA Kec. Cilandak	Juara III
2015	H. Madari, S.Ag	KUA Kec. Setiabudi	Juara I

Sumber: Seksi Bimas Islam, 2015-2019

1.1.3.2 Peningkatan Kualitas Penghulu

Secara historis keberadaan penghulu tidak dapat dilepaskan dari dinamika kehidupan masyarakat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan secara menyeluruh. Perkembangan dan dinamika masyarakat sekaligus menjadi tenaga lapangan yang andal dalam mensukseskan visi dan misi Kementerian Agama khususnya di bidang pernikahan dan pembinaan keluarga sakinah menuju masyarakat bahagia sejahtera dan makmur berkat ridho Allah SWT. Penghulu sebagai bagian dari pelayanan KUA yang bertugas dan bertatap muka

langsung dengan masyarakat tentunya mempunyai kompetensi dibidang baca tulis Alquran, khotbah nikah, pembinaan keluarga sakinah, bimbingan perkawinan serta memahami fikih munakahat. Berikut data jumlah penghulu yang memiliki kompetensi yaitu:

Tabel 1.9
Jumlah Penghulu Yang Memenuhi Kompetensi Tahun 2015 - 2019

NO.	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Penghulu	40	40	57	45	55

Sumber : Seksi Bimas Islam, 2015-2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penghulu yang memiliki kompetensi yang cukup jumlahnya naik dari tahun 2015 – 2019, meskipun tidak adanya perekrutan CPNS untuk penghulu dan jumlah anggaran untuk peningkatan kualitas penghulu juga berkurang dari tahun ketahun, namun adanya mutasi penghulu dari kota lain dan proses inpassing ke penghulu baik dari JFT maupun JFU. Sehingga target renstra 2015-2019 sebesar 100 penghulu yang memenuhi kompetensi setiap tahunnya, belum bisa tercapai hal ini dikarenakan jumlah alokasi penerimaan formasi Calon Pegawai Negeri untuk penghulu masih sangat minim sehingga baru tercapai hanya 55 persen dari target yang telah ditetapkan secara akumulatif.

1.1.3.3 Peningkatan Kualitas Penyuluh Agama

Penyuluh Agama memainkan peranan strategis dalam memperkuat kehidupan beragama di masyarakat. Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan telah memprogramkan peningkatan kuantitas penyuluh agama dengan merekrut tenaga penyuluh agama baik PNS dan Non PNS. Dalam meningkatkan kualitas penyuluh agama, mulai tahun 2019 dibangun sistem elektronik kinerja penyuluh agama sebagai media pengukuran kinerja. Peningkatan jumlah penyuluh Non PNS yang direkrut Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan berasal dari sebagian pemuka dan ahli agama. Beberapa kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh penyuluh agama sehingga penyuluh dapat menjadi penyuluh yang

kompeten antara lain kompetensi dalam ilmu agama, kompetensi komunikasi, kompetensi social serta kompetensi moral. Disamping empat kompetensi tersebut, penyuluh agama dapat dinyatakan kompeten jika mampu menjalankan tiga fungsi utama penyuluh, yaitu fungsi edukatif, fungsi konsultatif dan fungsi advokatif. Dari sejumlah kriteria tersebut, berikut gambaran jumlah penyuluh agama yang kompeten dari tahun 2015 – 2019 selama 5 tahun terakhir:

Tabel 1.10
Perbandingan Jumlah Umat Beragama Dengan Penyuluh Agama PNS dan Penyuluh Agama Non PNS

Unit Kerja	Penyuluh Agama PNS					Penyuluh Agama Non PNS				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Bimas Islam	48	42	42	42	41	95	95	95	95	95
Penyelenggara Kristen	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
Penyelenggara Katolik	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Penyelenggara Hindu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyelenggara Buddha	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Penyelenggara Konghuchu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : Seksi Bimas Islam, Penyelenggara Kristen, Katolik, Budha 2015-2019

Dari tahun 2015 hingga 2019 jumlah penyuluh agama mengalami penurunan di tahun 2018 sampai dengan 2019. Hal ini terjadi dikarenakan adanya moratorium penerimaan CPNS sehingga berpengaruh terhadap tingkat jumlah penyuluh yang ada. Meskipun jumlah tenaga penyuluh agama PNS jauh lebih sedikit dibandingkan tenaga penyuluh agama Non PNS akan tetapi secara jumlah keseluruhan jumlah penyuluh agama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

masih tergolong sedikit dan belum sebanding dengan jumlah umat yang dilayani, sehingga dibutuhkan campur tangan para tokoh agama dan pemuda lintas agama dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama.

1.1.3.4 Peningkatan Sarana Rumah Ibadah

Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan telah memberikan rekomendasi permohonan bantuan untuk fasilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah dalam bentuk pembangunan, rehabilitasi, dan sarana kebersihan, yang berhasil menstimulus masyarakat untuk menghimpun dana swadaya dalam penyelesaian pembangunan/rehabilitasi/pengembangan rumah ibadah. Selain rekomendasi bantuan juga dilakukan pembinaan/workshop kepada para pengelola rumah ibadah semisal takmir masjid/marbot agar dalam pengelolaan rumah ibadah mengikuti standar manajemen yang lebih tertata dan tertib. Dari data jumlah rumah ibadah, semuanya telah memenuhi standar sebagai rumah ibadah dengan indikator standar yang meliputi keamanan, kebersihan, sehat dan kelengkapan prasarana dan sarana peribadatan.

Tabel 1.11

Jumlah Rumah Ibadah Yang Memenuhi Standar Tahun 2015 - 2019

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah rumah ibadah	1.205	1.230	1.255	1.280	1.301

Sumber: Olah data, Kantor Kemenag Kota 2015 – 2019

Target pencapaian jumlah sarana rumah ibadah yang memenuhi standar pada Renstra 2015-2019 adalah total dalam kurun waktu tersebut sejumlah 96 rumah ibadah, dari tabel 1.11 pencapaian Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan dalam jumlah sarana rumah ibadah yang memenuhi standar sebesar 1.301 rumah ibadah, telah melebihi target yang ditetapkan.

1.1.3.5 Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah

Upaya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Haji dan Umrah antara lain dilakukan melalui peningkatan Pelayanan Pendaftaran dan Pembatalan Haji, Pengembangan Pelayanan dan Pembinaan Jamaah Haji dan Umrah, Peningkatan

Laporan Keuangan Haji baik melalui DIPA maupun melalui Pengelolaan Keuangan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji (PKOPIH). Bentuk Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan, telah berjalan meliputi bimbingan manasik haji, penyiapan dokumen haji, akomodasi pada Asrama Haji Embarkasi dan transportasi udara pada saat pemberangkatan dan pemulangan. Hal ini juga merupakan indikator penentu tingkat kepuasan para Jemaah terhadap pelayanan ibadah haji di Kota Jakarta Selatan. Peningkatan sarana dan prasarana tempat pelayanan pendaftaran dan pembatalan jamaah haji dan umrah di Kantor Kementerian Agama Kota/kabupaten untuk pelayanan reguler dan Pelayanan Umrah di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan dengan biaya dari DIPA dan PAOH.

Peningkatan kualitas pelayanan pembinaan jamaah haji dan umrah dengan melaksanakan kegiatan sertifikasi pembimbing manasik haji untuk para pembimbing KBIHU, para penyuluh dan ASN Kementerian Agama yang terlibat langsung dalam pelaksanaan bimbingan manasik dengan jumlah pembimbing Manasik yang bersertifikat dari tahun 2013 sampai dengan 2017 sebanyak 256 orang, dengan komposisi 157 orang adalah pembimbing dari KBIHU dan 99 Orang dari penyuluh dan ASN Kementerian Agama dan pada tahun 2017 manasik haji dilaksanakan oleh FK KBIH dengan biaya swadaya sedangkan untuk tahun 2018 dan 2019 jumlah pembimbing manasik yang bersertifikat masih di angka yang sama. Berikut ini adalah data pembimbing yang bersertifikat:

Tabel 1.12

Data Pembimbing Manasik Haji Yang Bersertifikat

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Jumlah
Jumlah Pembimbing	12	12	13	13	13	13

Sumber: Seksi PHU, Kantor Kemenag 2013 – 2017

Bimbingan manasik dilaksanakan di Kementerian Agama Kota/ kabupaten dan KUA, pengembangan metode bimbingan dengan system masal dan klasikal, bimbingan masal dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama melalui bimbingan klasikal di laksanakan di KUA Kecamatan. Pelaksanaan bimbingan dilaksanakan dengan metode ceramah, audiovisual, tanya jawab dan praktek manasik haji. Seluruh pembimbing manasik di KUA dan pada KBIHU dilaksanakan oleh

pembimbing yang bersertifikat. Jumlah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) se Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebanyak 40 buah dengan rincian sebagai berikut

Tabel 1.13

Jumlah Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah Tahun 2015 - 2019

URAIAN	Kota Madya	Jumlah
Jumlah	Jakarta Selatan	
KBIHU	40	40

Sumber: Seksi PHU, Kantor Kemenag 2015 – 2019

Pemberian pelayanan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan penyelenggaraan ibadah khusus dengan melalui kegiatan pelayanan, pembinaan, bimbingan dan pengawasan, melakukan visitasi terhadap izin baru PPIU dan perpanjangan izin PIHK yaitu meliputi kelengkapan administrasi, sarana dan prasarana. Program-program yang ada pada PPIU dan PIHK sebagai tolak ukur pelaksanaan kegiatan PPIU dan PIHK bekerja sama dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Pusat merencanakan pengawasan terhadap pemberangkatan dan pemulangan jemaah umrah dan PIHK. Jumlah PPIU di Kota Jakarta Selatan adalah sebesar 152 dan PIHK sebesar 85 penyelenggara.

A. Pengembangan Sistem Pendaftaran Haji

Pendaftaran Haji Reguler berdasarkan PMA Nomor 13 Tahun 2018 prosedur adalah sebagai berikut:

- a. Calon Jamaah Haji membuka tabungan haji pada BPS BPIH sesuai domisili dengan syarat membawa KTP dan setoran awal sebesar Rp 25.000.000,- ;
- b. Calon Jamaah Haji menandatangani Surat Pernyataan memenuhi persyaratan pendaftaran haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI;
- c. Calon Jamaah Haji melakukan transfer rekening BPKH sebesar setoran awal BPIH pada Cabang BPS BPIH sesuai domisili;
- d. BPS BPIH menerbitkan lembar bukti setoran awal yang berisi nomor validasi;
- e. Dokumen bukti setoran awal BPIH ditempel Pas Foto calon jamaah haji ukuran 3 x 4 cm dan bermaterai;
- f. Calon jamaah haji mendatangi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan membawa dokumen bukti setoran awal dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan untuk diverifikasi kelengkapannya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pembayaran setoran awal BPIH;

- g. Calon jamaah haji mengisi formulir pendaftaran haji berupa surat pendaftaran pergi haji (SPPH) dan menyerahkannya kepada petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Calon Jamaah Haji menerima 1 lembar bukti pendaftaran haji yang berisi nomor porsi pendaftaran, ditandatangani dan di bubuhi stempel Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- h. Kantor Kementerian agama Kabupaten / Kota menerbitkan buku cetak SPPH sebanyak 5 (lima) lembar yang setiap lembarnya di cetak / distempel pas foto calon jamaah haji ukuran 3 x 4 cm.

Dari pengembangan pelayanan pendaftaran calon ibadah haji tersebut maka di dapatkan data Jumlah *waiting list* jamaah haji sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.14

Jumlah Data Jamaah Haji *Waiting List*

URAIAN		Kota Madya
Jumlah		Jakarta Selatan
Jamaah		42.489

Sumber: Seksi PHU, Kantor Kemenag 2015 – 2019.

Untuk jumlah jamaah haji Kota Jakarta Selatan dari tahun 2015 – 2019 sebagai berikut:

Tabel 1.15

Jumlah Jamaah Haji Tahun 2015 - 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Jamaah Haji	1.980	1.980	2.012	1989	2.020

Sumber: Seksi PHU, Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan 2015 – 2019.

Pada tahun 2015 dan 2016 jumlah jamaah haji bersifat tetap dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang melakukan pengurangan kuota sebanyak 20% dan berakibat pada jumlah jamaah haji yang berangkat ketanah suci.

Selain pendaftaran haji reguler, pelayanan pembatalan ibadah haji pun juga dilaksanakan sesuai regulasi, sepanjang tahun dan dilakukan pada hari kerja dengan alur sebagai berikut:

1. Sebab meninggal dunia

- a. Surat permohonan ditujukan kepada Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten sesuai domisili;
 - b. Surat pernyataan batal (bermaterai 6000);
 - c. Surat kuasa (bermaterai 6000);
 - d. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak;
 - e. Asli SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) yang dikeluarkan Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten;
 - f. Asli tanda bukti setoran BPIH awal/ BPIH lunas beserta bukti transfer dari BPS;
 - g. Fotocopy surat pernyataan ahli waris dari kelurahan sampai kecamatan;
 - h. Fotocopy Surat Laporan kematian dari kelurahan;
 - i. Fotocopy KTP calon jamaah haji yang meninggal;
 - j. Fotocopy KTP semua ahli waris dan akte kelahiran bagi ahli waris di bawah umur;
 - k. Fotocopy kartu keluarga calon jamaah haji dan semua ahli waris;
 - l. Fotocopy surat nikah calon jamaah haji;
 - m. Fotocopy rekening tabungan penerima kuasa (banknya harus sama).
2. Sebab Alasan Sakit dan lain – lain
- a. Surat permohonan ditujukan kepada Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten sesuai domisili;
 - b. Surat pernyataan batal (bermaterai 6000) diisi dengan alasannya;
 - c. Surat keterangan dari Dokter (pembatalan karena sakit);
 - d. Surat kuasa (bermaterai 6000) jika dikuasakan beserta KTP asli calon jamaah haji yang dikuasakan;
 - e. Asli SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) yang dikeluarkan Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten;
 - f. Asli tanda bukti setoran BPIH awal/ BPIH lunas beserta bukti transfer dari BPS.

B. Pelaksanaan Anggaran Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Sumber anggaran kegiatan Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah terdiri dari anggaran DIPA dan anggaran Badan Penyelenggaraan Haji dan Umrah (BIPH) yang disebut dengan PAOH/PKOH (Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran Operasional Haji).

Anggaran APBN (DIPA) digunakan untuk membiayai kegiatan – kegiatan operasional perkantoran, operasional embarkasi, PPIH embarkasi dan PPIH kloter.

Selain operasional penyelenggaraan penyelenggaraan haji, anggaran pada DIPA juga di pergunakan untuk berbagai kegiatan seperti sosialisasi peraturan baru terkait penyelenggaraan haji dan umrah, kegiatan JAMARAH (Jagong Masalah Umrah dan Haji) dan Pra Manasik.

Anggaran dari Badan Penyelenggaraan Haji dan Umrah (BIPH) yaitu PKOH digunakan untuk membantu membiayai penyelenggaraan ibadah haji yang berhubungan langsung dengan jamaah haji, yaitu bimbingan manasik di Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, insentif karu karom, biaya akomodasi dan konsumsi jamaah selama di asrama haji. Anggaran PKOH bisa juga disebut dengan dana optimalisasi yang berasal dari hasil pengembangan dana setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Pada tahun 2019 dana optimalisasi tersebut jauh lebih besar dari pada tahun 2018. Selain itu pada tahun 2019 ada *virtual account* yang diserahkan kepada calon jamaah haji yang masuk daftar tunggu yang gunanya untuk mencatat nilai manfaat dari setoran awal BPIH setiap calon jamaah haji.

Dari penggunaan kedua anggaran tersebut, maka dapat diperoleh realisasi dari anggaran DIPA dan PKOH selama tahun 2017 – 2019, yaitu:

Tabel 1.16
Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2017 – 2019
(Dalam Rupiah)

Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
Pagu	Realisasi(%)	Pagu	Realisasi(%)	Pagu	Realisasi(%)
17.042.714.000	94,35 %	16.494.602.365	94,0 %	15.961.953.000	92,18 %

Sumber: Perencana, Kantor Kemenag Kota Jakarta Selatan 2015 – 2019

Dari data diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran dari sumber APBN dirasa cukup optimal dimana angka realisasi berada diatas 90 persen dan ikut berkontribusi pada pencapaian realisasi Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan yang cukup tinggi. Peningkatan penyerapan anggaran pada DIPA terjadi ketika pelaksanaan haji mulai berjalan, dari proses perekrutan petugas hingga pemberangkatan dan pemulangan ibadah haji dari tanah suci.

Tabel 1.17
Realisasi Anggaran PKOH Tahun 2017 – 2019
(Dalam Rupiah)

Tahun 2018		Tahun 2019	
Pagu	Realisasi(%)	Pagu	Realisasi(%)
1.460.957.000	79,22 %	1.417.325.248	79,99 %

Sumber: Seksi PHU, Kantor Kemenag 2015 – 2019

Realisasi anggaran PKOH setiap tahunnya akan berbeda tergantung dari kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya. Karena dana ini diambil dari uang jamaah maka mekanisme penggunaannya harus melalui persetujuan DPR. Dari persetujuan tersebut kemudian dibuat alokasi anggaran per satuan kerja. Mekanismenya adalah pengambilan 80 persen dari dana tersebut sebagai uang muka, jika belum mencukupi maka 20 persen dari dana tersebut juga akan diambil. Akan tetapi jika sudah mencukupi maka hanya 80 persen saja yang dipergunakan untuk biaya operasional. Pada tahun 2017 sampai dengan 2018 biaya manasik per orang adalah Rp.85.000,- sedangkan pada tahun 2019 menurun menjadi Rp.63.092,- per orang.

Untuk pencapaian pemberian pelayanan haji yang maksimal kepada jemaah haji ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pelayanan Dokumen Visa haji dengan sistem E-Hajj, dengan system ini, maka Visa Jamaah dapat diselesaikan lebih cepat dan lebih teratur karena pengiriman paspor berdasarkan kloter;
2. Pelayanan di Embarkasi dengan sistem pelayanan satu atap dapat mempercepat proses penerimaan jemaah di embarkasi saat kedatangan dan pemulangan;
3. Pemberian paket buku yang telat waktu, sehingga jemaah dapat mempelajari manasik dengan baik;
4. Mengusulkanke Pusat agar *Give Away* untuk jemaah haji ditingkatkan kualitasnya;
5. Memberikan gelang identitas dengan system *barcode* sehingga memudahkan petugas untuk mengenali jemaah tersebut bila ada permasalahan di Arab Saudi;
6. Adanya perbaikan dan revitalisasi UPT Asrama Haji Pondok Gede memberikan kenyamanan kepada jemaah selama di Embarkasi.

Semua usaha-usaha tersebut dapat meningkatkan Indeks kepuasan Jemaah, Survey Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap kepuasan Jemaah Haji Indonesia yang terus meningkat sehingga mencapai indeks sangat memuaskan dari

tahun 2015 hingga 2019. Indeks tersebut diperoleh melalui pengambilan kuesioner yang dilakukan pada embarkasi seluruh Indonesia termasuk Kota Jakarta Selatan, sehingga indeks yang tertera pada tabel berikut adalah hasil dari penghitungan yang di dalamnya termasuk Kota Jakarta Selatan juga ikut serta dalam memperoleh capaian kepuasan layanan yang maksimal. Peningkatan tingkat kepuasan jamaah haji tersebut dapat disimpulkan melalui tabel dan gambar dibawah ini:

Gambar 1.4
Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia Tahun 2015 - 2019



Sumber: Biro Pusat Statistik, 2019

Dari indeks kepuasan Jamaah Haji Indonesia secara nasional yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik dan diambil secara rerata, nilai kepuasan jamaah haji tiap wilayah adalah 85,91 yang berarti capaian Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan mendekati target Renstra 2015-2019 yakni 86. Hal ini disebabkan belum adanya penilaian indeks kepuasan jamaah haji secara menyeluruh per wilayah, sehingga timbul nilai rerata tersebut yang diambil dari keseluruhan wilayah di Indonesia.

1.1.4 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama

Pencapaian atas tujuan peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel ditandai dengan tiga hal, yaitu:

(1) meningkatnya kontribusi terhadap perolehan opini Laporan Keuangan; (2) meningkatnya hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan (3) meningkatnya hasil penilaian Reformasi Birokrasi.

1.1.4.1 Kontribusi terhadap perolehan Opini Laporan Keuangan

Dalam 5 tahun terakhir (2015-2019) Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan mampu mempertahankan konsistensi dalam mendukung Kementerian Agama agar mendapatkan opini WTP dari BPK RI hingga sampai dengan saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan Kementerian Kota Jakarta Selatan sudah bagus yang antara lain didukung oleh komitmen pimpinan dalam melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan dan didukung oleh kualitas pelaporan keuangan dari masing-masing satuan kerja Pusat dan Daerah.

Tabel 1.18

Perkembangan Predikat Laporan Keuangan Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan Tahun 2015-2019

No	TAHUN	OPINI BPK
1	2015	Wajar Tanpa Pengecualian – Dengan Paragraf Penjelasan
2	2016	Wajar Tanpa Pengecualian
3	2017	Wajar Tanpa Pengecualian
4	2018	Wajar Tanpa Pengecualian
5	2019	Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber: Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama RI 2015 – 2019

Dalam menyusun Laporan Keuangan dilakukan empat strategi antara lain pensertifikasian tenaga bendahara di tiap Satuan Kerja, penataan aset dan penyelamatan BMN, meminimalisir hasil temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor BPK, pelaksanaan LPJ keuangan yang berbasis Akrual dan berdasar peraturan yang berlaku.

Dalam upaya menyajikan Laporan Keuangan yang layak, langkah-langkah yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan diantaranya adalah:

1. Melaksanakan sosialisasi, bimtek dan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal penyusunan Laporan Keuangan;

2. Penunjukkan Duta Akrual SAIBA dan BMN dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan operator dalam menyajikan Laporan Keuangan dan dalam membangun koordinasi dengan operator sejawat dan unit terkait;
3. Melakukan pengamanan asset khususnya aset tanah secara bertahap dengan melakukan proses sertifikasi tanah atas nama Kementerian Agama. Sasaran strategis dalam hal Laporan Keuangan adalah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang selama ini sudah diraih oleh Kementerian Agama.
4. Melakukan penyelesaian nota temuan auditor baik dari BPK, BPKP, dan Inspektorat Jenderal secara kontinu, terkoordinasi dan terarah.

1.1.4.2 Peningkatan hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja ditunjukkan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan mendapatkan nilai hasil evaluasi laporan akuntabilitas kinerja pada tahun 2018 sebesar 72,70 (Predikat BB/ Sangat Baik), hal ini menunjukkan bahwa laporan akuntabilitas kinerja dalam kategori sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem manajemen kinerja yang handal.

Tabel 1.19

Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018

No	Komponen	Bobot	NILAI TH 2018
1.	Perencanaan Kinerja	30	26,70
2.	Pengukuran Kinerja	25	15,63
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,25
4.	Evaluasi Kinerja	10	6,49
5.	Capaian Kinerja	20	13,63
	Nilai Hasil Evaluasi	100	72,70

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan. Ekspos hasil evaluasi SAKIP tahun 2018

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut menggambarkan komponen-komponen penilaian sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja, dengan maksimal bobot nilai 30, pada tahun 2018 Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan mendapatkan nilai 26,70. Hal yang harus diperhatikan untuk komponen ini adalah:
 - a. Dokumen Renstra belum digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran;
 - b. Belum ada mekanisme monitoring pencapaian target jangka menengah pada Renstra;
 - c. Rencana Kinerja tahunan belum disajikan sehingga belum bisa diukur pemanfaatannya dalam penyusunan anggaran;
 - d. Rencana aksi yang dibuat baru sampai pada tahap pemenuhan dokumen, belum ada evaluasi atas rencana aksi;
 - e. Pemanfaatan rencana aksi terbatas pada pelaporan atau dokumentasi semata.
2. Pengukuran kinerja, dengan maksimal bobot nilai 25, pada tahun 2018 Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan mendapatkan nilai 15,63. Hal yang harus diperhatikan untuk komponen ini adalah:
 - a. Mekanisme pengumpulan data kinerja yang dibuat berupa SOP hanya mengatur mekanisme penyusunan LKj;
 - b. Belum ada bukti yang cukup terkait pengumpulan data kinerja atas rencana aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester);
 - c. Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi namun belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik;
 - d. Sebagian IKU dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran;
 - e. Belum ada bukti yang cukup atas hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward dan punishment;
 - f. IKU baru di reviu setelah ada instruksi dari Sekretariat Jenderal.
3. Pelaporan kinerja, dengan maksimal bobot nilai 15, pada tahun 2018 Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan mendapatkan nilai 10,25. Hal yang harus diperhatikan untuk komponen ini adalah:
 - a. Laporan kinerja hanya menyajikan perbandingan realisasi versus target tahun yang bersangkutan;
 - b. Laporan kinerja belum menyajikan informasi terkait analisis efisiensi penggunaan sumber daya;

- c. Pemanfaatan informasi kinerja yang telah digunakan dalam perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi hanya bersifat sebagian (belum ada bukti yang cukup);
 - d. Informasi capaian kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar reward dan punishment.
4. Evaluasi kinerja, dengan maksimal bobot nilai 10, pada tahun 2018 Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan mendapatkan nilai 6,49. Hal yang harus diperhatikan untuk komponen ini adalah hasil evaluasi atas rencana aksi belum disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
 5. Capaian kinerja, dengan maksimal bobot nilai 20, pada tahun 2018 Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan mendapatkan nilai 13,63. Hal yang harus diperhatikan untuk komponen ini adalah belum ada perbandingan kinerja tahun sebelumnya.

1.1.4.3 Peningkatan hasil penilaian Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

Sebagai wujud peningkatan kualitas kinerja pegawai dan pelayanan publik Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan telah menyusun pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk seluruh unit organisasi dan unit kerja. Di samping itu, pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan aturan mengenai tata kerja yang baru, yaitu PMA 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan telah melakukan analisis jabatan yang menghasilkan peta jabatan, uraian jabatan dan informasi beban kerja.

Reformasi birokrasi dari sisi peningkatan kinerja pegawai, Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan telah membangun system Elektronik Kinerja (E-Kin) berbasis web pada tahun 2016 dimana para pegawai diwajibkan mengisi laporan kinerja harian kedalam aplikasi khusus yang dipersiapkan. Laporan kinerja tersebut di cetak tiap bulannya untuk dilaporkan keatasan langsung.

Selain itu dari sisi penguatan Reformasi Birokrasi, Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan melaksanakan pengukuhan Tim Agen Perubahan dimana merupakan implementasi dari 8 area perubahan Reformasi Birokrasi, Kemudian Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan juga melaksanakan pengukuhan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Setiap tahunnya, Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan juga melaksanakan penyelesaian hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI dimana Bagian Ortala dan Kepegawaian memfasilitasi tempat pertemuan untuk penyelesaian hasil temuan antara Satuan Kerja dengan auditor-auditor BPK atau Irjen Kementerian Agama. Berikut capaian delapan area perubahan progres pelaksanaan RB :

Tabel 1.20

Capaian Delapan Area Perubahan Progress Pelaksanaan RB Tahun 2018

#No	Area Perubahan	Nilai	Capaian	Evidence
1	Manajemen Perubahan (12%)	4.85%	40.42%	
2	Penataan Hukum dan Perundangan (5.5%)	4.7%	85.45%	
3	Penataan dan Penguatan Organisasi (4%)	2.4%	60%	
4	Penguatan Tata Laksana (16%)	6.6%	41.25%	
5	Penataan Sistem SDM Aparatur (25%)	23.38%	93.52%	
6	Penguatan Akuntabilitas (15%)	11.38%	75.87%	
7	Penguatan Pengawasan (10%)	7.5%	75%	
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (12.5%)	10.3%	82.4%	
Indeks Reformasi Birokrasi (100%)		71.1%		

Sumber : e-PokjaRB Kemenag.go.id

Dari data diatas, diketahui bahwa nilai capaian secara mandiri RB Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan pada tahun 2018 yaitu sebesar 71,1%. Dengan pencapaian optimal pada area penataan Sistem SDM Aparatur sebesar 93.52%, namun masih belum optimal pada pencapaian area Manajemen Perubahan sebesar 23,75%. Dengan demikian maka Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan perlu meningkatkan area penataan dan penguatan organisasi dan perubahan.

Tabel 1.21

Capaian Delapan Area Perubahan Progress Pelaksanaan RB Tahun 2019

# No	Area Perubahan	Nilai	Capaian	Evidence
1	Manajemen Perubahan (12%)	10.1%	84.17%	
2	Penataan Hukum dan Perundangan (5.5%)	3.6%	65.45%	
3	Penataan dan Penguatan Organisasi (4%)	3%	75%	
4	Penguatan Tata Laksana (16%)	11%	68.75%	
5	Penataan Sistem SDM Aparatur (25%)	20.7%	82.8%	
6	Penguatan Akuntabilitas (15%)	13.38%	89.2%	
7	Penguatan Pengawasan (10%)	8.55%	85.5%	
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (12.5%)	12.5%	100%	
Indeks Reformasi Birokrasi (100%)		82.83%		

Sumber : e-PokjaRB Kemenag.go.id

Dari data diatas, diketahui bahwa nilai capaian RB Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan pada tahun 2019 yang dilakukan secara mandiri berdasar perhitungan aplikasi mengalami kenaikan dari tahun 2018 yaitu sebesar 92,83%. Dengan demikian maka Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan telah konsisten dalam meningkatkan perkembangan penilaian RB pada masing-masing area perubahan.

Tabel 1.22

Rekapitulasi Perkembangan Penilaian ZI



Daftar Penilaian Zona Integritas

Show entries Search:

No.	Tahun	Penilaian	Total Komponen Proses (60%)	Total Komponen Hasil (40%)	Indeks ZI (Total)	Tahap
1	2018	Penilaian ZI	47.45	0	47.45	Tahap_2
2	2019	Penilaian ZI	52.72	33.25	85.97	Tahap_2
3	2020	Penilaian ZI	44.65	33.25	77.9	Tahap_1

Showing 1 to 3 of 3 entries

Previous **1** Next

Sumber: pmpzikemenag.go.id

Dari tabel diatas diketahui bahwa indeks ZI pada tahun 2017 masih rendah yaitu sebesar 47,45 dikarenakan data hanya terinput di Semester 1, sedangkan pada Semester 2 data belum terinput karena aplikasinya sudah close. Sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 indeks ZI pada Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan menunjukkan peningkatan secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan dalam mewujudkan Zona Integritas sudah semakin baik setiap tahunnya.

1.1.5 Meningkatnya akses layanan pendidikan

Pendidikan umum bercirikan agama, pendidikan keagamaan, dan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum adalah tiga jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Sedangkan berdasar jenjang pendidikan pendidikan terbagi menjadi anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pelaksanaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang menjadi wewenang Kementerian Agama diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat secara pribadi maupun melalui lembaga keagamaan sesuai dengan referensi agamanya masing-masing. Pelaksanaan di Kota menyesuaikan dengan jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Untuk mewujudkan keberhasilan pada tujuan bidang pendidikan adalah:

1.1.5.1 Pendidikan Agama Kristen

Peningkatan kompetensi dan kualitas guru pendidikan agama Kristen tingkat Dasar dan Menengah telah dilakukan melalui peningkatan kompetensi dan

profesionalisme guru pendidikan agama Kristen pada tahun 2015-2019 sebanyak 82 orang. Selain itu untuk meningkatkan pelayanan dan mutu guru pendidikan agama Kristen sejak pada tahun 2014 persentase guru pendidikan agama Kristen yang telah bersertifikasi sebesar 85%. Kemudian pada Tahun 2019 Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan memberikan tunjangan fungsional pada Guru Non PNS Pendidikan Agama Kristen terbatas sebanyak 51 orang.

Tabel 1.23
Data Guru Agama Kristen

NO	GURU	JUMLAH				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	PNS	84	84	83	83	82
2	NON PNS	41	41	43	43	51
	JUMLAH	125	125	127	127	133

Sumber : Penyelenggara Kristen, Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan

1.1.5.2 Pendidikan Agama Katolik

Dalam meningkatkan kualitas pendidikan Katolik selama lima tahun terakhir telah dilakukan sejumlah upaya melalui perluasan akses, peningkatan mutu dan pengembangan lembaga pendidikan agama dan keagamaan. Peningkatan mutu guru pendidikan agama Katolik terlihat dari jumlah guru pendidikan agama Katolik yang sudah dilakukan sertifikasi pada tahun 2014 sebanyak 180 orang. Selain itu peningkatan mutu guru pendidikan agama katolik terlihat pada jumlah guru pendidikan agama katolik non PNS yang menerima tunjangan fungsional baru sebatas 107 orang.

Tabel 1.24
Data Guru Agama Katolik Tahun 2015 - 2019

NO	GURU	JUMLAH				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	PNS	15	15	15	14	13
2	NON PNS	43	43	43	43	43
	JUMLAH	58	58	58	57	57

Sumber : Penyelenggara Katolik, Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan

Guru Pendidikan Agama Katolik Non PNS yang berhak menerima tunjangan profesi baik yang sudah inpassing maupun yang belum inpassing pada Tahun 2019 sebanyak 403 orang.

1.1.5.3 Pendidikan Agama Hindu

Jumlah Guru Pendidikan Agama Hindu yang PNS dari tahun 2015 hingga 2019 mengalami penurunan. Selain itu pada tahun 2015 - 2019 sebanyak 2 orang Guru Pendidikan Agama Hindu Non PNS telah bersertifikasi. Perkembangan Jumlah Guru pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 belum mengalami perkembangan sesuai tabel berikut :

Tabel 1.25

Data Guru Agama Hindu Tahun 2015 - 2019

NO	GURU	JUMLAH				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	PNS	4	4	4	4	4
2	NON PNS	1	1	1	1	1
	JUMLAH	5	5	5	5	5

Sumber: Ortala dan KUB, Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan

1.1.5.4 Pendidikan Agama Buddha

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan agama Buddha tahun 2020–2024 akan dilakukan berbagai upaya melalui pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan keagamaan. Peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan Buddha dilakukan dengan pelatihan/seminar, pemberian tunjangan/insentif bagi guru agama Buddha, bantuan sarana prasarana dan bantuan operasional lembaga pendidikan.

Jumlah Guru pendidikan agama Buddha pada tahun 2019 sebanyak 5 orang dengan rincian sebanyak 1 guru berstatus sebagai PNS dan sebanyak 4 guru berstatus Non PNS dan semua sudah tersertifikasi 100% sejak tahun 2014.

Tabel 1.26

Data Guru Agama Buddha Tahun 2015 – 2019

NO	GURU	JUMLAH				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	PNS	1	1	1	1	1
2	NON PNS	4	4	4	4	4
	JUMLAH	5	5	5	5	5

Sumber: Penyelenggara Buddha, Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan

1.1.5.5 Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Madrasah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Peningkatan dan pemerataan akses pendidikan madrasah merupakan upaya memperluas jangkauan dan meningkatkan kapasitas pendidikan madrasah pada setiap jenjang pendidikannya sehingga dapat diakses dan diikuti sebanyak mungkin masyarakat dari berbagai latar belakang. Dari berbagai program yang dijalankan dalam rangka peningkatan akses pendidikan umum bercirikan agama maupun pendidikan keagamaan, angka partisipasi masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.27

Angka Partisipasi Kasar RA, MI, MTsN dan MAN Tahun 2016 – 2019

(Dalam Persen)

Lembaga Pendidikan	2016		2017		2018		2019	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
RA	5.60	4.55	5.75	4.56	5.80	4.58	5.85	4.81
MI	13.70	13.14	13.78	13.38	13.83	13.59	14.00	13.81
MTs	15.55	8.17	15.68	8.66	15.75	9.26	16.00	9.31
MA	5.70	3.04	5.97	3.20	6.63	3.80	6.70	3.86

Sumber : Biro Pusat Statistik Tahun 2019

Dari tabel dapat dilihat bahwa pada dasarnya untuk jenjang RA, APK Kota Jakarta Selatan belum berhasil mencapai target Renstra Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan tahun 2015-2019 pada tiap tahunnya terutama pada tahun

2016-2017. Sedangkan pada jenjang MI selalu berhasil mendekati target. Untuk capaian APK pada MTS dan MAN tidak memenuhi target. Hal ini memberikan indikasi bahwa penentuan angka target APK untuk jenjang MTS dan MAN cenderung *over estimate*, sehingga dalam 4 tahun terakhir target tidak terpenuhi. Namun demikian, terdapat kecenderungan capaian APK meningkat dari tahun ke tahun. Ketidakberhasilan pencapaian target tersebut dapat mengindikasikan bahwa penambahan jumlah peserta didik belum dapat mengimbangi penambahan jumlah penduduk dalam kurun waktu tahun 2016-2019. Karena tingkat animo masyarakat masih memilih untuk bersekolah di sekolah negeri karena fasilitas yang diberikan lebih banyak dibanding Kementerian Agama, hal ini terjadi karena sumber anggaran Kemendikbud selain mendapatkan dari APBN juga ditopang oleh anggaran pemda masing-masing (APBD).

Tabel 1.28

Angka Partisipasi Murni RA, MI, MTsN dan MAN Tahun 2016 – 2019

(Dalam Persen)

Lembaga Pendidikan	2016		2017		2018		2019	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
RA	4.23	2.60	4.23	2.62	6.92	4.22	6.92	4.39
MI	10.65	14.78	11.80	14.92	11.95	13.92	12.00	14.00
MTs	12.65	8.49	12.90	8.57	13.00	7.50	13.25	7.47
MA	6.70	4.34	6.69	4.38	7.05	2.94	7.50	2.96

Sumber : Biro Pusat Statistik Tahun 2019 dan Renstra Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2015-2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada dasarnya untuk jenjang MI APM Daerah Khusus Ibukota Jakarta selalu berhasil melebihi target yang telah di tentukan pada tiap tahunnya. Untuk jenjang RA belum mencapai target yang telah ditentukan, namun terdapat kecenderungan capaian APM meningkat dari tahun ke tahun. Sedangkan untuk jenjang MTs terdapat fluktuasi capaian APM dalam 4 tahun terakhir terutama di tahun 2018 dan 2019 cenderung menurun. Demikian juga untuk APM jenjang MA. Hal ini mengindikasikan adanya kecenderungan *over estimate* dalam menetapkan angka target baik dari tingkat RA sampai MA.

Upaya Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Masyarakat pada Madrasah juga dilakukan dengan

cara pemberian bantuan untuk pengembangan lembaga pendidikan antara lain melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi MI, MTS, MA, Pendidikan Muadalah/Diniyah Formal Tingkat Ula, Wustha dan Ulya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.29
Jumlah Dana BOS Tahun 2015 - 2019

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Madrasah Ibtidaiyah	184.567.0	22.649.0	23.801.0	24.419.0	24.617.0
2	Madrasah Tsanawiyah	81.168.0	13.909.0	13.792.0	13.649.5	13.627.0
3	Madrasah Aliyah	14.153.0	4.796.4	5.245.8	5.652.5	5.761.2
4	Diniyah Tingkat Ula					
5	Diniyah Tingkat Wustha					
6	Diniyah Tingkat Ulya					

Sumber: Olah data Pendidikan Islam Kantor Kemenag Kota, 2015 – 2019

Pemberian dana BOS bagi MI, MTS, MA, Pendidikan Muadalah/Diniyah Formal Tingkat Ula, Wustha dan Ulya konsisten pada tiap tahunnya dan disesuaikan dengan jumlah siswa yang masuk pada tahun tersebut dengan standarisasi satuan tiap anak sesuai dengan ketentuan dari BAPPENAS. Anggaran untuk BOS pada tingkat Ulya dimulai pada tahun 2016 dan berlanjut hingga kini. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan melalui lembaga pendidikan yang dimilikinya telah membuka akses pendidikan bagi masyarakat sesuai jenjang usia. Selain melalui dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), Pemerintah juga mengupayakan peningkatan akses pendidikan madrasah serta memperluas jangkauan pada setiap jenjang pendidikan dari berbagai latar belakang kehidupan masyarakat melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.30

Program Indonesia Pintar 2015 – 2019

NO	NAMA LEMBAGA	JUMLAH PENERIMA PROGRAM INDONESIA PINTAR				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	MIN	1.555	6.836	6.091	5.786	5.497
2	MTsN	2.913	3.299	2.629	2.498	2.373
3	MAN	1.392	1.509	1.221	1.151	1.093
4	MIS	5.194	4.068	1.867	6.804	8.120
5	MTsS	1.035	4.775	642	4.530	4.492
6	MAS	1.065	3.225	351	1.584	1.132
	Jumlah	13.154	23.712	12.801	22.353	22.707

Sumber : EMIS 2015 – 2019

Peningkatan akses pendidikan melalui bantuan-bantuan yang disalurkan seperti BOS dan PIP oleh pemerintah melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyebabkan jumlah peserta didik mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut berkisar sekitar 97% tiap tahunnya atau mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan akses pendidikan berdampak pada mutu pendidikan umum bercirikan agama yang menunjukkan bahwa animo masyarakat terhadap lembaga pendidikan tersebut semakin tinggi. Berikut rincian jumlah siswa RA, MI negeri/swasta, MTsN negeri/swasta, MAN negeri/swasta dari tahun 2015 s.d 2019 sebagai berikut :

Tabel 1.31

Jumlah Siswa Tahun 2015 - 2019

NO	NAMA LEMBAGA	JUMLAH SISWA				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	RA	11.317	10.979	11.230	11.294	10.889
2	MIN	3.108	3.228	3.240	3.240	2.618
3	MTsN	5.462	4.678	5.642	5.642	5.802
4	MAN	3.375	2.928	3.892	3.892	3.939
5	MIS	26.819	28.513	29.219	29.219	30.785
6	MTsS	13.960	13.960	13.754	13.754	13.717
7	MAS	3.009	3.444	3.834	3.834	4.117
	JUMLAH	67.050	67.730	70.811	70.875	71.867

Sumber : EMIS 2015 – 2019

1.1.5.6 Peningkatan Akses Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

Pendidikan diniyah dan pondok pesantren merupakan lembaga swadaya masyarakat yang tidak hanya menyelenggarakan layanan Pendidikan semata tetapi juga pemberdayaan masyarakat dan pusat keagamaan Islam. Termasuk dalam layanan pendidikan keagamaan Islam adalah layanan pendidikan Al-Qur'an.

Tabel 1.32

**Rekapitulasi Data Madrasah Diniyah Kota Jakarta Selatan
Tahun 2019**

No.	Kota / Kabupaten	Jumlah Madrasah Diniyah	Jumlah Santri Madrasah Diniyah		
			Lk.	Pr.	Jumlah
1	Jagakarsa	7	135	150	285
2	Kebayoran Lama	6	228	246	474
3	Tebet	9	160	168	328
4	Pasar Minggu	11	195	205	400
5	Setia Budi	3	126	136	262
6	Pancoran	4	113	147	260
7	Cilandak	6	278	242	520
8	Kebayoran Baru	0	0	0	0
9	Pesanggrahan	4	99	73	172
10	Mampang	0	0	0	0
Jumlah		50	1334	1367	2701

Sumber : EMIS 2015 – 2019

Dari data diatas dapat dilihat bahwa setiap kota di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki jumlah madrasah diniyah yang tidak sedikit dengan jumlah santri yang cukup banyak dan jumlah santri di dominasi oleh perempuan pada tahun 2019. Sehingga dapat dilihat bahwa sudah banyak masyarakat yang menjadikan madrasah sebagai tempat putra – putrinya untuk mendalami ilmu agama dengan baik.

Sedangkan pada lembaga TPQ di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta hambatannya adalah sulitnya membuat kurikulum bersama untuk melakukan Ujian Munaqosah Bersama karena di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini lembaga TPQ terbagi kedalam 4 wadah binaan, yaitu Pokja TPQ, Riayatul Ummah, LPPTKA dan Cahaya Madani yang mereka focus membesarkan wadah binaannya masing-

masing. Menyikapi permasalahan tersebut, Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan telah melakukan upaya membentuk Forum Komunikasi Pendidikan Al-Qur'an (FKPQ) yang keanggotaan dan kepengurusannya dari keempat lembaga tersebut yang mempunyai tugas menyusun program bersama berskala dari tingkat kota hingga pusat, namun demikian forum ini masih kurang efektif karena tidak didukung oleh anggaran pemerintah. Berikut jumlah TPQ dari tahun 2015 – 2019 per kota/kabupaten:

Tabel 1.33
Rekapitulasi Lembaga TPQ Kota Jakarta Selatan
Tahun 2015 - 2019

No	Kota/ Kabupaten	Jumlah Lembaga TPQ				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jagakarsa	52	57	57	59	63
2	Kebayoran Lama	10	10	11	11	13
3	Tebet	9	9	17	17	17
4	Pasar Minggu	16	18	15	16	16
5	Setia Budi	14	15	15	16	17
6	Pancoran	17	17	18	19	23
7	Cilandak	6	6	6	6	6
8	Kebayoran Baru	8	8	8	8	8
9	Pesanggrahan	11	11	14	13	9
10	Mampang	13	13	14	15	17
	Jumlah	1292	1500	1250	1249	1450

Sumber: EMIS 2015 – 2019

Selain Lembaga TPQ, ada juga Lembaga salafiyah Ula dan Wustha dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.34
Jumlah Santri Pada Ula, Wustha dan Ulya Tahun 2019

No.	Kota / Kabupaten	Salafiyah Ula		Salafiyah Wustha		Salafiyah Ulya	
		Jumlah Lembaga	Jumlah Santri	Jumlah Lembaga	Jumlah Santri	Jumlah Lembaga	Jumlah Santri

			Lk.	Pr.		Lk.	Pr.		Lk.	Pr.
1	Jakarta Pusat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Jakarta Utara	1	22	5	1	3	6	1	2	3
3	Jakarta Timur	5	94	60	8	203	54	9	212	172
4	Jakarta Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Jakarta Barat	1	3	0	10	3	1	1	10	1
6	Kepulauan Seribu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		7	119	65	18	209	61	11	224	176

Sumber : EMIS 2015 - 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tidak semua kota/kabupaten di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki Lembaga ula, wustha dan ulya. Akan tetapi jumlah santri pada tahun 2019 cukup banyak dan didominasi oleh santri laki-laki. Dari jumlah santri tersebut dapat dilihat juga Angka Partisipasi Kasar (APK) dari tahun 2015 – 2019. Berikut rincian datanya:

Tabel 1.35
Angka Partisipasi Kasar Ula, Wustha dan Ulya Tahun 2016 – 2019
(Dalam Persen)

Lembaga Pendidikan	2016		2017		2018		2019	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Ula	0.02	2.73	0.02	0.03	0.02	0.17	0.02	0.17
Wustha	0.05	1.87	0.05	1.84	0.05	1.93	0.05	0.72
Ulya	0.21	1.02	0.21	1.24	0.21	2.26	0.21	0.75

Sumber : Biro Pusat Statistik, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa APK secara keseluruhan untuk jenjang Ula, Wustha dan Ulya APK Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah mencapai target lebih dari yang sudah ditentukan tiap tahunnya. Walaupun angka pencapaiannya bersifat fluktuatif. Ini mengindikasikan bahwa penambahan maupun penurunan jumlah peserta didik belum dapat mengimbangi penambahan jumlah penduduk pada jenjang usia Ula, Wustha maupun Ulya dalam kurun waktu tahun 2018- 2019.

Tabel 1.36

**Angka Partisipasi Murni Ula, Wustha dan Ulya Tahun 2016 – 2019
(Dalam Persen)**

Lembaga Pendidikan	2016		2017		2018		2019	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Ula	0.02	2.73	0.02	0.03	0.02	0.13	0.02	0.16
Wustha	0.05	1.87	0.05	1.84	0.05	0.62	0.05	0.72
Ulya	0.21	1.02	0.21	1.24	0.21	2.26	0.38	0.75

Sumber : Biro Pusat Statistik, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa APM untuk jenjang Ula, Wustha dan Ulya APK Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah mencapai target lebih dari yang sudah ditentukan tiap tahunnya. Untuk Ula pencapaian mengalami penurunan dan mulai di tahun 2018 mengalami peningkatan, pada Wustha terjadi penurunan masif di tahun 2018. Sedangkan pada ulya mengalami kenaikan signifikan di tahun 2018. Jika dilihat secara keseluruhan APM di Kota Jakarta Selatan telah mencapai target pada tiap tahunnya.

Pondok Pesantren telah memberikan kontribusi yang luar biasa dalam memberikan layanan pendidikan keagamaan Islam. Jumlah Pesantren di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 sebanyak 20 lembaga dengan jumlah santri sebanyak 4.957 santri. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.37

Jumlah Pondok Pesantren dan Jumlah Santri Kota Jakarta Selatan Tahun 2015-2019

No	Wilayah	2015		2016		2017		2018		2019	
		Jumlah Pondok Pesantren	Jumlah Santri								
1	Jagakarsa	6	1917	6	2199	7	2341	9	3641	9	3670
2	Kebayoran Lama	1	144	1	179	1	201	1	175	1	192
3	Tebet	2	35	2	48	3	88	3	165	3	171
4	Pasar Minggu	0	0	0	0	1	58	1	65	1	77
5	Setiabudi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Pancoran	1	97	1	104	1	101	1	101	1	104
7	Cilandak	3	680	3	714	3	679	3	673	3	683
8	Kebayoran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Baru										
9	Pesanggrahan	1	70	1	75	1	70	1	65	1	60
10	Mampang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	14	2.943	14	3.319	19	3.538	19	4.885	20	4.957

Sumber : EMIS 2015 - 2019

Adapun tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan Pondok Pesantren di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah :

1. Kondisi lahan yang terbatas;
2. Harga tanah yang mahal;
3. Diperlukan modal yang besar untuk membangun Pondok Pesantren.

Adanya pondok pesantren juga di dukung oleh staf pengajar dengan jumlah yang tidak sedikit dan memiliki kualitas yang baik. Berikut jumlah tenaga pengajar pondok pesantren di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta:

Tabel 1.38

**Jumlah Tenaga Pengajar Pondok Pesantren Kota Jakarta Selatan
Tahun 2019**

Pengajar	Keb. Lama	Pesanggrahan	Cilandak	Psr. Minggu	Mampang	Pancoran	Setiabudi	TEbet	Keb. Baru	Jagakarsa	Jumlah
Kiai/Ustaz	20	11	40	12	0	20	1524	23	0	321	447

Sumber : EMIS 2019

1.1.6 Meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan, Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan selalu melakukan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran. Peningkatan mutu dapat ditandai dengan indikator sebagai berikut :

1. Rerata nilai ujian sekolah MTs;
2. Rerata nilai ujian sekolah MA;
3. Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) MTsN;
4. Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) MAN IPA;
5. Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) MAN IPS;
6. Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) MAN BAHASA.

Kebijakan Kementerian Agama tahun 2015–2019 diarahkan pada peningkatan kualitas. Adapun pencapaian dari peningkatan kualitas tersebut adalah

dengan menyediakan layanan PAI pada sekolah, peningkatan mutu layanan PAI pada sekolah serta peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama peserta didik. Strategi pencapaian yang digunakan antara lain melalui penyediaan dan pengembangan sarana prasarana PAI pada sekolah, pembentukan dan peningkatan kapasitas Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PAI dan pemberdayaan Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Pendidikan Agama Islam, peningkatan mutu kurikulum dan bahan ajar PAI, pengembangan standar model PAI pada sekolah serta peningkatan partisipasi dan kemitraan sekolah, masyarakat dan pihak terkait lainnya.

Program lain terkait dengan pendidikan agama Islam pada sekolah adalah peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik dan pengawas PAI. Pencapaian tersebut adalah dengan meningkatnya profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan agama Islam, meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan agama Islam. Adapun strategi yang digunakan antara lain melalui peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan agama Islam, penyediaan beasiswa dan bantuan pendidikan lainnya bagi guru, peningkatan wawasan guru melalui program pertukaran guru PAI, penyediaan subsidi tunjangan fungsional bagi guru PAI Non PNS dan penyediaan tunjangan profesi bagi guru PAI. Selain itu peningkatan pelayanan Guru PAI pada sekolah umum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan melanjutkan pembayaran TPG Non PNS, mengusulkan pengangkatan Guru Agama Islam dan mengusulkan calon peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) melalui Direktorat Pendidikan Agama Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama.

Selain itu terdapat pula data jumlah Guru PAI yang telah bersertifikasi dari tahun 2015 – 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.39

Jumlah Guru PAI Berdasarkan Sertifikasi

NO	GURU PAI	TAHUN 2015			TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
		BLM	SDH	JML	BLM	SDH	BLM	BLM	SDH	JML	BLM	SDH	JML	BLM	SDH	JML
1	Jakarta Selatan	540	788	1328	545	797	587	557	814	1371	587	587	1444	655	260	915

Sumber: Seksi PAIS, Kantor Kemenag 2015-2019

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Guru PAI yang sudah tersertifikasi pada tahun 2015 hingga 2018 mengalami peningkatan, sedangkan di

tahun 2019 perbandingan antara guru yang tersertifikasi dan yang belum tersertifikasi cukup jauh dimana sebanyak 655 orang belum tersertifikasi dan 260 orang sudah tersertifikasi. Hal ini diakibatkan ketentuan sertifikasi Guru jauh lebih berkompentensi dibandingkan tahun – tahun sebelumnya.

Di samping itu terdapat kegiatan penunjang kesiswaan yang mampu meningkatkan mutu para siswa – siswa antara lain:

1. Pentas PAI (SD, SMP, SMA/SMK) Tingkat Kota/Kab.Provinsi dan Nasional;
2. ROHIS (SMA/SMK) Tingkat Kota/Kab. Provinsi dan Nasional;
3. Kegiatan Islam Rahmatan Lil Alamin bagi siswa SMA dan SMK;
4. Kegiatan Pesantren Kilat SD, SMP, SMA/SMK dan membangun kemitraan dengan GPAI melalui Forum Komunikasi Guru TK (FKGTK), KKG PAI SD, MGMP PAI SMP dan SMA/SMK.

Pendidikan Madrasah adalah garda terdepan untuk membentuk kualitas siswa yang berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Disamping itu membangun karakter peserta didik yang berakhlakul karimah. Guna mewujudkan hal tersebut Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan menyusun inovasi dalam meningkatkan mutu kualitas pendidikan madrasah yaitu meningkatkan kualitas, baik pada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang semakin profesional serta memperbaiki sarana prasarana sehingga melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas tidak kalah dengan lulusan sekolah dibawah pengelolaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Program unggulan Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan tahun 2018-2019 antara lain adalah :

1. Perbaikan mutu kualitas pelayanan terhadap madrasah didalam bidang pendidikan madrasah dengan melaksanakan ISO 9001 tahun 2015 tentang Mutu Pelayanan, Digitalisasi tata persuratan, dan PPDB Online;
2. Menjalni kerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta guna meningkatkan mutu kualitas madrasah berupa bantuan hibah Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2018, didalam pengelolaan hibah tersebut kedua belah pihak mencanangkan peningkatan kualitas dan pengembangan Madrasah Negeri antara lain Ujian Kompetensi Guru, Pelatihan Kompetensi Guru, Tenaga kependidikan dan Siswa, perbaikan sarana dan prasarana *Information and Communication Technologies* dimana madrasah harus punya Perpustakaan Digital dan *I-Board Optical Interactive Whiteboard* terutama Madrasah Aliyah Negeri;

3. Melaksanakan pemetaan potensi siswa dalam rangka bersaing dalam ajang Kompetensi Sains Madrasah yang akan dilaksanakan dalam tingkat nasional dengan mengadakan lomba tingkat kota ataupun provinsi;
4. Melaksanakan Mandatory Prioritas Kementerian Agama Tahun 2018 antara lain Implementasi 8 Area Perubahan, Program Ngopi (Ngobrol Pendidikan Islam), Bina Kawasan dan Guru Kunjung, Mengaji (Mengasah Jati Diri Indonesia), dan E-Government.

Bidang pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan dengan empat langkah inovasi tersebut diatas diharap mampu menjawab tantangan slogan Madrasah Hebat Madrasah Bermartabat.

Peningkatan mutu pendidikan ditandai dengan perbaikan dalam sarana dan prasarana madrasah. Selain dari sarana dan prasarana yang dilakukan perbaikan, sertifikasi guru juga mutlak diperlukan. Berdasarkan data EMIS Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, data guru yang bersertifikat dibedakan menjadi 4 (empat) kategori antara lain jumlah guru PNS yang bersertifikat, jumlah guru PNS yang belum bersertifikat, jumlah guru Non PNS yang bersertifikat dan jumlah guru Non PNS yang belum bersertifikat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.40

Guru PNS Sudah Sertifikasi Tahun 2015 – 2019

NO	TEMPAT MENGAJAR	TAHUN					TOTAL
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	RA	27	29	34	33	33	156
2	MIN	112	98	144	143	141	638
3	MTs.N	241	179	264	268	272	1224
4	MAN	175	159	118	191	190	833
5	MIS	216	221	251	240	235	1163
6	MTs.S.	270	227	227	263	234	1221
7	MAS	76	59	76	67	59	337
Jumlah		1117	972	1234	1205	1164	5692

Sumber : Pendidikan Madrasah, Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan

Tabel 1.41

Guru PNS Belum Sertifikasi Tahun 2015 – 2019

NO	TEMPAT Mengajar	TAHUN					TOTAL
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	RA	13	8	4	4	3	32
2	MIN	34	53	6	3	21	117
3	MTsN	34	94	7	7	23	165
4	MAN	26	32	13	10	21	102
5	MIS	73	49	16	13	2	153
6	MTsS	52	82	16	12	10	172
7	MAS	14	29	3	2	2	50
Jumlah		246	347	65	51	82	791

Sumber: Bidang Pendidikan Madrasah, Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan

Tabel 1.42

Guru Non PNS Sudah Sertifikasi Tahun 2015 – 2019

NO	Tempat Mengajar	TAHUN					TOTAL
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	RA	263	493	482	479	485	2202
2	MIN	9	11	11	11	15	57
3	MTsN	17	18	25	24	24	108
4	MAN	10	16	14	14	15	69
5	MIS	537	730	746	762	751	3526
6	MTsS	265	250	285	284	274	1358
7	MAS	109	70	74	67	61	381
Jumlah		1210	1588	1637	1641	1625	7701

Sumber: Seksi Pendidikan Madrasah, Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan

Tabel 1.43

Guru Non PNS Belum Sertifikasi Tahun 2015 – 2019

NO	TEMPAT MENGAJAR	TAHUN					TOTAL
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	RA	13	8	4	4	3	32
2	MIN	34	53	6	3	21	117
3	MTsN	73	49	16	13	2	153

4	MAN	34	94	7	7	23	165
5	MIS	52	82	16	12	10	172
6	MTsS	26	32	13	10	21	102
7	MAS	14	29	3	2	2	50
Jumlah		246	347	65	51	82	791

Sumber: Seksi Pendidikan Madrasah, Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa Guru PNS yang sudah bersertifikasi jumlah lebih sedikit dibandingkan Guru PNS yang sudah tersertifikasi dan untuk jumlah Guru Non PNS yang belum tersertifikasi masih 791 orang. Sehingga dibutuhkan suatu kebijakan yang mempermudah Guru untuk memperoleh sertifikasinya.

Hasil Ujian Nasional menjadi salah satu tolak ukur mutu madrasah dan digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk pemetaan mutu satuan dan atau program pendidikan, dasar seleksi masuk jenjang berikutnya, penentu kelulusan peserta didik dari program dan atau satuan pendidikan dan pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Pada Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan jumlah siswa peserta ujian nasional berbanding lurus dengan jumlah siswa lulus ujian nasional. Selain itu nilai rata-rata ujian nasional mengalami fluktuasi naik turun pada MI, MTs dan MA dari tahun 2015 sampai dengan 2019 rincian sebagai berikut:

Tabel 1.44

Siswa Peserta Ujian Nasional Tahun 2015 - 2019

NO	NAMA	JUMLAH SISWA PESERTA UJIAN NASIONAL				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	MI	12.355	13.804	14.118	14.816	18.515
2	MTS	20.137	20.595	20.788	21.171	20.531
3	MA	5.765	6.808	7.094	7.641	8.131
JUMLAH		38.257	41.207	42.000	43.628	47.177

Sumber : Bidang Pendidikan Madrasah, Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan

Tabel 1.45

Siswa Lulus Ujian Nasional Tahun 2015 - 2019

NO	NAMA	JUMLAH SISWA LULUS UJIAN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	MI	12.355	13.804	14.118	14.816	18.515
2	MTS	20.137	20.595	20.788	21.171	20.531
3	MA	5.765	6.808	7.094	7.641	8.131
JUMLAH		38.257	41.207	42.000	43.628	47.177

Sumber : Bidang Pendidikan Madrasah, Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan

Tabel 1.46

Nilai Rata-Rata Ujian Nasional Tahun 2015 – 2019

No	Lembaga Pendidikan	JUMLAH RATA-RATA NILAI UJIAN									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	MTs/Wustha	50.75	69.27	50.77	53.09	50.78	49.56	50.80	50.78	50.82	53.15
2	MA/ Ulya	55.85	62.17	55.95	54.32	56.61	55.98	56.06	56.01	56.15	57.02

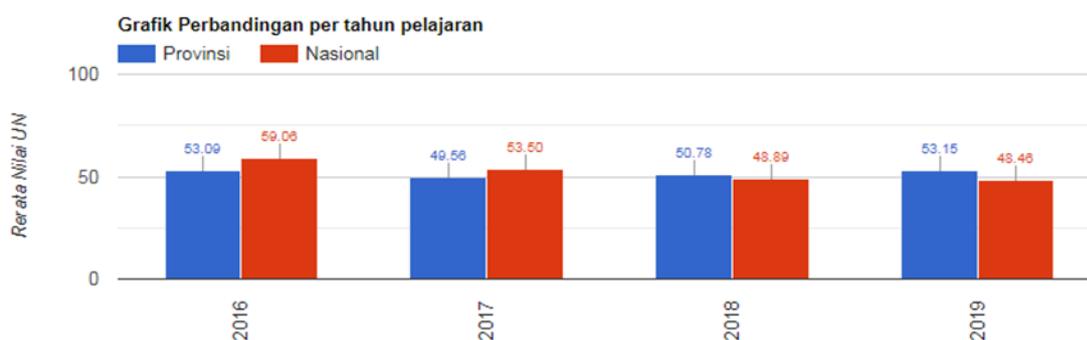
Sumber : Seksi Pendidikan Madrasah

Hasil nilai rerata ujian Nasional tahun 2015-2019 mengalami variasi, pada tahun 2015 dan 2016 hasil ujian nasional pada MTs dan MA melebihi target pada renstra Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan, namun pada tahun 2017 dan 2018 hasil rerata ujian pada MTs dan MA tidak mencapai target karena pada tahun 2017 ujian nasional mulai diberlakukan system ujian berbasis komputer dengan nilai passing grade yang tinggi sehingga siswa harus beradaptasi dengan sistem yang baru. Pada tahun 2018 tingkat kesulitan materi ujian nasional dinaikkan lagi, sehingga terjadi kesulitan pada siswa. Kondisi tersebut menyebabkan turunnya nilai rata-rata ujian siswa madrasah menurun. Pada tahun 2019 hasil nilai ujian Nasional kembali melebihi target renstra karena siswa dan sekolah sudah dapat beradaptasi dengan system ujian yang baru. Secara umum kemampuan akademik siswa dalam menyelesaikan soal yang berhubungan dengan logika masih rendah, hal tersebut berimbas pada rendahnya kemampuan guru dalam menyampaikan untuk dapat dipahami siswa. Sehingga perlu ditingkatkan kemampuan guru dalam menyampaikan materi ajar agar mudah dipahami oleh siswa.

Aspek lain yang menjadi indikator peningkatan mutu agama dan keagamaan adalah indeks integritas siswa. Ada beberapa aspek yang diteliti dan diukur untuk menghasilkan indeks integritas siswa, antara lain; kejujuran, dapat dipercaya, tanggung jawab, adil dan menjaga kehormatan. Dari ke lima aspek tersebut, kondisi yang ada pada siswa madrasah di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah sebagai berikut:

Grafik 1.1

Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) MTsN



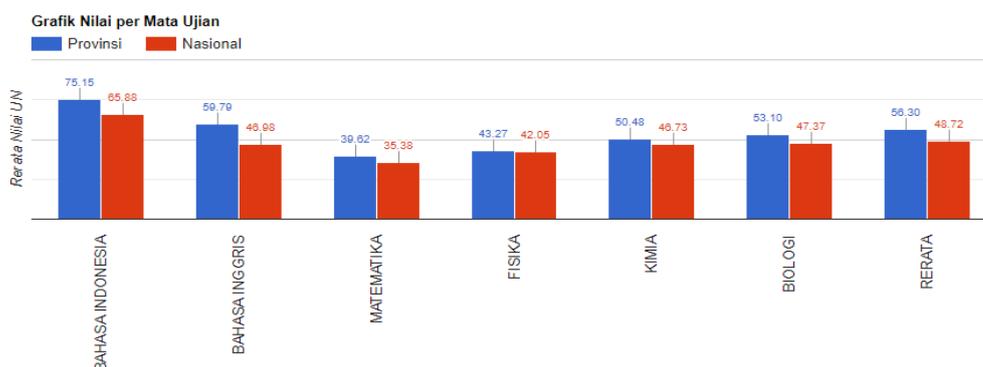
Sumber : Pusat Penilaian Pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 target pada Renstra Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan dengan nilai 79,38 sedangkan capaian sebesar 53,09 mendekati capaian nasional dengan angka 59,06 maka dengan hal ini bias disimpulkan bahwa target Renstra terlalu tinggi dari pada capaian nasional. Pada tahun 2018 dan 2019, angka rerata nilai ujian nasional di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta lebih tinggi dibandingkan dengan rerata nilai ujian nasional tingkat nasional, sehingga dapat diketahui bahwa indeks integritas ujian nasional mengalami kenaikan dan hal ini perlu dipertahankan pada tahun-tahun yang akan datang.

Grafik 1.2

Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) MAN IPA

Tahun Ajaran 2018/2019



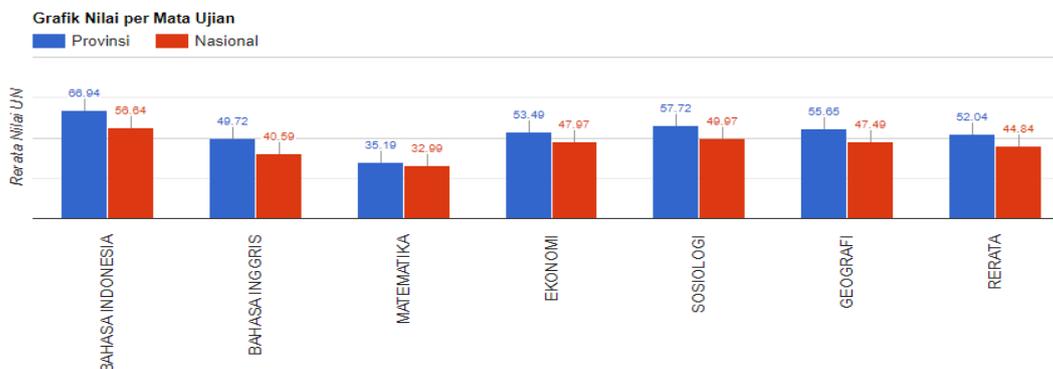
Sumber : Pusat Penilaian Pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dari grafik diatas, dapat diketahui bahwa rerata nilai ujian nasional MAN program studi IPA di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tahun 2019 berada diatas rerata nilai ujian nasional tingkat nasional, hal ini menandakan bahwa indeks integritas MAN pada program studi IPA berkategori tinggi dan perlu adanya konsistensi dalam mempertahankan indeks tersebut.

Grafik 1.3

Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) MAN IPS

Tahun Ajaran 2018/2019



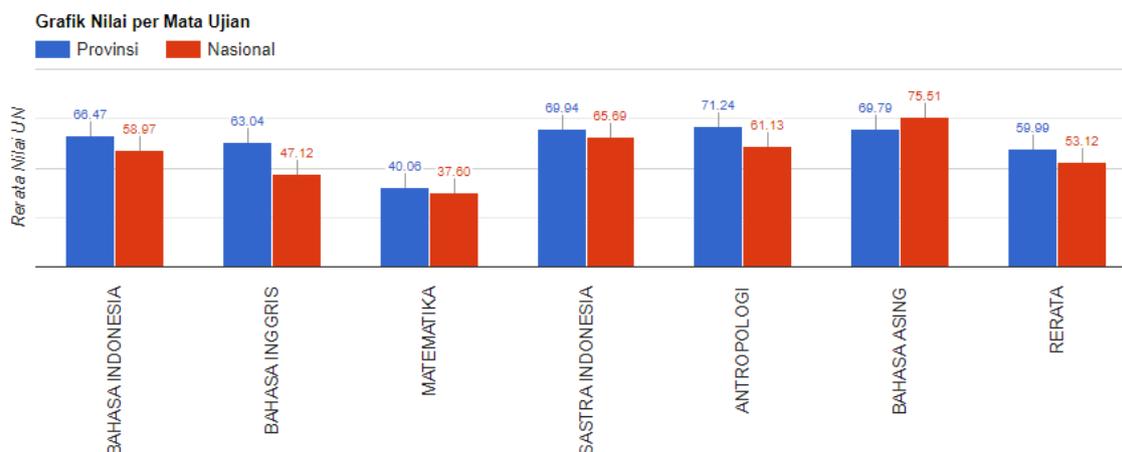
Sumber : Pusat Penilaian Pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Selain program studi IPA yang memiliki indeks integritas baik, program studi IPS pun juga memiliki indeks integritas baik dilihat dari rerata nilai ujian nasional MAN program studi IPS pada tahun 2019 di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang lebih tinggi dibandingkan rerata nilai ujian nasional pada tingkat nasional.

Grafik 1.4

Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) MAN BAHASA

Tahun Ajaran 2018/2019



Sumber : Pusat Penilaian Pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dilihat dari grafik 1.4 diatas, MAN dengan program studi Bahasa memiliki indeks integritas baik dilihat dari rerata nilai ujian nasional MAN program studi Bahasa pada tahun 2019 di wilayah Kota Jakarta Selatan yang lebih tinggi dibandingkan rerata nilai ujian nasional pada tingkat nasional. Namun pada pelajaran bahasa asing terlihat bahwa rerata nilai ujian siswa berada dibawah rerata nilai ujian tingkat nasional, hal ini perlu menjadi evaluasi untuk tahun-tahun kedepannya agar siswa dapat meningkatkan minat dan kemampuannya dalam mata pelajaran bahasa asing.

Bukti nyata dari adanya peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan dapat dilihat dari sejumlah prestasi yang dihasilkan oleh sekolah tersebut. Salah satu nya yaitu prestasi Madrasah selama tahun 2015–2019 di peroleh melalui banyak lomba, kontingen Kota Jakarta Selatan aktif mengikuti berbagai event nasional yang diadakan oleh Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama. Berikut foto – foto kejuaraan di bidang Pendidikan:

Gambar 1.

Kompetisi Sains Madrasah Dan Aksioma Tahun 2015



Sumber: Seksi Pendidikan Madrasah, Kantor Kemenag Kota Jakarta Selatan

Gambar 1.6
Kompetisi Sains Madrasah Tahun 2019



Sumber : Seksi Pendidikan Madrasah, Kantor Kemenag Kota Jakarta Selatan

Sehubungan dengan peningkatan mutu madrasah sebagai lembaga yang memberikan layanan pendidikan, upaya yang telah dilakukan adalah memberikan bantuan upgrading akreditasi madrasah kepada madrasah-madrasah yang belum atau tidak terakreditasi untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada madrasah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan. Adapun kendala madrasah terutama swasta tidak melaksanakan akreditasi antara lain mempunyai asumsi salah bahwa

akreditasi dianggap berbayar padahal gratis, standar sarana madrasah swasta dibawah 60%, kendala tingkat pendidikan tenaga pendidik dan Tenaga kependidikan yang belum S1 dan tidak linier. Sebenarnya berdasarkan PMA No 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PMA No 90 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Madrasah, pemberian izin operasional tidak mewajibkan minimal luas lahan, minimal strandar sarana sehingga mudah mengajukan uji akreditasi. Berikut ini adalah data madrasah yang sudah terakreditasi dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mulai dari tingkat RA sampai dengan MA selama lima tahun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.47

Lembaga Pendidikan Terakreditasi Tahun 2015 - 2019

NO	TINGKAT MADRASAH	STATUS AKREDITASI TAHUN 2015-2019														
		2015			2016			2017			2018			2019		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
1	RA	0	0	0	0	4	0	1	3	0	5	19	0	10	13	3
2	MI	31	16	1	3	10	0	7	4	2	27	20	2	9	7	1
3	MTS	8	4	0	2	14	0	1	0	0	2	1	1	20	12	0
4	MA	5	3	1	4	0	0	0	0	0	1	0	0	9	2	0
	JUMLAH	44	23	2	9	28	0	9	7	2	35	40	3	48	34	4

Sumber: Seksi Pendidikan Madrasah, Kantor Kemenag Kota Jakarta Selatan

1.2 Potensi dan Permasalahan

Mempertimbangkan berbagai kondisi objektif dan hasil capaian program pembangunan bidang agama dan pendidikan periode 2015-2019 serta tantangan pada periode 2020-2024, maka diperlukan identifikasi yang cermat terhadap potensi dan permasalahan sebagai salah satu masukan penting bagi perumusan kebijakan dan penetapan strategi pembangunan bidang agama lima tahun mendatang, yakni periode 2020-2024.

Potensi dan permasalahan akan ditelaah berdasarkan lima isu sasaran strategis yang menjadi focus pembangunan bidang agama dan pendidikan. Telaah tersebut mempertimbangkan sejumlah factor penting yang ditengarai akan mempengaruhi pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan khususnya pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

1.2.1 Peningkatan kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan

Sejumlah potensi dan permasalahan yang dapat mempengaruhi peningkatan kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan, antara lain:

POTENSI	PERMASALAHAN
1. Peran yang telah dilakukan oleh penyuluh agama sebagai ujung tombak dalam peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama cukup efektif sehingga menjadi modal yang luar biasa selama ini	1. Metode penyuluhan yang dilakukan selama ini masih konvensional, mengandalkan pertemuan tatap muka yang membatasi cakupan kelompok sasaran penyuluhan yang mudah dijangkau
2. Pembinaan kesalehan sosial di lingkungan keluarga terbukti memberi pengaruh yang tinggi, sehingga perlu pelestarian tradisi yang dicontohkan oleh kedua orang tua terhadap anak-anak sejak dini, seperti ibadah, literasi kitab suci dan silaturahmi antarsesama	2. Arah pembinaan masih fokus pada ritual keagamaan. Materi penyuluhan kesalehan sosial belum banyak menjadi fokus penyuluhan agama
3. Selain penyuluh agama, penyebaran pesan-pesan keagamaan oleh para tokoh agama, rohaniawan, dan tokoh-tokoh masyarakat memberikan kontribusi yang berarti. Kondisi faktual ini dapat menjadi alternatif dalam mengatasi kekurangan jumlah penyuluh agama.	3. Belum adanya sistem pengendalian dan <i>monitoring</i> dalam penyiaran pesan-pesan keagamaan sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat diatasi sejak dini.
4. Kegiatan keagamaan meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Perhatian Pemerintah sangat tinggi dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan ditunjukkan pada penyelenggaraan kegiatan keagamaan yang dilakukan dalam skala regional dan nasional	4. Adanya kegiatan keagamaan yang kadang-kadang disalahgunakan untuk kepentingan lain termasuk kepentingan politik. Kegiatan keagamaan yang melibatkan umat secara masal yang kurang terkendali dapat menimbulkan konflik atau kerusakan tatanan sosial

1.2.2 Peningkatan harmoni sosial dan kerukunan umat beragama

Sejumlah potensi dan permasalahan yang dapat mempengaruhi peningkatan harmonisasi sosial dan kerukunan umat beragama, antara lain:

POTENSI	PERMASALAHAN
1. Sudah adanya dasar hukum pada tingkat implementasi dalam bentuk Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Perberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat	1. Karakteristik masyarakat Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bersifat multikultural, berpotensi memunculkan permasalahan yang disebabkan oleh gesekan yang berlatar belakang SARA dan wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan etalase Provinsi lain di Indonesia termasuk dalam hal kondusifitas harmonisasi sosial dan kerukunan umat beragama
2. Telah dibentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di pusat dan daerah, desas sadar kerukunan, yang didukung dengan kerja sama nasional. FKUB telah berhasil menciptakan kerukunan umat beragama melalui perannya dalam pengembang toleransi beragama (promosi), pemberian advokasi, penasehat dan pembimbing toleransi (konsultasi), serta penengah yang adil dan bijaksana (arbitrasi)	2. Peran FKUB tidak boleh hanya lebih fokus kepada penyelesaian konflik, sementara cakupan moderasi beragama lebih luas
3. Dalam penyebaran pesan-pesan keagamaan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, FKUB secara aktif memberikan kontribusi dengan salah satunya menerbitkan buku "Suara Wartawan Dalam Perhelatan Kerukunan Beragama" Tahun 2016	3. Dalam era kemajuan teknologi dan informasi, sangat cepat sekali penyampaian pesan-pesan keagamaan kepada masyarakat tetapi fungsi control terhadap penyampaian pesan-pesan tersebut masih terdapat jeda waktu sehingga dapat berakibat

	menjadi turbulensi dalam harmonisasi sosial dan kerukunan umat beragama
--	---

1.2.3 Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan

Sejumlah potensi dan permasalahan yang dapat mempengaruhi peningkatan kualitas pelayanan keagamaan, antara lain:

POTENSI	PERMASALAHAN
1. Kebiasaan membaca kitab suci menjadi modal masyarakat untuk memperoleh layanan kehidupan keagamaan secara kontinu. Penyediaan kitab suci sudah dilakukan melalui distribusi kitab suci dan buku keagamaan untuk seluruh agama dan segenap lapisan masyarakat yang membutuhkan	1. Belum menemukan alat ukur dalam hubungan antara penduduk yang membaca kitab suci dan yang tidak membaca kitab suci yang sudah difasilitasi oleh negara tetapi dalam hal tersebut tentunya negara telah hadir dalam peningkatan kualitas pelayanan keagamaan dengan pendistribusian kitab suci tersebut
2. Rumah ibadah sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah. Fungsi rumah ibadah disamping sebagai tempat peribadahan memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jemaahnya, agar kehidupan spiritual keberagaman bagi pemeluk agama tersebut menjadi lebih baik	2. Pembinaan kepada pengelola rumah ibadah belum maksimal dilakukan
3. Pelayanan kehidupan beragama menjadi bagian dari pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah sampai tingkat kecamatan dan berkelanjutan. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan di tingkat kecamatan, telah tersedia 44 KUA di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pelayanan keagamaan pada KUA sebagian besar berkaitan dengan pencatatan nikah disamping tugas lainnya	3. Anggaran pendukung operasional KUA Kecamatan terutamapemeliharaanperkantoranbelum optimal karena tanah dan Gedung KUA aset BMN bukan milik Kementerian Agama tetapi milik Pemda dan hanya ada 5 (lima) yang milik Kementerian Agama yakni KUA Kemayoran, KUA Kepulauan Seribu, KUA Mampang, KUA Billymoon dan

	KUA Menteng.
4. Pelaksanaan kursus calon pengantin atau Bimbingan Perkawinan telah dilakukan bekerja sama dengan puskesmas, KPPA, dan lembaga lainnya untuk meningkatkan jangkauan sasaran layanan yang diberikan	4. Terbatasnya jumlah fasilitator (yang bersertifikat) dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan dan sebagian besar peserta kesulitan dalam mendapatkan izin 2 (dua) hari kerja dari tempat kerja
5. Pelayanan bimbingan keluarga telah terintegrasi dengan semua layanan yang ada	5. Bimbingan keluarga belum efektif dalam membentuk keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera (sakinah), karena jangkauan sasarannya masih terbatas
6. Peningkatan jumlah pembimbing manasik haji yang bersertifikasi	6. Adanya perkembangan permasalahan tidak hanya dalam kehidupan beragama tetapi juga masuk ke dalam dunia kesehatan terutama dengan adanya pandemik COVID-19, maka perlu ada pedoman pembinaan pelayanan dan perlindungan kepada jamaah haji dan umrah
7. Pelayanan produk halal sudah hadir secara sinergi di dalam Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan dengan BPJPH	7. Masih banyak terdapat produk yang beredar namun belum memiliki sertifikat halal, sehingga perlu ada percepatan kejelasan status petugas yang menangani sertifikasi halal di tingkat Kantor Wilayah dan Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten

1.2.4 Peningkatan akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam

Sejumlah potensi dan permasalahan yang dapat mempengaruhi peningkatan akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam:

POTENSI	PERMASALAHAN
1. Pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan telah membantu penuntasan Wajar Dikdas 12 Tahun dan menjangkau peserta didik dari keluarga miskin	1. Rendahnya tingkat “kesiapan belajar (readiness to learn)” di jenjang sekolah dasar
2. Pemerintah telah memberikan bantuan operasional atau BOS, yang menjamin satuan pendidikan memperoleh anggaran untuk membiayai operasional dan peningkatan mutu pendidikan. Melalui PIP, telah disalurkan bantuan afirmasi kepada peserta didik yang kurang mampu dan ini telah berhasil mempertahankan peserta didik tidak putus sekolah	2. Bagi sebagian satuan pendidikan, jumlah dana BOS belum mencukupi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jumlah dana PIP yang tersedia belum sebanding dengan jumlah peserta didik yang membutuhkan di lapangan karena belum sinkronnya data DTKS dengan data pendidikan di Kementerian Agama

1.2.5 Peningkatan akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi RA/BA dan Madrasah

Sejumlah potensi dan permasalahan yang dapat mempengaruhi peningkatan akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi RA/BA dan Madrasah antara lain:

POTENSI	PERMASALAHAN
1. Besarnya peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan pendidikan umum berciri agama seperti RA/BA, madrasah, dan pendidikan tinggi keagamaan Islam	1. Penyelenggaraan pendidikan umum berciri agama seperti RA/BA, madrasah dan pendidikan tinggi keagamaan yang mayoritas dikelola oleh masyarakat/swasta dapat menimbulkan masalah terkait upaya koordinasi dan standardisasi pendidikan madrasah

<p>2. Kualitas pembelajaran di madrasah secara umum dapat mengimbangi kualitas pembelajaran di sekolah umum, yang ditunjukkan oleh persentase kelulusan siswa madrasah dalam Ujian Nasional yang menyamai, dan bahkan sebagiannya, melampaui persentase kelulusan siswa sekolah umum</p>	<p>2. Rasio jumlah siswa-pendidik yang masih terlalu rendah menimbulkan persoalan dalam hal efisiensi pembiayaan pendidikan</p>
<p>3. Adanya kebijakan nasional yang memposisikan pendidikan madrasah setara dengan pendidikan pada sekolah umum</p>	<p>3. Masih terbatasnya ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas baik dari segi jumlah maupun ketersebarannya</p>

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam menetapkan tujuan dan sasaran, Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Khusus Ibukota Jakarta mendukung Visi dan Misi Kementerian Agama. Adapun Visi Kementerian Agama Tahun 2020 – 2024 adalah “***Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul, untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong***”.

Dalam melaksanakan visi Kementerian Agama, terdapat enam misi yang dijalankan, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata;
4. Meningkatkan layanan Pendidikan yang merata dan bermutu;
5. Meningkatkan produktivitas, dan daya saing Pendidikan; dan
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

2.1 Tujuan

Kementerian Agama pada Renstra tahun 2020-2024 menetapkan 6 (enam) tujuan yaitu:

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas;
5. Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif; dan
6. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan mendukung pelaksanaan lima dari enam tujuan Kementerian Agama di atas, yaitu:

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;

4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas; dan
5. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

2.2 Sasaran Kegiatan

Untuk mencapai tujuan Kementerian Agama ditetapkan sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Kementerian Agama telah menetapkan 13 sasaran strategis dalam rangka mencapai 6 tujuan Kementerian Agama sedangkan Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan mendukung 11 Sasaran Strategis dari 5 tujuan yang dijalankan dalam lingkup instansi Kementerian Agama.

Dalam rangka mencapai 5 (lima) tujuan sebagai mana disebutkan diatas, Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan menetapkan 53 Sasaran Kegiatan (SK) yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan pada tahun 2024. Adapun Sasaran Kegiatan (SK) yang mendukung dan bersesuaian dengan Tujuan, Sasaran Strategis (SS) dan Sasaran Program (SP) sebagaimana tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah sebagai berikut:

2.2.1 Tujuan Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial dicapai dengan menetapkan sasaran strategis, dan sasaran program sebagai berikut:

Kode	SasaranStrategis	Sasaran Program
SS1	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama

Sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penyuluhan agama dengan, indikator kinerja sebagaiberikut:
 - a. Nilai kinerja penyuluh agama
 - b. Persentase penyuluh agama yang dibina
 - c. Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi
 - d. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan

2.2.2 Tujuan Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dan kerukunan umat beragama dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	SasaranStrategis	Sasaran Program
SS2	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	<ul style="list-style-type: none"> a. Menurunnya frekuensi isu-isu kerukunan umat beragama b. Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama c. Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama d. Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat

Sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti
 - b. Jumlah aktor kerukunan yang dibina
 - c. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina
2. Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi
 - b. Jumlah forum dialog antarumat beragama yang diselenggarakan
3. Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
 - a. Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP
4. Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- a. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama
- b. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan
5. Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat
6. Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran dengan indikator kinerja sebagai berikut
 - a. Persentase rumah ibadah yang ramah
 - b. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina
 - c. Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya
 - d. Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan
7. Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik
8. Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama
 - b. Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama
 - c. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama
 - d. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama
 - e. Persentase guru pendidikan agama di sekolah keagamaan dan sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama
 - f. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama
 - g. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama
 - h. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama
 - i. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama
 - j. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di Madrasah yang bermuatan moderasi beragama

- k. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama
- 9. Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam (PAI), dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase pesantren yang berwawasan moderat
 - b. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al-Qur'an

Kode	SasaranStrategis	Sasaran Program
SS3	Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasmakan agama

Sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :

1. Menguatnya dialog lintas agama dan budaya, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan
2. Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)
3. Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesarawi MTQ, STQ, Ustawa dll)
4. Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodifikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina
 - b. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina

2.2.3 Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS4	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan b. Terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji yang transparan dan akuntabel
SS5	Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat	Meningkatnya kualitas penerimaan dana sosial keagamaan

Sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan
 - b. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan
 - c. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi
 - d. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan
 - e. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat
 - f. Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina
2. Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam), dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Jumlah KUA yang direvitalisasi
 - b. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana
 - c. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah
 - d. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah
3. Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pusaka sakinah/ Kristiani/ Bahagia/ Sukinah/ Hittasukhaya
4. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- a. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan
 - b. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan
5. Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
- a. Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu
6. Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
- a. Prosentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji
7. Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
- a. Persentase amil yang dibina
 - b. Persentase lembaga zakat yang dibina
8. Meningkatnya pengelolaan asset wakaf, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
- a. Persentase lembaga wakaf yang dibina
 - b. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan
 - c. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat

2.2.4 Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS6	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa

Sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif, dengan indicator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum
 - b. Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum
 - c. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum

- d. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan
 - e. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan
2. Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
- a. Persentase guru di madrasah/ sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan
 - b. Persentase ustadz di pendidikan diniyah/ muadalah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan
 - c. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan
 - d. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Sekolah Keagamaan
 - e. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan
 - f. Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi di madrasah/ sekolah keagamaan
3. Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam system pembelajaran, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
- a. Persentase sekolah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran
 - b. Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS7	Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan

Sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Pendidikan, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
- a. Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana
 - b. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana

- c. Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana
 - d. Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana
 - e. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana
 - f. Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana
2. Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah
 - b. Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan/ PDF Muadalah
 - c. Persentase siswa penerima PIP pada madrasah/ sekolah keagamaan
 - d. Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan/PDF Muadalah
 - e. Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional
 3. Meningkatnya kualitas penanganan ATS, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi
 - b. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren
 4. Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Jumlah siswa RA/Taman Seminari/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP.

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS8	Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan

Sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase ustad pendidikan diniyah/ muadalah yang lulus sertifikasi
 - b. Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi

- c. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi
 - d. Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG
 - e. Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi
2. Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
- a. Persentase guru di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal
 - b. Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal
3. Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
- a. Persentase Guru Madrasah/sekolah keagamaan yang mengikuti PPG
 - b. Persentase guru pendidikan agama yang mengikuti PPG
 - c. Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1
 - d. Persentase Calon Pengawas Madrasah/Sekolah Keagamaan yang menerima beasiswa S2

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS9	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan

Sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :

1. Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi berdasarkan hasil pemetaan, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Jumlah madrasah/ pendidikan diniyah/ muadalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi
2. Meningkatnya budaya mutu Pendidikan, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS10	Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa	Menguatnya pendidikan karakter siswa

Sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :

- 1 Meningkatkan budaya belajar dan lingkungan madrasah/ sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase MTs/MA/SMPTK/ SMTK/SMAK/ Pesantren/ Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran
 - b. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman
 - c. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak
- 2 Meningkatkan kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/ pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan
 - b. Jumlah gugus pramuka madrasah/ pendidikan keagamaan yang dibina

2.2.5 Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS12	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel

Sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas layanan dan bantuan hukum dengan indikator kinerja

- kegiatan yaitu :
- a. Persentase produk hukum yang diterbitkan
 - b. Persentase kasus hukum yang terselesaikan
 - c. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri dengan indikator kinerja kegiatan yaitu : Persentase rekomendasi izin orang asing
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai):
- a. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja
 - b. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti
 - c. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan
 - d. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)
 - e. Persentase ASN yang memenuhi syarat *leveling* kompetensi jabatannya
 - f. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu
 - g. Persentase data ASN yang diupdate
 - h. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses
4. Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
- a. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu,
 - b. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)
 - c. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal
 - d. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama
5. Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
- a. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya
 - b. Persentase tanah yang bersertifikat
 - c. Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN
6. Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

- a. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis
 - b. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi
 - c. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti
7. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi
 - b. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas
 - c. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja
 8. Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persentase output perencanaan yang berbasis data
 - b. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra
 - c. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti
 9. Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas
 - b. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti
 10. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantordengan indikator kinerja kegiatan yaitu : Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar
 11. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasadengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu
 - b. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik
 - c. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen
 - d. Persentase menurunnya lelang gagal
 - e. Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding
 12. Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tanggadengan indikator kinerja kegiatanyakni :Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan
 13. Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasidengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

- a. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi
 - b. Persentase pemberitaan negatif tentang Kemenag yang dicounter
14. Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar
 - b. Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable
15. Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan dengan indikator kinerja kegiatan yaitu : Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional.

2.2.6 Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Dalam menetapkan indikator diperlukan rumusan pengukuran yang digunakan untuk menggambarkan keberhasilan Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan. Untuk menghitung indikator diperlukan rumusan cara pengukurannya, penanggungjawab, sumber data, dan periode pelaporan. Tabel 2.1 berikut menjelaskan rumusan pengukuran indikator kinerja sasaran kegiatan.

Tabel 2.1
Cara Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama
Kota Jakarta
Tahun 2020-2024

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
1.	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama	a. Nilai kinerja penyuluh agama	1. Menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Pusat Bimbingan dan Pendidikan 2. Jumlah warga DKI sebagai sasaran penyuluhan Agama Islam	Seksi Bimas Islam dan pemberdayaan zawa, Penyelenggara Kristen, Katolik, Buddha dan Subbag Ortala dan KUB	Seksi Bimas Islam dan pemberdayaan zawa, Penyelenggara Kristen, Katolik, Buddha dan Subbag Ortala dan KUB	Triwulanan
		b. Persentase penyuluh agama yang dibina	1. Melalui jumlah kegiatan atau pembinaan yang dilakukan melalui laporan	Seksi Bimas Islam dan pemberdayaan zawa, Penyelenggara Kristen, Katolik,	Seksi Bimas Islam dan pemberdayaan zawa, Penyelenggara	Triwulanan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
			2. Jumlah Penyuluh Agama Islam Fungsional dan Honorer	Buddha dan Subbag Ortala dan KUB	Kristen, Katolik, Buddha dan Subbag Ortala dan KUB	
		c. Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi	Jumlah Penyuluh Yang melakukan siaran agama di media	Seksi Bimas Islam dan pemberdayaan zawa, Penyelenggara Kristen, Katolik, Buddha dan Subbag Ortala dan KUB	Seksi Bimas Islam dan pemberdayaan zawa, Penyelenggara Kristen, Katolik, Buddha dan Subbag Ortala dan KUB	Triwulanan
		d. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	1. Jumlah wilayah/kelompok binaan Penyuluh 2. Jumlah Majelis Taklim dan perkumpulan	Seksi Bimas Islam dan pemberdayaan zawa, Penyelenggara Kristen, Katolik, Buddha dan	Seksi Bimas Islam dan pemberdayaan zawa, Penyelenggara Kristen, Katolik,	Triwulanan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
			pengajian di DKI Jakarta 3. Melibatkan jumlah kelompok binaan penyuluh dari masing-masing penyuluh	Subbag Ortala dan KUB Buddha dan Subbag Ortala dan KUB	Buddha dan Subbag Ortala dan KUB	
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	a. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	Per jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	Seksi Bimas Islam, Penyelenggara Kristen, Katolik, Buddha dan Subbag Ortala dan KUB	Seksi Bimas Islam, Penyelenggara Kristen, Katolik, Buddha dan Subbag Ortala dan KUB	Triwulan
		b. Jumlah aktor kerukunan yang dibina	Menggunakan jumlah aktor kerukunan yang mendapatkan pembinaan	Subbag Ortala dan KUB	Subbag Ortala dan KUB	Triwulan
		c. Jumlah desa	Jumlah desa sadar	Subbag Ortala dan	Subbag Ortala	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		sadar kerukunan yang dibina	kerukunan yang dibina	KUB	dan KUB	
3.	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	a. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi	Jumlah Lembaga Agama, Organisasi sosial keagamaan yang mendapatkan bantuan	Seksi Bimas Islam, Penyelenggara zawa, Penyelenggara Kristen, Katolik, Buddha dan Subbag Ortala dan KUB	Seksi Bimas Islam, Penyelenggara zawa, Penyelenggara Kristen, Katolik, Buddha dan Subbag Ortala dan KUB	Triwulan
		b. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	Subbag Ortala dan KUB	Subbag Ortala dan KUB	Triwulan
4.	Menguatnya	Persentase Sekber	Perbandingan Sekber	Subbag Ortala dan	Subbag Ortala	Semester

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui FKUB dengan sekber FKUB yang ada di Wilayah DKI	KUB, Seksi Bimas Islam Penyelenggara Kristen, Katolik, Budha.	dan KUB, Seksi Bimas Islam Penyelenggara Kristen, Katolik, Budha.	
5.	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	a. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	Jumlah data lembaga, organisasi sosial keagamaan tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina	Subbag Ortala dan KUB, Seksi Bimas Islam, Penyelenggara Kristen, Katolik, Budha.	Subbag Ortala dan KUB, Seksi Bimas Islam, Penyelenggara Kristen, Katolik, Budha.	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		b. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang di selenggarakan	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah kegiatan yang ada dalam DIPA dari tahun yang berjalan Menggunakan jumlah kegiatan dialog intra yang dilaksanakan 	Subbag Ortala dan KUB, Seksi Bimas Islam, Penyelenggara Kristen, Katolik, Budha.	Subbag Ortala dan KUB, Seksi Bimas Islam, Penyelenggara Kristen, Katolik, Budha.	Triwulan
6.	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah penyuluh Agama Islam Fungsional dan Non PNS Menggunakan kegiatan pembinaan penyuluh agama dalam menyampaikan moderasi 	Subbag Ortala dan KUB, Seksi Bimas Islam, Penyelenggara Kristen, Katolik, Budha.	Subbag Ortala dan KUB, Seksi Bimas Islam, Penyelenggara Kristen, Katolik, Budha.	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
			beragama			
7.	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	a. Persentase rumah ibadah yang ramah	<ol style="list-style-type: none"> Melalui perhitungan jumlah umat yang beribadah Jumlah rumah ibadah yang ramah dan toleran Menggunakan pendekatan dengan lingkungan dari keberadaan tempat Ibadah tersebut 	Seksi Bimas Islam, Penyelenggara zawa, Penyelenggara Kristen, Katolik, Buddha dan Subbag Ortala dan KUB	Seksi Bimas Islam, Penyelenggara zawa, Penyelenggara Kristen, Katolik, Buddha dan Subbag Ortala dan KUB	Triwulan
		b. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	<ol style="list-style-type: none"> Melalui kegiatan ibadah yang dilakukan Jumlah tenaga pengelola rumah 	Seksi Bimas Islam, Penyelenggara zawa, Penyelenggara Kristen, Katolik,	Seksi Bimas Islam, Penyelenggara zawa, Penyelenggara	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
			yang dibina	Buddha dan Subbag Ortala dan KUB	Kristen, Katolik, Buddha dan Subbag Ortala dan KUB	
		c. Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya	Jumlah Kegiatan pembinaan Imam Besar	Bimas Islam	Bimas Islam	Triwulan
		d. Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan	<ol style="list-style-type: none"> Menggunakan instrumen data rumah Ibadah Jumlah kegiatan pembinaan Masjid Percontohan Menggunakan kegiatan lomba PHBS di masing-masing rumah 	Seksi Bimas Islam, Penyelenggara zawa, Penyelenggara Kristen, Katolik, Buddha dan Subbag Ortala dan KUB	Seksi Bimas Islam, Penyelenggara zawa, Penyelenggara Kristen, Katolik, Buddha dan Subbag Ortala dan KUB	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
			ibadah			
8.	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media masa dan ruang publik	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah siaran keagamaan pada media oleh Penyuluh Agama Islam Fungsional dan Non PNS Menggunakan jumlah pelaksanaan siaran yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik 	Seksi Bimas Islam, Penyelenggara zawa, Penyelenggara Kristen, Katolik, Buddha dan Subbag Ortala dan KUB	Seksi Bimas Islam, Penyelenggara zawa, Penyelenggara Kristen, Katolik, Buddha dan Subbag Ortala dan KUB	Triwulan
9.	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran	a. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh	1. Menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Dirjen Pendis.	Seksi Penmad, Seksi PD. Pontren Seksi PAIS	Seksi Penmad, Seksi PD. Pontren Seksi PAIS,	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
	agama	pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	2. Melihat jumlah kegiatan peserta didik 3. Menggunakan jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan agama yang bernuansa moderasi beragama			
		b. Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan	Menggunakan jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan agama yang bernuansa moderasi beragama	Seksi Penmad, Seksi PD. Pontren, Peny. Kristen, Katolik, dan Budha	Seksi Penmad, Seksi PD. Pontren, Peny. Kristen, Katolik, dan Budha	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		moderasi beragama				
		c. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	Menggunakan jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan agama yang bernuansa moderasi beragama	Seksi PAIS, Peyelenggara Kristen, Katolik, dan Budha	Bidang Penmad, Bidang PAKIS, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Buddha	Triwulan
		d. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	1. Menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Dirjen Pendis. 2. Melalui kegiatan diklat Guru Pendidikan Agama	Bidang Penmad	Bidang Penmad	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		e. Persentase guru pendidikan agama di sekolah keagamaan dan sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	<ol style="list-style-type: none"> Menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Dirjen Pendis. Melalui kegiatan diklat Guru Pendidikan Agama 	Bidang Penmad, Bidang PAKIS, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Buddha	Bidang Penmad, Bidang PAKIS, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Buddha	Triwulan
		f. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	<ol style="list-style-type: none"> Menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Dirjen Pendis. Melalui kegiatan yang diikuti guru Pendidikan Agama Kristen 	Bidang Penmad, Bidang PAKIS, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Buddha	Bidang Penmad, Bidang PAKIS, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Buddha	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
			3. Menggunakan jumlah pengajar pendidikan agama yang dibina moderasi beragama			
		g. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Dirjen Pendis. 2. Melalui Pembinaan yang diikuti Pengawas 3. Menggunakan jumlah kegiatan moderasi beragama yang dilaksanakan 	Bidang Penmad, Bidang PAKIS, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Buddha	Bidang Penmad, Bidang PAKIS, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Buddha	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
			untuk pengawas			
		h. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	<ol style="list-style-type: none"> Menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Dirjen Pendis. Melalui Pembinaan yang diikuti Pengawas Menggunakan jumlah kegiatan moderasi beragama yang dilaksanakan untuk pengawas 	Bidang Penmad, Bidang PAKIS, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Buddha	Bidang Penmad, Bidang PAKIS, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Buddha	Triwulan
		i. Persentase pengawas pendidikan agama di	<ol style="list-style-type: none"> Menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Dirjen 	Bidang Penmad, Bidang PAKIS, Bimas Kristen, Bimas Katolik,	Bidang Penmad, Bidang PAKIS, Bimas Kristen, Bimas Katolik,	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	Pendis. 2. Melalui Pembinaan yang diikuti Pengawas 3. Menggunakan jumlah kegiatan moderasi beragama yang dilaksanakan untuk pengawas	Bimas Hindu, dan Bimas Buddha	Bimas Hindu, dan Bimas Buddha	
		j. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di Madrasah yang bermuatan moderasi beragama	Per Kegiatan	Bidang Penmad, Bidang PAKIS, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Buddha	Bidang Penmad, Bidang PAKIS, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Buddha	Triwulan
		k. Jumlah	Per Kegiatan	Bidang Penmad,	Bidang Penmad,	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama		Bidang PAKIS, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Buddha	Bidang PAKIS, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Buddha	
10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	a. Persentase pesantren yang berwawasan moderat	Menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Dirjen Pendis.	Bidang PAKIS	Bidang PAKIS	Triwulan
		b. Persentase peningkatan peserta didik	Menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan	Bidang PAKIS	Bidang PAKIS	

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		pada pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan Al-Qur'an yang berwawasan moderat	oleh Dirjen Pendis.			
11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	Jumlah Dialog antar umat beragama yang dilaksanakan	Subbag Ortala dan KUB	Subbag Ortala dan KUB	Semester
12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata	Jumlah situs Religi yang ada di DKI Jakarta	Bidang Penais dan Pemberdayaan Zawa, Bimas Kristen, Bimas Katolik, dan Bimas Budha	Bidang Penais dan Pemberdayaan Zawa, Bimas Kristen, Bimas Katolik, dan Bimas Budha	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
	kesejahteraan umat	religi, Situs, Artefak)				
13	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa dll)	Jumlah kegiatan yang diikuti	Bidang Penais dan Pemberdayaan Zawa, Bimas Kristen, Bimas Katolik, dan Bimas Budha	Bidang Penais dan Pemberdayaan Zawa, Bimas Kristen, Bimas Katolik, dan Bimas Budha	Tahun
14	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	a. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina	Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina	Bidang Penais dan Pemberdayaan Zawa, Bimas Kristen, Bimas Katolik, dan Bimas Budha	Bidang Penais dan Pemberdayaan Zawa, Bimas Kristen, Bimas Katolik, dan Bimas Budha	Semester

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		b. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	Bidang Penais dan Pemberdayaan Zawa, Bimas Kristen, Bimas Katolik, dan Bimas Budha	Bidang Penais dan Pemberdayaan Zawa, Bimas Kristen, Bimas Katolik, dan Bimas Budha	Semester
15	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	a. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	Perhitungan seberapa banyak sarana dan prasarana peribadatan yang dapat disediakan	Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Buddha	Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Buddha	Triwulan
		b. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan	1. Menghitung berapa jumlah gereja yang membutuhkan 2. Pengadaan Al-Quran dan buku	Bidang Urais, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Buddha	Bidang Urais, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Buddha	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
			keagamaan			
		c. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	Perhitungan jumlah lembaga agama dan keagamaan yang dapat difasilitasi	Bidang Penais dan Pemberdayaan Zawa, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Buddha	Bidang Penais dan Pemberdayaan Zawa, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Buddha	Triwulan
		d. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan	Jumlah kegiatan bimbingan layanan syariah	Bidang Urais	Bidang Urais	Triwulan
		e. Jumlah masjid/ mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	Jumlah Masjid/ mushalla yang sudah dilakukan pengukuran arah kiblat	Bidang Urais	Bidang Urais	Triwulan
		f. Jumlah SDM	Jumlah kegiatan	Bidang Urais	Bidang Urais	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		Ahli Falakiyah yang dibina	Pembinaan ahli falakiyah			
16	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam)	a. Jumlah KUA yang direvitalisasi	Jumlah KUA yang direvitalisasi	Bidang Urais	Bidang Urais	Triwulan
		b. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana	Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana	Bidang Urais	Bidang Urais	Triwulan
		c. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	Peristiwa nikah	Bidang Urais,	Bidang Urais	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		d. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	Jumlah remaja usia sekolah	Bidang Urais,	Bidang Urais	Triwulan
17	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pusaka sakinah/ Kristiani/ Bahagia/ Sukinah/ Hitta sukhaya	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah keluarga yang menerima bimbingan layanan berdasarkan KUA Piloting Pusaka Sakinah Menggunakan jumlah kegiatan pembinaan keluarga sakinah yang dilaksanakan 	Bidang Urais, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Budha	Bidang Urais, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Budha	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
18	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	Jumlah Lembaga yang melaksanakan regulasi perjalanan ibadah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan	Bidang PHU	Bidang PHU	Setahun
19	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	a. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	Jumlah layanan haji yang memenuhi standar	Bidang PHU	Bidang PHU	Triwulan
		b. Persentase calon jemaah haji yang batal	Jumlah PIHK yang terbina dan terawasi dibagi dengan jumlah	Bidang PHU	Bidang PHU	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		diberangkatkan pada tahun bersangkutan	PIHK yang terdaftar			
20	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji	Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	Jumlah pelayanan transportasi udara tepat waktu dibagi jumlah pelayanan transportasi udara	Bidang PHU	Bidang PHU	Triwulan
21	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	Prosentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	Menghitung jumlah jemaah haji yang mengikuti manasik dibanding jumlah kuota jemaah haji	Bidang PHU	Bidang PHU	Triwulan
22	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan (<i>Continuity service</i>)	Pelaksanaan Layanan Sistem Informasi Haji terpadu sesuai dengan prosedur	Bidang PHU	Bidang PHU	Setahun

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
23	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	a. Persentase amil yang dibina	Jumlah amil yang di monitoring	Bidang Penais dan Pemberdayaan Zawa	Bidang Penais dan Pemberdayaan Zawa	Triwulan
		b. Persentase lembaga zakat yang dibina	Jumlah Lembaga yang di monitoring	Bidang Penais dan Pemberdayaan Zawa	Bidang Penais dan Pemberdayaan Zawa	Triwulan
24	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	a. Persentase lembaga wakaf yang dibina	Jumlah Lembaga yang di monitoring	Bidang Penais dan Pemberdayaan Zawa	Bidang Penais dan Pemberdayaan Zawa	Triwulan
		b. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	Jumlah akta ikrar yang diterbitkan	Bidang Penais dan Pemberdayaan Zawa	Bidang Penais dan Pemberdayaan Zawa	Triwulan
		c. Persentase tanah wakaf	Jumlah Lembaga yang di monitoring	Bidang Penais dan Pemberdayaan	Bidang Penais dan	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		yang bersertifikat		Zawa	Pemberdayaan Zawa	
25	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	a. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	Perbandingan jumlah madrasah di wilayah dengan madrasah yang menerapkan kurikulum yang berlaku	Bidang Penmad	Bidang Penmad	Triwulan
		b. Persentase pendidikan diniyah/ muadalah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	Jumlah Lembaga pendidikan diniyah/ muadalah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	Bidang Penmad	Bidang Penmad	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		c. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	Jumlah lembaga yang dimonitoring	Bidang Penmad, Bimas Kristen, Katolik, Hindu, Budha	Bidang Penmad, Bimas Kristen, Katolik, Hindu, Budha	Triwulan
		d. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan	Bidang Penmad	Bidang Penmad	Triwulan
		e. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	Bidang Penmad	Bidang Penmad	Setahun

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		kejuruan				
26	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	a. Persentase guru di madrasah/ sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	dengan menghitung jumlah KBM dalam 1 minggu	Bidang Penmad, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Budha	Bidang Penmad, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Budha	Triwulan
		b. Persentase ustadz di pendidikan diniyah/ muadalah yang dinilai	Jumlah ustadz di pendidikan diniyah/ muadalah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	Bidang Penmad, Bidang Pakis	Bidang Penmad, Bidang Pakis	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan				
		c. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	Jumlah guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	Bidang Penmad, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Budha	Bidang Penmad, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Budha	Triwulan
		d. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada	Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Sekolah Keagamaan dalam satu tahun	Bidang Penmad, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Budha	Bidang Penmad, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Budha	Tahun

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		madrasah/Sekolah Keagamaan				
		e. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa	Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa	Bidang Penmad, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Budha	Bidang Penmad, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Budha	Triwulan
		f. Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi di madrasah/sekolah keagamaan	Dengan menghitung jumlah kehadiran dalam siswa	Bidang Penmad, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Budha	Bidang Penmad, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Budha	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	a. Persentase sekolah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	menghitung seberapa sekolah yang mempergunakan TIK dalam proses pembelajaran	Bidang Penmad, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Budha	Bidang Penmad, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Budha	Triwulan
		b. Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	menghitung seberapa guru yang mempergunakan TIK dalam proses pembelajaran	Bidang Penmad, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Budha	Bidang Penmad, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Budha	Triwulan
28	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Pendidikan	a. Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/	menghitung seberapa guru yang mempergunakan Sarana dan	Bidang Penmad, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan	Bidang Penmad, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu,	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		Taman Seminari/ Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana	Prasarana dalam KBM	Bimas Budha	dan Bimas Budha	
		b. Persentase MI/Ula/SDTK/ Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	menghitung sekolah yang mempergunakan Sarana dan Prasarana dalam KBM	Bidang Penmad, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Budha	Bidang Penmad, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Budha	Triwulan
		c. Persentase MTs/Wustha/ SMPTK/ Madyama Widya Pasraman yang	menghitung sekolah yang mempergunakan Sarana dan Prasarana dalam KBM	Bidang Penmad, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Budha	Bidang Penmad, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Budha	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		memenuhi SPM sarana prasarana				
		d. Persentase MA/Ulya/SMTK/ SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	menghitung sekolah yang mempergunakan Sarana dan Prasarana dalam KBM	Bidang Penmad, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Budha	Bidang Penmad, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Budha	Triwulan
		e. Persentase PDF/ Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM	menghitung sekolah yang mempergunakan Sarana dan Prasarana dalam KBM	Bidang Penmad, Bidang Pakis	Bidang Penmad, Bidang Pakis	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		sarana dan prasarana				
		f. Persentase Sekolah Minggu Buddha/ Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana	menghitung sekolah yang mempergunakan Sarana dan Prasarana dalam KBM	Bimas Budha	Bimas Budha	Triwulan
29	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan	a. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	Per Siswa	Bidang Penmad, Bidang Pakis	Bidang Penmad, Bidang Pakis	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
	berbakat					
		b. Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan/ PDF Muadalah	Per Siswa	Bidang Penmad, Bidang Pakis	Bidang Penmad, Bidang Pakis	Triwulan
		c. Persentase siswa penerima PIP pada madrasah/ sekolah keagamaan	Per Siswa	Bidang Penmad, Bidang Pakis, Bimas Kristen	Bidang Penmad, Bidang Pakis, Bimas Kristen	Triwulan
		d. Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan/	Per Siswa	Bidang Penmad, Bidang Pakis	Bidang Penmad, Bidang Pakis	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		PDF Muadalah				
		e. Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional	Per Pondok Pesantren	Bidang Pakis	Bidang Pakis	Triwulan
30	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	a. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	Jumlah madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	Bidang Penmad	Bidang Penmad	Tahun
		b. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di	Jumlah ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren	Bidang Pakis	Bidang Pakis	Tahun

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		pesantren				
31	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	Jumlah siswa RA/ Taman Seminari/ Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP	Jumlah siswa yang tingkatkan mutunya melalui BOP	Bidang Penmad, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Budha	Bidang Penmad, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Budha	Triwulan
32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	a. Persentase ustad pendidikan diniyah/ muadalah yang lulus sertifikasi	1. Per GPAI 2. mengukur jumlah guru yang mengikuti sertifikasi	Bidang Penmad, Bidang Pakis	Bidang Penmad, Bidang Pakis	Triwulan
		b. Persentase tenaga kependidikan	mengukur jumlah guru yang sudah lulus sertifikasi	Bidang Penmad, Bidang Pakis	Bidang Penmad, Bidang Pakis	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi				
		c. Persentase kepala pendidikan diniyah/ muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	Menghitung Jumlah Kepala Sekolah yang sudah mengikuti sertifikasi	Bidang Penmad,	Bidang Penmad,	Triwulan
		d. Persentase ustad pendidikan diniyah/ muadalah yang	menghitung jumlah tenaga pendidik yang mendapatkan diklat/pelatihan	Bidang Penmad	Bidang Penmad	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG				
		e. Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi	menghitung jumlah tenaga pendidik yang mendapatkan diklat/pelatihan	Bidang Penmad, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Budha	Bidang Penmad, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Budha	Triwulan
33	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	a. Persentase guru di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	1. Menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Dirjen Pendis. 2. menghitung jumlah tenaga pendidik yang	Bidang Penmad, Bidang Pakis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Budha	Bidang Penmad, Bidang Pakis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Budha	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
			mendapatkan diklat/pelatihan			
		b. Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Perbandingan jumlah tenaga kependidikan yang ada dengan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Bidang Penmad	Bidang Penmad	Triwulan
34	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi	a. Persentase Guru Madrasah/ sekolah keagamaan yang mengikuti PPG	1. Per GPAI 2. Menghitung jumlah guru yang sudah mengikuti Diklat PPG	Bidang Penmad, Bidang Pakis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Budha	Bidang Penmad, Bidang Pakis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Budha	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
	pendidik					
		b. Persentase guru pendidikan agama yang mengikuti PPG	Menghitung jumlah guru yang sudah mengikuti Diklat PPG	Bidang Penmad, Bidang Pakis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Budha	Bidang Penmad, Bidang Pakis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Budha	Triwulan
		c. Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1	1. Menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Dirjen Pendis 2. Menghitung jumlah Guru, sesuai kualifikasi	Bidang Penmad, Bidang Pakis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Budha	Bidang Penmad, Bidang Pakis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Budha	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		d. Persentase Calon Pengawas Madrasah/ Sekolah Keagamaan yang menerima beasiswa S2	1. Menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Dirjen Pendis 2. Menghitung jumlah Guru, sesuai kualifikasi	Bidang Penmad, Bidang Pakis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Budha	Bidang Penmad, Bidang Pakis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Budha	Triwulan
35	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi berdasarkan hasil pemetaan	Jumlah madrasah/ pendidikan diniyah/ muadalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	Per Lembaga	Bidang Penmad, Bidang Pakis,	Bidang Penmad, Bidang Pakis	Triwulan
36	Meningkatnya budaya mutu Pendidikan	a. Persentase siswa/santri madrasah/ pendidikan	Perbandingan siswa yang mengikuti kompetisi nasional dengan jumlah total	Bidang Penmad,	Bidang Penmad	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		diniyah/PDF/ sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	siswa			
37	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/ sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	a. Persentase MTs/MA/SMPTK/ SMTK/SMAK/ Pesantren/ Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	1. Menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Dirjen Pendis 2. Meningkatnya jumlah murid dan lembaga Pendidikan	Bidang Penmad, Bidang Pakis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Budha	Bidang Penmad, Bidang Pakis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Budha	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		b. Persentase kepala pendidikan diniyah/ muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman	<ol style="list-style-type: none"> Menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Dirjen Pendis Meningkatnya jumlah murid dan lembaga Pendidikan 	Bidang Penmad, Bidang Pakis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Budha	Bidang Penmad, Bidang Pakis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Budha	Triwulan
		c. Persentase madrasah/ sekolah keagamaan yang ramah anak	<ol style="list-style-type: none"> Menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Dirjen Pendis Meningkatnya pertumbuhan lembaga pendidikan 	Bidang Penmad, Bidang Pakis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Budha	Bidang Penmad, Bidang Pakis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Budha	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
38	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan	a. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/ pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	Meningkatnya pertumbuhan lembaga pendidikan	Bidang Penmad	Bidang Penmad	Triwulan
		b. Jumlah gugus pramuka madrasah/ pendidikan keagamaan yang dibina	Per Gugus	Bidang Penmad, Bidang Pakis	Bidang Penmad, Bidang Pakis	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
39	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	a. Persentase produk hukum yang diterbitkan	Jumlah produk hukum yang diterbitkan	Subbag Kepegawaian dan Hukum	Subbag Kepegawaian dan Hukum	Setahun
		b. Persentase kasus hukum yang terselesaikan	Jumlah kasus hukum yang terselesaikan	Subbag Kepegawaian dan Hukum	Subbag Kepegawaian dan Hukum	Setahun
		c. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	Subbag Kepegawaian dan Hukum	Subbag Kepegawaian dan Hukum	Setahun
40	Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar	Persentase rekomendasi izin orang asing	Jumlah rekomendasi izin orang asing	Subbag Ortala dan KUB	Subbag Ortala dan KUB	Setahun

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
	negeri					
41	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	a. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	Jumlah dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	Subbag Kepegawaian dan Hukum	Subbag Kepegawaian dan Hukum	Setahun
		b. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun	Jumlah laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti	Subbag Kepegawaian dan Hukum	Subbag Kepegawaian dan Hukum	Setahun

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		yang ditandaklanjuti				
		c. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan	Perbandingan kesesuaian hasil assessment dan kualifikasi pegawai	Subbag Kepegawaian dan Hukum	Subbag Kepegawaian dan Hukum	Setahun
		d. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	Seleksi dokumen kelengkapan Asesmen (Portofolio) dari Tim Penilai	Subbag Kepegawaian dan Hukum	1. Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum Kanwil Kementerian Agama Prov.	Setahun

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
					DKI Jakarta	
		e. Persentase ASN yang memenuhi syarat <i>leveling</i> kompetensi jabatannya	Mengisi jabatan sesuai dengan hasil Asesmen Kompetensi ASN	Subbag Kepegawaian dan Hukum	1. Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum Kanwil Kementerian Agama Prov. DKI Jakarta	Setahun
		f. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu	Ketepatan mutase pegawai	Subbag Kepegawaian dan Hukum	Subbag Kepegawaian dan Hukum	Setahun

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		g. Persentase data ASN yang diupdate	Ketepatan update data	Subbag Kepegawaian dan Hukum	Subbag Kepegawaian dan Hukum	Setahun
		h. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses	Layanan Administrasi kepegawaian yang mudah diakses	Subbag Kepegawaian dan Hukum	Subbag Kepegawaian dan Hukum	Setahun
42	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	a. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Ketepatan laporan keuangan semester	Subbag keuangan dan BMN	Subbag keuangan dan BMN	Semester

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		b. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	Subbag keuangan dan BMN	Subbag keuangan dan BMN	Setahun
		c. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	Optimalisasi realisasi pelaksanaan anggaran	Subbag keuangan dan BMN	Subbag keuangan dan BMN	Setahun
		d. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian	Penyelesaian laporan hasil audit keuangan	Subbag keuangan dan BMN	Subbag keuangan dan BMN	Setahun

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		Agama				
43	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	a. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	Perbandingan yang sudah PSP dan pemanfaatan dengan total jumlah aset tetap BMN yang ada	Subbag keuangan dan BMN	Subbag keuangan dan BMN	Setahun
		b. Persentase tanah yang bersertifikat	Pelaksanaan pengurusan sertifikat tanah	Subbag keuangan dan BMN	Subbag keuangan dan BMN	Setahun
		c. Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN	Pelaksanaan Opname Physic BMN	Subbag keuangan dan BMN	Subbag keuangan dan BMN	Setahun

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
44	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	a. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	Menggunakan jumlah layanan ke publik	Subbag Ortala dan KUB	Subbag Ortala dan KUB	Triwulan
		b. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	Jumlah Laporan Kinerja satuan Organisasi	Subbag Ortala dan KUB	Subbag Ortala dan KUB	Semester

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		c. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Jumlah hasil pengawasan dan tindak lanjut pemeriksaan	Subbag Ortala dan KUB	Subbag Ortala dan KUB	Semester
45	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	a. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	Jumlah satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	Subbag Ortala dan KUB	Subbag Ortala dan KUB	Semester
		b. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	Subbag Ortala dan KUB	Subbag Ortala dan KUB	Semester

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		c. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	Jumlah agen perubahan pada satker yang dibina	Subbag Ortala dan KUB	Subbag Ortala dan KUB	Semester
46	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	a. Persentase output perencanaan yang berbasis data	Perbandingan data yang komprehensif, valid dan reliabel dengan output perencanaan	Subbag Perencanaan data dan Informasi	Subbag Perencanaan data dan Informasi	Setahun
		b. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	Perbandingan keselarasan muatan renja dengan renstra yang ada di DIPA kanwil dengan total DIPA yang ada di Kanwil	Subbag Perencanaan data dan Informasi	Subbag Perencanaan data dan Informasi	Setahun

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		c. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	Jumlah tindak lanjut kerja sama	Subbag Perencanaan data dan Informasi	Subbag Perencanaan data dan Informasi	Setahun
47	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	a. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	Jumlah laporan capaian perencanaan dan anggaran	Subbag Perencanaan data dan Informasi	Subbag Perencanaan data dan Informasi	Setahun
		b. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang	Jumlah rekomendasi dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan	Subbag Perencanaan data dan Informasi	Subbag Perencanaan data dan Informasi	Setahun

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		ditindaklanjuti				
48	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	Kesesuaian pemenuhan sarana dan prasarana kantor dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan	Subbag Umum dan Hubungan Masyarakat	Subbag Umum dan Hubungan Masyarakat	Triwulan
49	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	a. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	Tindak lanjut terhadap surat yang masuk	Subbag Umum dan Hubungan Masyarakat	Subbag Umum dan Hubungan Masyarakat	Triwulan
		b. Persentase dokumen yang dikirim secara	Pencatatan dan penataan dokumen secara elektronik	Subbag Umum dan Hubungan Masyarakat	Subbag Umum dan Hubungan Masyarakat	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		elektronik				
		c. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	Arsip surat secara elektronik	Subbag Umum dan Hubungan Masyarakat	Subbag Umum dan Hubungan Masyarakat	Triwulan
		d. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	Jumlah surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	Subbag Umum dan Hubungan Masyarakat	Subbag Umum dan Hubungan Masyarakat	Triwulan
		e. Persentase menurunnya snggah dan snggah banding	Jumlah snggah banding pada pengadaan barang dan jasa	Subbag Umum dan Hubungan Masyarakat	Subbag Umum dan Hubungan Masyarakat	Setahun

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
50	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	Penilaian terhadap kecakapan dan pelayanan terhadap tamu/ pengunjung	Subbag Umum dan Hubungan Masyarakat	Subbag Umum dan Hubungan Masyarakat	Triwulan
51	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	a. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	Jumlah pemberitaan capaian program	Subbag Umum dan Hubungan Masyarakat	Subbag Umum dan Hubungan Masyarakat	Triwulan
		b. Persentase pemberitaan negatif tentang Kemenag yang dicounter	Jumlah berita negative yang bisa di counter	Subbag Umum dan Hubungan Masyarakat	Subbag Umum dan Hubungan Masyarakat	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
52	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	a. Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar	Jumlah system informasi yang dapat diakses	Subbag Perencanaan data dan Informasi	Subbag Perencanaan data dan Informasi	Semester
		b. Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	Ketepatan dan validitas data agama, dan pendidikan yang dapat disajikan	Subbag Perencanaan data dan Informasi	Subbag Perencanaan data dan Informasi	Semester
53	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	Perbandingan data dan perencanaan anggaran dengan kesesuaian kebutuhan gaji dan tunjangan	Subbag Perencanaan, data dan Informasi, Bidang Penmad, Bidang Pakis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu dan Bimas Budha	Subbag Perencanaan, data dan Informasi, Bidang Penmad, Bidang Pakis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu dan Bimas Budha	Setahun

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1 Target Kinerja

Dalam rangka menjalankan tujuan dan sasaran kegiatan tersebut di atas, tahun 2020 Kantor Kementerian Agama memiliki strategi melalui 9 (Sembilan) Program sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama;
2. Program Kerukunan Umat Beragama;
3. Program Bimbingan Masyarakat Islam;
4. Program Pendidikan Islam;
5. Program Bimbingan Masyarakat Kristen;
6. Program Bimbingan Masyarakat Katolik;
7. Program Bimbingan Masyarakat Hindu;
8. Program Bimbingan Masyarakat Buddha;
9. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Sementara itu, mulai tahun 2021, Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan menjalankan arah kebijakan tersebut melalui 4 (empat) Program, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen;
2. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama;
3. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran;
4. Program PAUD dan Wajar DIKDAS 12 Tahun.

Adapun rincian kegiatan dalam pelaksanaan Program yaitu:

1. Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama;
2. Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN
3. Pembinaan Administrasi Umum
4. Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah
5. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
6. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
7. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
8. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam

9. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah
10. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam
11. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen
12. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen
13. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen
14. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen
15. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik
16. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu
17. Pelayanan Haji Dalam Negeri
18. Pembinaan Haji
19. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah
20. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha
21. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha
22. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha
23. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Budha
24. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha

Target kinerja merupakan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai selama periode 2020-2024. Target kinerja tercermin dari sasaran program dan indikator kinerja serta alokasi anggaran yang tersedia untuk pencapaiannya. Dokumen perencanaan masing-masing unit lingkup Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan merupakan gambaran strategi pencapaian target dalam pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi pada setiap tahun anggaran. Adapun faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja yaitu: a) program dan kegiatan, b) sasaran program/kegiatan, c) indikator kinerja, dan d) alokasi anggaran dalam implementasi kegiatan.

Selanjutnya sasaran program tersebut dapat dicapai dengan menetapkan indikator kinerja program yang berisikan jenis keluaran yang akan dihasilkan baik dalam bentuk dokumen, laporan maupun sejenisnya sesuai dengan ketersediaan anggaran yang dialokasikan di masing-masing unit lingkup Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan.

Dari Indikator Kinerja maka disusunlah indikator yang benar-benar mengungkit terwujudnya sasaran yang hendak dicapai oleh Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan pada seluruh program yang dimiliki ada.

Tabel 3.1
Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja pada
Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan
Unit Eselon I Sekretariat Jenderal

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Kegiatan
SK 1	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	Persentase produk hukum yang diharmonisasikan	%	85.00	95.00	Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum
		Persentase kasus hukum yang terselesaikan	%	45.00	100.00	
		Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	Kegiatan	3	10	
SK 2	Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri	Persentase rekomendasi izin perjalanan dinas luar negeri	%	90.00	99.00	Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum
		Persentase rekomendasi izin orang asing	%	90.00	90.00	
SK 3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan ASN (Pengadaan, Penempata, pembinaan dan pengembangan pegawai	Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	%	90.00	100.00	Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum
		Persentase Laporan permasalahan kepegawaian dibidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti	%	80.00	95.00	
		Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan	%	50.00	90.00	
		Persentase ASN yang memiliki nilai indeks professional berkategori sedang (minimum 71)	%	50.00	90.00	
		Persentase ASN yang memnuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	%	40.00	95.00	
		Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu	%	90.00	95.0	
		Persentase data ASN yang diupdate	%	90.00	90.00	
		Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses	%	70.00	90.00	
SK 4	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	Jumlah laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Dokumen	68.00	68.00	Sub Bagian keuangan dan BMN
		Persentase satuan kerja yang telah	%	92.00	100.00	

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Kegiatan
		menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)				
		Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	%	94.80	98.29	
		Persentase Penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama	%	30.00	80.00	
		Persentase Pencapaian dan Penetapan target PNBPN dan BLU	%	98.00	100.00	
SK 5	Meningkatnya Pengelolaan BMN yang Akuntabel	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaannya	%	41.95	100.00	Sub Bagian keuangan dan BMN
		Persentase Tanah yang bersertifikat	%	25.00	44.00	
		Persentase nilai opname (OP) BMN	%	95.00	100.00	
SK 6	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	Persentase satuan kerja yang telah ditindaklanjuti dengan perubahan Organisasi	%	80.00	95.00	Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kerukunan Umat Beragama
		Persentase jabatan satuan kerja yang telah dievaluasi dan ditindaklanjuti dengan regulasi baru	%	NA	100.00	
		Persentase satuan organisasi / kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	%	NA	90.00	
		Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	%	15.00	100.00	
		Jumlah standar pelayanan publik yang telah ditetapkan regulasinya	Dokumen	80	70.00	
		Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	%	71.30	95	
SK 7	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	%	80.00	100	Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kerukunan Umat Beragama
		Jumlah satuan kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	Satker	1	1	
		Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan Zona Integritas	Satker	1	1	
		Jumlah agen perubahan yang dibina untuk	Orang	78	78	

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Kegiatan
		mengimplementasikan program kerja				
SK 8	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	Persebtase output Perencanaan yang berbasis data	%	90.00	100.00	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
		Persebtase keselarasan muatan Rencana Kerja dengan Rencana Strategis	%	90.00	100.00	
		Persentase Perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	%	70.00	75.00	
SK 9	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	Persentase Laporan Capaian Kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	%	92.00	96.00	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
SK 10	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	%	60.00	95.00	Sub Bagian Umum dan Humas
SK 11	Mwningkatnya Kualitas Pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan daan barang dan jasa	Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	%	97.00	100.00	Sub Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat
		Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	%	55.00	100.00	
		Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	%	72.00	100.00	
		Persentase menurunnya lelang gagal	%	65.00	98.85	
		Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding	%	50.00	96.85	
SK 12	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	%	60.00	95.00	Sub Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat
		Persentase penatausahaan dan penertiban asset BMN di lingkungan Sekretariat Jenderal	%	85.00	96.80	
SK 13	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasikan	Kegiatan	29.00	29.00	Sub Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat
		Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang discounter	%	90.00	100.00	
		Persentase opini positif berita Kementerian Agama	%	75.00	100.00	
SK 14	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar	Unit	1	1	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
		Persentase data agama dan Pendidikan yang valid dan reliable	%	60.000	100	

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Kegiatan
SK 15	Meningkatnya kualitas Penyuluh Agama Khonghucu	Nilai Kinerja Penyuluh Agama	Nilai	NA	75	Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kerukunan Umat Beragama
		Persentase Penyuluh Agama yang dibina	%	100.00	100.00	
		Jumlah Penziar agama yang dibina kompetensinya	Orang	10	10	
		Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	Kelompok	NA	1	
SK 16	Meningkatnya kualitas pembinaan Kerukunan Intra umat beragama Khonghucu	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama Khonghucu	%	NA	60.00	Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kerukunan Umat Beragama
		Jumlah forum dialog intra umat beragama Khonghucu yang diselenggarakan	Kegiatan	NA	20	
SK 16	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	%	100.00	100.00	Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kerukunan Umat Beragama
SK 17	Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi	Jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuhkembangkan sikap toleran (hari besar keagamaan, sekaten, dll)	Kegiatan	NA	1	Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kerukunan Umat Beragama
SK 18	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	%	100.00	100.00	Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kerukunan Umat Beragama
		Jumlah aktor kerukunan yang dibina	Orang	100	100	
		Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	Lokasi	6	6	
SK 19	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi	Lembaga	N/A	1	Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kerukunan Umat Beragama
		Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	Kegiatan	N/A	4	
SK 20	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	%	96	96	Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kerukunan Umat

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Kegiatan
						Beragama
SK 21	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah diaog lintas agama dan budaya	Kegiatan	4	4	Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kerukunan Umat Beragama
SK 22	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	Persentase guru pendidikan agama di sekolah keagamaan dan sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	%	NA	100.00	Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kerukunan Umat Beragama
SK 23	Meningkatnya kompetensi guru pendidikan agama Khonghucu	Persentase Guru Pendidikan Agama Khonghucu yang mengikuti pembinaan kompetensi	%	NA	100.00	Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kerukunan Umat Beragama

Tabel 3.2

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja pada Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan Unit Eselon I Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Kegiatan
SK.1	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah / rujuk	Jumlah KUA yang direvitalisasi	Lokasi	0	5	Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
		Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana dan prasarana	Lokasi	N/A	9	
		Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pranikah	Orang	N/A	6.500	
		Jumlah remaja usia sekolah yang mendapat bimbingan cegah kawin anak dan sex pranikah	Orang	N/A	900	
		Jumlah buku dan kartu nikah yang disediakan	Dokumen	N/A	120.000	
SK.2	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pusaka sakinah	Pasangan	N/A	2.200	Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
SK.3	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	Presentasi lembaga zakat yang terakreditasi sesuai Syariah	%	49,00	80,00	Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf
		Persentase amil yang memiliki sertifikat kompetensi	%	NA	6,13	
		Persentase lembaga zakat yang dibina	%	80,00	90,00	
SK.4	Meningkatnya pengelolaan asset wakaf	Persentase lembaga wakaf yang dibina	%	54,56	88,77	Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf
		Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	%	83,91	85,00	
		Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	%	9,47	20,00	
SK.5	Meningkatnya kualitas kelembagaan ekonomi umat	Persentase partisipasi umat islam dalam pangsa pasar keuangan Syariah	%	6,01	20,00	Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf
		Persentase Lembaga ekonomi umat berbasis zakat dan wakaf yang mendapat pembinaan	%	40,00	75,00	
SK.6	Meningkatnya kualitas penyuluh agama	Nilai kinerja penyuluh agama	Nilai	99.00	100,00	Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf
		Persentase penyuluh agama yang dibina	%	50.09	70,00	
		Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi	Orang	40	40	
		Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	Kelompok	110.396	22.080	
SK.7	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	Persentase Lembaga agama, organisasi social keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	%	6,00	30,00	Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf
		Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	Lokasi	34	34	
SK.8	Meningkatnya kualitas moderasi beragama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	%	50,09	100	Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Kegiatan
	penyuluh agama					Wakaf
SK.9	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama diruang public	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media masa dan ruang public	Lokasi	10	35	Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf
SK.10	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (wisata religi, Situs, Artefak)	Unit	NA	25	Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf
SK.11	Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi	Jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuh kembangkan sikap toleran (hari besar keagamaan)	Kegiatan	8	8	Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf
SK.12	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (MTQ dll)	Kegiatan	35	70	Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf
SK.13	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	%	6,00	30,00	Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf
SK.14	Meningkatnya penanganan konflik intra umat beragama	Persentase konflik intra umat beragama yang ditindaklanjuti	%	15	25	Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
SK.15	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	Persentase rumah ibadah yang ramah	%	0,10	0,35	Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
		Jumlah pengelola rumah ibadah yang dibina	Orang	3.640	6.140	
		Jumlah imam besar masjid yang ditingkatkan mutunya	Orang	NA	22.000	
		Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan jadi percontohan	Lokasi	NA	9	
SK.16	Meningkatnya kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama	Jumlah direktori Pustaka agama yang diinventarisasi, kodefikasi dan didigitalisasi	Dokumen	50	100	Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
		Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	Orang	10	30	
SK.17	Meningkatnya kualitas sarana pendukung	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	Unit	1.343	1.900	Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Kegiatan
	pelayanan keagamaan	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan	Eksemplar	1.000.000	870.000	Syariah
		Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan	Kegiatan	2.000	2.000	
		Jumlah masjid dan mushola yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	Lokasi	1.000	1.000	
		Jumlah SDM ahli falakiah yang dibina	Orang	680	720	
		Jumlah POB yang memenuhi standar	Lokasi	NA	1	
		Jumlah lembaga hisab ruyat yang ditingkatkan mutunya	Lembaga	10	10	
SK.18	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan	%	65,00	90,00	Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kerukunan Umat Beragama
SK.19	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis	%	80,00	100,00	Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kerukunan Umat Beragama
SK.20	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	%	NA	100,00	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
		Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	%	96,00	100,00	Sub Bagian Keuangan dan BMN
SK.21	Meningkatnya kematangan pengendalian intern	Persentase dokumen manajemen resiko yang komprehensif, valid dan reliabel	%	NA	80,00	Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kerukunan Umat Beragama
		Persentase data bidang agama yang komprehensif, valid dan reliabel	%	60,00	100,00	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

Tabel 3.3
Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja pada

**Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan
Unit Eselon I Ditjen Pendidikan Islam**

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Kegiatan
SK1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran/mata kuliah agama	Persentase siswa muslim di sekolah yang memperoleh Pendidikan Agama Islam bermuatan moderasi beragama	%	47,00	75,00	Bidang Pendidkan Agama dan Keagamaan Islam
		Persentase guru Pendidikan 1. Agama Islam di sekolah yang dibina dalam moderasi beragama	%	NA	40,00	
		Persentase pengawas Pendidikan Agama Islam di sekolah yang dibina dalam moderasi beragama	%	NA	50,00	
SK2	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase guru Pendidikan Agama Islam yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	50,00	70,00	Bidang Pendidkan Agama dan Keagamaan Islam
SK3	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	Persentase guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	%	46,50	50,78	Bidang Pendidkan Agama dan Keagamaan Islam
SK4	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	Persentase guru Pendidikan Agama Islam yang mengikuti PPG	%	65,00	90,00	Bidang Pendidkan Agama dan Keagamaan Islam
		Persentase guru Pendidikan Agama Islam berkualifikasi minimal S1	%	77,50	85,00	
SK5	Menguatnya pendidikan agama, nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam sistem pendidikan	Persentase guru Pendidikan Agama Islam yang dibina dalam mengintegrasikan nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam pendidikan agama	%	NA	52,00	Bidang Pendidkan Agama dan Keagamaan Islam
		Persentase pengawas Pendidikan Agama Islam yang dibina dalam mensupervisi pelaksanaan pengintegrasian nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam pendidikan agama	%	NA	31,00	
SK6	Menguatnya peran Pendidikan Diniyah dan Pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama	Persentase pesantren yang berwawasan moderat	%	NA	100,00	Bidang Pendidkan Agama dan Keagamaan Islam
		Persentase peningkatan peserta Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur'an	%	2,00	5,00	

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Kegiatan
SK7	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	Persentase mahasiswa Ma'had Aly yang dibina dalam moderasi beragama	%	NA	60,00	Bidang Pendidkan Agama dan Keagamaan Islam
		Persentase dosen Ma'had Aly yang dibina dalam moderasi beragama	%	NA	20,00	
SK8	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum yang mengintegrasikan kemampuan berpikir	Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan kurikulum yang berlaku	%	85,00	92,00	Bidang Pendidkan Agama dan Keagamaan Islam
SK9	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif	Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	%	NA	30,00	Bidang Pendidkan Agama dan Keagamaan Islam
SK10	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase ustadz pada pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi	%	85,00	92,00	Bidang Pendidkan Agama dan Keagamaan Islam
		Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	3,00	16,00	
		Persentase Kepala pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	NA	18,00	
		Persentase dosen Ma'had Aly yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	3,00	12,00	
		Persentase tenaga kependidikan Ma'had Aly yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	1,00	4,00	
SK11	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	%	NA	8,00	Bidang Pendidkan Agama dan Keagamaan Islam
SK12	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Pendidikan	Persentase Ula yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	NA	45,00	Bidang Pendidkan Agama dan Keagamaan Islam
		Persentase Wustha yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	NA	40,00	
		Persentase Ulya yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	NA	45,00	
		Persentase Mahad Aly yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi	%	NA	90,00	

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Kegiatan
SK13	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	Jumlah siswa penerima BOS pada pendidikan diniyah/muadalah	Orang	160.619	225.000	Bidang Pendidkan Agama dan Keagamaan Islam
		Persentase Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional	%	6,00	15,00	
		Persentase siswa penerima PIP pada pendidikan diniyah/muadalah	%	20,00	20,00	
SK14	Meningkatnya jumlah Anak Tidak Sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan	Persentase ATS yang mengikuti Program Pendidikan Kesetaraan (PPK) di Pesantren	%	35,00	43,00	Bidang Pendidkan Agama dan Keagamaan Islam
SK15	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	Persentase Ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang mengikuti PPG	%	7,00	50,00	
		Persentase Ustadz pendidikan diniyah/muadalah berkualifikasi minimal S1	%	20,00	90,00	
SK16	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	Jumlah Pendidikan keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	Lembaga	NA	4.000	Bidang Pendidkan Agama dan Keagamaan Islam
SK17	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	Persentase lembaga pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan budaya mutu	%	NA	100,00	Bidang Pendidkan Agama dan Keagamaan Islam
		Persentase santri pendidikan diniyah/muadalah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	%	NA	3,00	
		Persentase Ma'had Aly yang menerapkan budaya mutu	%	10,00	28,00	
		Persentase mahasiswa Ma'had Aly yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	%	NA	8,00	
SK18	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	%	NA	100,00	Bidang Pendidkan Agama dan Keagamaan Islam
		Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman	%	NA	100,00	
SK19	Meningkatnya	Jumlah organisasi siswa pendidikan	Kegiatan	50	150	Bidang Pendidkan

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Kegiatan
	kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	diniyah/muadalah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan				Agama dan Keagamaan Islam
		Jumlah gugus pramuka pada pendidikan diniyah/muadalah yang dibina	Unit	50	50	
SK20	Meningkatnya kualitas pendidik vokasi	Jumlah Guru/Instruktur pada Program Ekonomi Kerakyatan di Pesantren yang mengikuti Peningkatan Kompetensi	Orang	NA	300	Bidang Pendidkan Agama dan Keagamaan Islam
SK21	Meningkatnya kualitas lulusan Ma'had Aly	Persentase lulusan Ma'had Aly yang tepat waktu	%	78,00	90,00	Bidang Pendidkan Agama dan Keagamaan Islam
		Rerata lama masa studi mahasiswa Ma'had Aly	Tahun	4	4	
SK22	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	%	NA	100,00	Bidang Pendidikan Madrasah
		Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan pada madrasah yang bermuatan moderasi beragama	Kegiatan	2.000	10.000	
SK23	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum yang mengintegrasikan kemampuan berpikir	Persentase madrasah yang menerapkan kurikulum yang berlaku	%	89,00	100,00	Bidang Pendidikan Madrasah
SK24	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	%	74,00	95,00	Bidang Pendidikan Madrasah
SK25	Meningkatnya kualitas penilaian Pendidikan	Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi	%	NA	100,00	Bidang Pendidikan Madrasah
SK26	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	%	5,00	50,00	Bidang Pendidikan Madrasah
		Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	%	5,00	50,00	
SK27	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Pendidikan	Persentase RA yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	75,00	83,00	Bidang Pendidikan Madrasah
		Persentase MI yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	78,00	85,00	
		Persentase MTs yang memenuhi SPM sarana	%	80,00	90,00	

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Kegiatan
		prasarana				
		Persentase MA yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	81,00	93,00	
SK28	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	Jumlah siswa MI penerima BOS	Orang	3.894.365	4.133.136	Bidang Pendidikan Madrasah
		Jumlah siswa MTs penerima BOS	Orang	3.358.773	3.564.706	
		Jumlah siswa MA penerima BOS	Orang	1.495.294	1.586.974	
		Persentase siswa MI penerima PIP	%	22,00	21,50	
		Persentase siswa MTs penerima PIP	%	25,00	24,00	
		Persentase siswa MA penerima PIP	%	21,00	20,50	
		Jumlah Madrasah yang didirikan di daerah afirmasi	Lembaga	NA	100	
SK29	Meningkatnya jumlah Anak Tidak Sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan	Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	%	0,01	0,20	Bidang Pendidikan Madrasah
SK30	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	Jumlah Siswa RA yang tingkatkan mutunya melalui BOP	Orang	1.331.207	1.385.258	Bidang Pendidikan Madrasah
SK31	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	Jumlah Madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	Lembaga	350	10.000	Bidang Pendidikan Madrasah
SK32	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu	%	NA	90,00	Bidang Pendidikan Madrasah
		Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	%	3,00	5,00	
SK33	Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan sumber dana dan anggaran pendidikan	Persentase Madrasah yang mendapatkan Pelatihan Sistem e-RKAM	%	NA	100,00	Bidang Pendidikan Madrasah
SK34	Meningkatnya budaya belajar dan terwujudnya lingkungan madrasah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	Persentase MTs/MA yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	%	NA	90,00	Bidang Pendidikan Madrasah
		Persentase Madrasah Ramah Anak	%	37,00	80,00	
SK35	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan	Jumlah organisasi siswa yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	Kegiatan	NA	1.000	Bidang Pendidikan Madrasah
		Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina	Unit	NA	1.000	

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Kegiatan
	pendidikan keperamukaan					
SK36	Menguatnya reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi	Persentase MA Kejuruan dan MA Program Keterampilan yang meningkatkan <i>life skill</i> melalui program magang	%	60,00	90,00	Bidang Pendidikan Madrasah
SK37	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	Persentase guru madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	%	4,00	14,50	Bidang Pendidikan Madrasah
		Persentase pengawas madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	%	6,00	28,14	
SK38	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase Guru pada Madrasah yang lulus sertifikasi	%	73,00	77,00	Bidang Pendidikan Madrasah
		Persentase tenaga kependidikan Madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	8,00	24,71	
		Persentase Kepala Madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	0,20	9,30	
		Persentase Guru Madrasah yang mendapatkan penguatan melalui KKG/MGMP Pola PKB dan AKG	%	0,02	12,23	Bidang Pendidikan Madrasah
SK39	Meningkatnya kualitas penilaian Pendidikan	Persentase guru Madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	%	46,50	50,78	Bidang Pendidikan Madrasah
		Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada Madrasah	Orang	320	98	
SK40	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG	%	2,00	7,00	Bidang Pendidikan Madrasah
SK41	Meningkatnya kualitas pendidik vokasi	Jumlah Guru MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang mengikuti Peningkatan Kompetensi	Orang	20	300	Bidang Pendidikan Madrasah
SK42	Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pengawasan internal dan eksternal yang diselesaikan	%	70,00	82,00	Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kerukunan Umat Beragama
SK43	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis	%	14,00	37,00	Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kerukunan Umat Beragama

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Kegiatan
SK44	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	%	70,00	100,00	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
		Nilai penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	%	75,00	88,00	Sub Bagian keuangan dan BMN
SK45	Meningkatnya kematangan pengendalian intern	Persentase dokumen manajemen risiko audit yang komprehensif, valid, dan reliabel	%	14,00	37,00	Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kerukunan Umat Beragama
		Persentase data pendidikan yang komprehensif, valid dan reliabel	%	89,00	95,00	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

Tabel 3.4

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja pada Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan Unit Eselon I Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Kegiatan
SK 1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata kuliah agama	Persentase siswa di SDTK/SMPTK/SMTK/ SMAK yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	%	10,00	10,00	Bimbingan Masyarakat Kristen
		Persentase guru SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK yang dibina dalam moderasi beragama	%	20,00	20,00	

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Kegiatan
		Persentase pengawas SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK yang dibina dalam moderasi beragama	%	30,00	30,00	
		Jumlah kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan pada SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK yang bermuatan moderasi beragama	Kegiatan	10,00	10,00	
		Persentase siswa beragama Kristen di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama Kristen bermuatan moderasi beragama	%	70,00	75,00	
		Persentase guru pendidikan agama yang dibina dalam moderasi beragama	%	21,00	21,00	
		Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah yang dibina dalam moderasi beragama	%	10,00	10,00	
SK 2	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum yang mengintegrasikan kemampuan berpikir	Persentase SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK yang menerapkan kurikulum yang berlaku	%	70.00	70.00	Bimbingan Masyarakat Kristen
SK 3	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif	Persentase SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	%	70.00	70.00	Bimbingan Masyarakat Kristen
SK 4	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	Persentase guru SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	%	65,00	65,00	Bimbingan Masyarakat Kristen
		Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK	Orang	1	1	
		Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa	Kegiatan	1	1	
		Jumlah siswa yang mengikuti asesmen kompetensi	Orang	100	100	

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Kegiatan
SK 5	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	Persentase SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	%	35	35	Bimbingan Masyarakat Kristen
		Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	%	35	35	
SK 6	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	Persentase SDTK yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	55	55	Bimbingan Masyarakat Kristen
		Persentase SMPTK yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	20	20	
		Persentase SMTK/SMAK yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	60	60	
SK 7	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	Jumlah siswa SDTK penerima BOS	Orang	2.500	3.300	Bimbingan Masyarakat Kristen
		Jumlah siswa SMPTK penerima BOS	Orang	3.088	3.888	
		Jumlah siswa SMTK/SMAK penerima BOS	Orang	8.750	9.550	
		Persentase siswa SDTK penerima PIP	%	41,28	41,28	
		Persentase siswa SMPTK penerima PIP	%	91,90	91,90	
		Persentase siswa SMTK/SMAK penerima PIP	%	90,98	90,98	
SK 8	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	%	70.00	70.00	Bimbingan Masyarakat Kristen
		Persentase tenaga kependidikan lainya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	%	70.00	70.00	
SK 9	Meningkatnya kualitas kompetensi guru dan tenaga kependidikan	Persentase Guru SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK yang mengikuti PPG	%	10,00	10,00	Bimbingan Masyarakat Kristen
		Persentase Guru Pendidikan Agama Kristen yang mengikuti PPG	%	40,00	40,00	
SK 10	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi berdasarkan hasil pemetaan	Jumlah SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	Lembaga	5.00	5.00	Bimbingan Masyarakat Kristen
SK 11	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	Persentase SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK yang nerapkan budaya mutu	%	80.00	80.00	Bimbingan Masyarakat Kristen

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Kegiatan
		Persentase siswa SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	%	5.00	5.00	
SK 12	Meningkatnya jumlah pendidikan keagamaan yang melaksanakan program pendidikan karakter	Persentase SMPTK/SMTK/SMAK yang melaksanakan program pendidikan karakter	%	45.00	45.00	Bimbingan Masyarakat Kristen
SK 13	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	Persentase SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	%	35.00	35.00	Bimbingan Masyarakat Kristen
		Persentase SMPTK/SMTK/SMAK Ramah Anak	%	45	45	
SK 14	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	Kegiatan	7	7	Bimbingan Masyarakat Kristen
		Jumlah gugus pramuka pada SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK yang dibina	Unit	78	78	
SK 15	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Kristen	Nilai kinerja penyuluh agama	Nilai	100,00	100,00	Bimbingan Masyarakat Kristen
		Persentase penyuluh agama yang dibina	%	100,00	100,00	
		Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi	Orang	40	40	
		Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	Kelompok	26.829	26.829	
SK 16	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama Kristen	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama Kristen	%	35,00	35,00	Bimbingan Masyarakat Kristen
		Jumlah forum dialog intra umat beragama Kristen yang diselenggarakan	Lokasi	1	1	
SK 17	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	%	100,00	100,00	Bimbingan Masyarakat Kristen
SK 18	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang	Persentase rumah ibadah yang ramah	%	100,00	100,00	Bimbingan Masyarakat Kristen
		Persentase pengelola rumah ibadah yang	%	2,00	9,00	Bimbingan Masyarakat

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Kegiatan
	toleran	dibina				Kristen
SK 19	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang public	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media masa dan ruang publik	Lokasi	1	1	Bimbingan Masyarakat Kristen
SK 20	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi, dll)	Kegiatan	35	35	Bimbingan Masyarakat Kristen
SK 21	Meningkatnya kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama	Jumlah Direktori Pustaka Agama yang diinventarisasi, kodefikasi, dan didigitalisasi	Dokumen	10	10	Bimbingan Masyarakat Kristen
		Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	Orang	50	50	Bimbingan Masyarakat Kristen
SK 22	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	Unit	5	5	Bimbingan Masyarakat Kristen
SK 23	Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi	Jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuhkembangkan sikap toleran (hari besar keagamaan)	Kegiatan	35	35	Bimbingan Masyarakat Kristen
SK 24	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	Unit	1.000	1.000	Pembimas Kristen
		Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan	Eksemplar	50.000	50.000	
		Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	%	12,00	12,00	
SK 25	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga kristiani	Pasangan	35	35	Pembimas Kristen
SK 26	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan	%	70.00	70.00	Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kerukunan Umat Beragama
SK 27	Meningkatnya kualitas	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan	%	100,00	100,00	Sub Bagian Organisasi

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Kegiatan
	implementasi reformasi birokrasi	peta proses bisnis				Tatalaksana dan Kerukunan Umat Beragama
SK 28	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	%	90,00	90,00	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
		Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	%	90,00	90,00	Sub Bagian keuangan dan BMN
SK 29	Meningkatnya kematangan pengendalian intern	Persentase dokumen manajemen risiko audit yang komprehensif, valid, dan reliabel	%	30.00	70.00	Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kerukunan Umat Beragama
		Persentase data pendidikan yang komprehensif, valid dan reliable	%	50.00	50,00	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
SK 30	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian	Dokumen	4	4	Pembimas Kristen
		Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan	Unit	7	7	Pembimas Kristen
		Jumlah layanan umum dan perlengkapan	Unit	1	1	

Tabel 3.5

**Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja pada
Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan
Unit Eselon I Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik**

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Kegiatan
SK 1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	Persentase guru pendidikan agama yang dibina dalam moderasi beragama	%	25,00	100	Bimbingan Masyarakat Katolik
		Persentase pengawas pendidikan agama yang dibina dalam moderasi beragama	%	25,00	100	
		Persentase siswa beragama Katolik di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama Katolik bermuatan moderasi beragama	%	10,00	40,00	
		Jumlah kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan pada SMAK yang bermuatan moderasi beragama	Kegiatan	40	40	
SK 2	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	%	20,00	100,00	Bimbingan Masyarakat Katolik
SK 3	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	%	50,00	100,00	Bimbingan Masyarakat Katolik
SK 4	Meningkatnya kualitas kompetensi guru dan tenaga kependidikan	Persentase Guru Pendidikan Agama Katolik yang mengikuti PPG	%	NA	100,00	Bimbingan Masyarakat Katolik
SK 5	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Katolik	Nilai kinerja penyuluh agama	Nilai	100,00	100,00	Bimbingan Masyarakat Katolik
		Persentase penyuluh agama yang dibina	%	15,00	100,00	
		Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi	Orang	100	300	
		Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	Kelompok	5936	8480	
SK 6	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	%	15,00	100,00	Bimbingan Masyarakat Katolik

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Kegiatan
	Katolik	Katolik				
		Jumlah forum dialog intra umat beragama Katolik yang diselenggarakan	Kegiatan	55	33	
SK 7	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	%	100,00	100,00	Bimbingan Masyarakat Katolik
SK 8	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	Persentase rumah ibadah yang ramah	%	5,00	100,00	Bimbingan Masyarakat Katolik
		Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	%	NA	100,00	
SK 9	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Lokasi	34	34	Bimbingan Masyarakat Katolik
SK 10	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparani, dll)	Kegiatan	1	35	Bimbingan Masyarakat Katolik
SK 11	Meningkatnya kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama	Jumlah Direktori Pustaka Agama yang diinventarisasi, kodefikasi, dan didigitalisasi	Dokumen	NA	38	Bimbingan Masyarakat Katolik
		Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	Orang	NA	114	
SK 12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	Unit	NA	38	Bimbingan Masyarakat Katolik
SK 13	Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat	Jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuhkembangkan sikap toleran (hari besar keagamaan)	Kegiatan	2	2	Bimbingan Masyarakat Katolik

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Kegiatan
	toleransi					
SK 14	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	Unit	NA	38	Bimbingan Masyarakat Katolik
		Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan	Eksemplar	10.000	20.000	
		Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	%	15,00	100,00	
SK 15	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga bahagia	Pasangan	3.000	7.000	Bimbingan Masyarakat Katolik
SK 16	Meningkatnya pemberdayaan lembaga dana sumbangan keagamaan katolik	Jumlah lembaga sumbangan keagamaan katolik yang berpartisipasi dalam pembinaan keagamaan	Lembaga	1	1	Bimbingan Masyarakat Katolik
SK 17	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan	%	70,00	74,00	Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kerukunan Umat Beragama
SK 18	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis	%	100,00	100,00	Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kerukunan Umat Beragama
SK 19	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	%	100,00	100,00	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
		Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	%	100,00	100,00	Sub Bagian Keuangan dan BMN
SK 20	Meningkatnya kematangan pengendalian intern	Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel	%	100,00	100,00	Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kerukunan Umat Beragama
		Persentase data bidang agama dan pendidikan yang komprehensif, valid dan reliabel	%	100,00	100,00	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
SK 21	Meningkatnya kualitas	Jumlah dokumen penyusunan rencana	Dokumen	6	6	Bimbingan Masyarakat

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Kegiatan
	administrasi pendidikan keagamaan	program dan anggaran, keuangan, kepegawaian				Katolik
		Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan	Unit	349	249	
		Jumlah layanan umum dan perlengkapan	Unit	349	349	

Tabel 3.6

**Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja pada
Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan
Unit Eselon I Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu**

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Kegiatan
SK 1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	Persentase guru pendidikan agama yang dibina dalam moderasi beragama	%	80,00	100,00	Bimbingan Masyarakat Hindu
		Persentase pengawas pendidikan agama yang dibina dalam moderasi beragama	%	80,00	100,00	
		Persentase siswa beragama Hindu di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	%	10,00	90,00	
SK 2	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	%	NA	40,00	Bimbingan Masyarakat Hindu
SK 3	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	%	65,00	90,00	Bimbingan Masyarakat Hindu
		Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	%	50,00	70,00	
SK 4	Meningkatnya kualitas kompetensi guru dan tenaga kependidikan	Persentase Guru Pendidikan Agama Hindu yang mengikuti PPG	%	58,00	100,00	Bimbingan Masyarakat Hindu

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Kegiatan
SK 5	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Hindu	Nilai kinerja penyuluh agama	Nilai	70,00	85,00	Bimbingan Masyarakat Hindu
		Persentase penyuluh agama yang dibina	%	100,00	100,00	
		Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi	Orang	NA	1.700	
		Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	Kelompok	63	200	
SK 6	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama Hindu	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama Hindu	%	75,00	100,00	Bimbingan Masyarakat Hindu
		Jumlah forum dialog intra umat beragama Hindu yang diselenggarakan	Lokasi	30	80	
SK 7	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	%	100,00	100,00	Bimbingan Masyarakat Hindu
SK 8	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	Persentase rumah ibadah yang ramah	%	70,00	100,00	Bimbingan Masyarakat Hindu
		Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	%	NA	50,00	
SK 9	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Lokasi	30	90	Bimbingan Masyarakat Hindu
SK 10	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Dharmagita, dll)	Kegiatan	1	NA	Bimbingan Masyarakat Hindu
SK 11	Meningkatnya kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama	Jumlah Direktori Pustaka Agama yang diinventarisasi, kodefikasi, dan didigitalisasi	Dokumen	NA	20	Bimbingan Masyarakat Hindu
		Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	Orang	NA	20	
SK 12	Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi	Jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuhkembangkan sikap toleran (hari besar keagamaan, sekaten, dll)	Kegiatan	6	60	Bimbingan Masyarakat Hindu

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Kegiatan
SK 13	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	Unit	310	400	Bimbingan Masyarakat Hindu
		Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	%	74,00	85,00	
SK 14	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga sukinah	Pasangan	2.889	2.500	Bimbingan Masyarakat Hindu
SK 15	Meningkatnya pemberdayaan lembaga darma dana	Jumlah lembaga darma dan yang berpartisipasi dalam pembinaan keagamaan	Lembaga	NA	1	Bimbingan Masyarakat Hindu
SK 16	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan	%	63,45	85,00	Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kerukunan Umat Beragama
SK 17	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis	%	60,00	90,00	Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kerukunan Umat Beragama
SK 18	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	%	60,00	85,00	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
		Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	%	70,00	85,00	Sub Bagian Keuangan dan BMN
SK 19	Meningkatnya kematangan pengendalian intern	Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel	%	NA	10,00	Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kerukunan Umat Beragama
		Persentase data bidang agama dan pendidikan yang komprehensif, valid dan reliabel	%	50,00	100,00	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
SK 20	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian	Dokumen	12	12	Bimbingan Masyarakat Hindu
		Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan	Unit	150	300	Bimbingan Masyarakat Hindu
		Jumlah layanan umum dan perlengkapan	Unit	675	836	

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Kegiatan
		Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	Orang	6.185	6.550	

Tabel 3.7

**Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja pada
Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan
Unit Eselon I Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha**

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Kegiatan
SK 1	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Buddha	Nilai kinerja penyuluh agama	Nilai	70,00	79,00	Bimbingan Masyarakat Buddha
		Persentase penyuluh agama yang dibina	%	100,00	100,00	
		Jumlah penziar agama yang dibina kompetensi	Orang	50	100	
		Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	Kelompok	4.288	4.288	
SK 2	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama Buddha	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama Buddha	%	15,00	20,00	Bimbingan Masyarakat Buddha
		Jumlah forum dialog intra umat beragama Buddha yang diselenggarakan	Lokasi	36,00	52,00	
SK 3	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	%	60,00	85,00	Bimbingan Masyarakat Buddha
SK 4	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	Persentase rumah ibadah yang ramah	%	40,00	90,00	Bimbingan Masyarakat Buddha
		Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	%	12,00	40,00	

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Kegiatan
SK 5	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Lokasi	12	12	Bimbingan Masyarakat Buddha
SK 6	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi, dll)	Kegiatan	NA	NA	Bimbingan Masyarakat Buddha
SK 7	Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi	Jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuhkembangkan sikap toleran (hari besar keagamaan)	Kegiatan	1	2	Bimbingan Masyarakat Buddha
SK 8	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	Unit	3.125	20.000	Bimbingan Masyarakat Buddha
		Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	%	1,00	1,00	
SK 9	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga hita sukhaya	Pasangan	1.200	2.500	Bimbingan Masyarakat Buddha
SK 10	Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan	%	70,00	90,00	Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kerukunan Umat Beragama
SK 11	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis	%	55,00	80,00	Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kerukunan Umat Beragama
SK 12	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	%	65,00	90,00	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
		Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	%	80,00	90,00	Sub Bagian Keuangan dan BMN
SK 13	Meningkatnya kematangan pengendalian intern	Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel	%	NA	80,00	Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kerukunan Umat Beragama

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Kegiatan
		Persentase data bidang agama dan pendidikan yang komprehensif, valid, dan reliabel	%	50,00	80,00	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
SK 14	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	Persentase guru pendidikan agama yang dibina dalam moderasi beragama	%	55,00	100,00	Bimbingan Masyarakat Buddha
		Persentase pengawas pendidikan agama yang dibina dalam moderasi beragama	%	100,00	100,00	
		Persentase siswa beragama Buddha di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama Buddha yang bermuatan moderasi beragama	%	50,00	100,00	
SK 15	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	Persentase Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	5,00	25,00	Bimbingan Masyarakat Buddha
		Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	6,00	30,00	
SK 16	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	Jumlah Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP	Lembaga	NA	5	Bimbingan Masyarakat Buddha
SK 17	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	%	10,00	30,00	Bimbingan Masyarakat Buddha
		Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	%	100,00	100,00	
SK 18	Meningkatnya kualitas kompetensi guru dan tenaga kependidikan	Persentase Guru Pendidikan Agama Buddha yang mengikuti PPG	%	NA	11,00	Bimbingan Masyarakat Buddha
SK 19	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian	Dokumen	3	3	Bimbingan Masyarakat Buddha
		Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan	Unit	NA	NA	
		Jumlah layanan umum dan perlengkapan	Unit	1	1	

Tabel 3.8

**Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja pada
Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan
Unit Eselon I Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah**

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Kegiatan
SK 1	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	%	75,00	95,00	Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
		Persentase Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang terbina dan terawasi	%	80,00	85,00	
SK 2	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	%	3,19	51,59	Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
		Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	%	0,60	0,30	
SK 3	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji	Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	%	80,34	87,50	Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
SK 4	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	Persentase petugas haji yang profesional	%	87,66	88,00	Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
		Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	%	94,50	96,50	
		Persentase kasus jemaah haji yang terselesaikan	%	70,00	90,00	
		Jumlah advokasi haji yang terselenggara	Kegiatan	34,00	34,00	
		Persentase pembimbing haji yang bersertifikat	%	82,71	88,89	
SK 5	Meningkatnya kualitas pengelolaan dana operasional haji secara profesional, transparan, dan akuntabel	Persentase realisasi pelaksanaan dana operasional haji	%	92,00	95,00	Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
SK 6	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan (<i>Continuity service</i>)	%	90,00	99,00	Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
		Tingkat kepuasan pengakses layanan <i>website</i> haji	Nilai	NA	80,00	
SK 7	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan	%	NA	84,00	Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kerukunan Umat

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Kegiatan
	dan eksternal					Beragama
SK 8	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis	%	NA	90,00	Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kerukunan Umat Beragama
SK 9	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	%	70,00	75,00	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
		Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	%	91,00	94,00	Sub Bagian Keuangan dan BMN
SK 10	Meningkatnya kematangan pengendalian intern	Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliable	%	NA	80,00	Sub Bagian Ortala dan KUB

3.1 Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan, sasaran dan program beserta kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang telah ditetapkan memerlukan dukungan berbagai sumberdaya, terutama dukungan pendanaan yang memadai. Sumber pendanaan berasal dari Pemerintah baik dari pusat maupun daerah dan masyarakat. Sumber pendanaan yang sekarang ini sudah berjalan adalah dari Rupiah Murni, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Hibah Langsung Dalam Negeri dan Sumber Pembiayaan lainnya yang tidak mengikat. Kerangka pendanaan dalam Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama 2020-2024 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi acuan dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan untuk menunjang implementasi program dan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berbasis Renstra, serta berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam sistem pengelolaan pendanaan nasional.

Disamping itu terdapat kegiatan yang sarannya di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan sedangkan anggarannya berada pada Unit Eselon I Pusat antara lain : anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) Madrasah, Bantuan Sarpras Madrasah Swasta, Pengadaan Kitab Suci (Al-Qur'an) dan Pengadaan Buku Nikah.

Adapun Rencana pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan sampai dengan 2024 melalui sumber pembiayaan APBN pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Rencana Pendanaan 9 (Sembilan) Program
Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan
Tahun 2020

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan Tahun 2020 (Rp. 000,00)
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN	1.588.797.527
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	91.212.005
Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	-
Pembinaan Administrasi Kepegawaian	-
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	73.012.005
Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	700.000
Pembinaan Administrasi Perencanaan	-
Pembinaan Administrasi Umum	17.500.000
Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	-
Program Kerukunan Umat Beragama	591.693
Peningkatan Kualitas Layanan Umat Khonghucu	120.000
Pembinaan Kerukunan Umat Hidup Beragama	661.693
Pembinaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu	50.000
Program Bimbingan Masyarakat Islam	140.391.126
Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	16.746.500
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	1.047.776
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	4.131.429

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan Tahun 2020 (Rp. 000,00)
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	415.638
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	118.049.783
Program Pendidikan Islam	1.261.618.167
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	101.523.009
Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam	5.450.300
Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah	297.500.382
Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	308.544.452
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	548.600.024
Program Bimbingan Masyarakat Kristen	48.613.526
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	5.829.655
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	1.200.000
Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	1.173.700
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	40.413.651
Program Bimbingan Masyarakat Katolik	13.788.000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik;	4.706.000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik;	410.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik;	893.000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik	7.779.000

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan Tahun 2020 (Rp. 000,00)
Program Bimbingan Masyarakat Hindu	4.042.815
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu	579.087
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	574.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu	245.560
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu	2.644.168
Program Bimbingan Masyarakat Buddha	9.588.440
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha	2.526.570
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha	981.000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha	6.080.870
Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah	27.880.000
Pelayanan Haji Dalam Negeri	6.934.000
Pembinaan Haji	8.708.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	12.238.000

Tabel 3.10

**Rencana Pendanaan 4 (Empat) Program
Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan Tahun 2021-2024**

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000,00)				
	2021	2022	2023	2024	TOTAL
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN	1.783.756.227	1.954.833.885	2.142.534.178	2.348.463.114	8.229.587.404

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000,00)				
	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Program Dukungan Manajemen	898.078.479	980.019.683	1.071.034.252	1.170.656.119	4.119.788.533
Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	218.790	240.669	264.735	291.209	1.015.403
Pembinaan Administrasi Kepegawaian	2.315.239	1.472.329	1.588.961	1.715.156	7.091.685
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	76.662.605	80.495.735	84.520.522	88.746.548	330.425.410
Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	800.000	900.000	1.000.000	1.200.000	3.900.000
Pembinaan Administrasi Perencanaan	1.200.000	1.320.000	1.430.000	1.540.000	5.490.000
Pembinaan Administrasi Umum	17.302.775	17.800.000	18.500.000	19.000.000	72.602.775
Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000	6.600.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	14.686.000	14.980.000	15.279.000	15.585.000	60.530.000
Dukungan Manajemen Pendidikan dan	603.460.026	663.806.029	730.186.632	803.205.295	2.800.657.982

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000,00)				
	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam					
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	120.078.104	138.089.820	158.803.292	182.623.786	599.595.002
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	1.408.440	1.690.128	2.028.154	2.433.784	7.560.506
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	48.496.381	58.195.658	69.834.789	83.801.747	260.328.575
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik	3.079.000	3.695.000	4.434.000	5.321.000	16.529.000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik	20.708.000	24.850.000	29.819.000	35.783.000	111.160.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu	96.200	104.820	114.302	124.732	440.054
Penyelenggaraan Administrasi	2.841.868	2.946.839	3.056.034	3.169.657	12.014.398

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000,00)				
	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu					
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha	150.000	165.000	181.500	199.650	696.150
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha	6.688.957	7.023.405	7.374.575	7.743.304	28.830.241
Program Kerukunan Umat Dan Layanan Kehidupan Beragama	49.221.331	54.968.074	59.940.766	65.379.828	229.509.999
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	2.267.729	2.290.406	2.299.568	2.318.195	9.175.898
Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	17.284.706	19.877.412	22.859.024	26.287.877	86.309.019
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	1.909.782	2.196.249	2.525.686	2.904.539	9.536.256
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	6.364.117	7.318.735	8.416.545	9.679.027	31.778.424
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	707.265	813.355	935.358	1.075.662	3.531.640

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000,00)				
	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Peningkatan Kualitas Layanan Umat Khonghucu	150.000	180.000	210.000	240.000	780.000
Pelayanan Haji Dalam Negeri	8.320.000	8.487.000	8.657.000	8.830.000	34.294.000
Pembinaan Haji	10.449.000	10.658.000	10.871.000	11.089.000	43.067.000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	2.880.000	2.966.400	4.123.296	5.154.120	15.123.816
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	1.678.000	2.014.000	2.416.000	2.899.000	9.007.000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	1.224.000	1.356.500	1.442.000	1.727.500	5.750.000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha	3.924.000	4.316.400	4.748.040	5.222.844	18.211.284
Program Kualitas Pengajaran Dan Pembelajaran	792.176.812	871.166.544	958.041.001	1.053.588.042	3.674.972.399
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	111.675.310	122.842.841	135.127.125	148.639.837	518.285.113
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam	5.995.330	6.594.863	7.254.349	7.979.784	27.824.326
Pengelolaan dan Pembinaan Mutu					84.371.815

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000,00)				
	2021	2022	2023	2024	TOTAL
dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen	14.363.639	18.816.367	22.955.968	28.235.841	
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah	327.250.420	359.975.462	395.973.008	435.570.309	1.518.769.199
Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	339.398.897	373.338.787	410.672.666	451.739.932	1.575.150.282
Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik	2.453.000	2.944.000	3.533.000	4.240.000	13.170.000
Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu	779.087	876.174	941.261	941.261	3.537.783
Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha	1.962.000	2.158.200	2.374.020	2.611.422	9.105.642
Pembinaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu	30.000	50.000	70.000	90.000	240.000
Program Paud dan Wajib Belajar 12 Tahun	44.279.605	48.679.584	53.518.159	58.839.125	205.316.473
Pengelolaan dan					3.041.053

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000,00)				
	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	659.965	719.362	791.298	870.428	
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam	6.594.863	7.254.349	7.979.784	8.777.763	30.606.759
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	35.127.125	38.639.838	42.503.821	46.754.203	163.024.987
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	1.793.000	2.152.000	2.582.000	3.099.000	9.626.000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu	350.000	350.000	350.000	350.000	1.400.000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha	2.021.256	2.223.382	2.445.720	2.690.292	9.380.649

BAB IV

PENUTUP

Renstra Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari Renstra Unit Eselon I dan Renstra Kementerian Agama 2020-2024. Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, sasaran program serta sasaran kegiatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan. Renstra Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan, rincian IK dan IKS serta cara perhitungan dan periode pelaporannya yang bertujuan untuk meningkatkan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN.

Renstra Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan ini harus digunakan sebagai pedoman dan rujukan arah pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang hendak dicapai pada periode 2020-2024. Renstra ini merupakan dasar dan acuan bagi satuan kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan dalam menyusun Renstra, yaitu pada tingkat kabupaten / kota dan Madrasah.

Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan sebagai instansi yang bertugas melaksanakan pembangunan di bidang agama dan di bidang pendidikan yang bernafaskan keagamaan di provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengakui bahwa bukan perkara mudah untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah dirancang dalam Renstra ini, mengingat masyarakat provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang majemuk dan heterogen, untuk itu kami selalu berusaha menjalin kerja sama, komitmen, dan sinergi dari seluruh unit kerja yang ada di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan agar dapat menjalankan Renstra 2020-2024 ini dengan baik sesuai dengan harapan dan aspirasi masyarakat Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Selanjutnya tugas kami untuk menjalankan Renstra tahun 2020-2024 sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan agar pada akhirnya pelayanan yang diberikan Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan kepada masyarakat dapat terus berjalan secara lebih baik dan dapat memberikan ukuran kontribusi yang signifikan bagi tercapainya tatanan kehidupan sesuai dengan harapan umat melalui tujuan pembangunan Kementerian Agama di bidang agama dan bidang pendidikan dimasa yang akan datang.

Jakarta, 30 September 2020

Kepala Kantor Kementerian Agama

Kota Jakarta Selatan



Moh. Komarudin